

PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP
KEMANDIRIAN FISKAL DAERAH DI KABUPATEN JEMBER

SKRIPSI



Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1)
Jurusan Ilmu Administrasi
Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Pada
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER

Asal	: Hadiah	Klass 336 ROH P e/
	: Pembelian	
Terima	: Tel. 17 JAN 2004	
No. Induk	: <i>ROH</i>	

Oleh :

Hermanto Rohman

NIM : 970910201060

Pembimbing

- I. Dra. Inti Wasiati, MM
- II. Drs. Anwar, M.Si

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER

2003

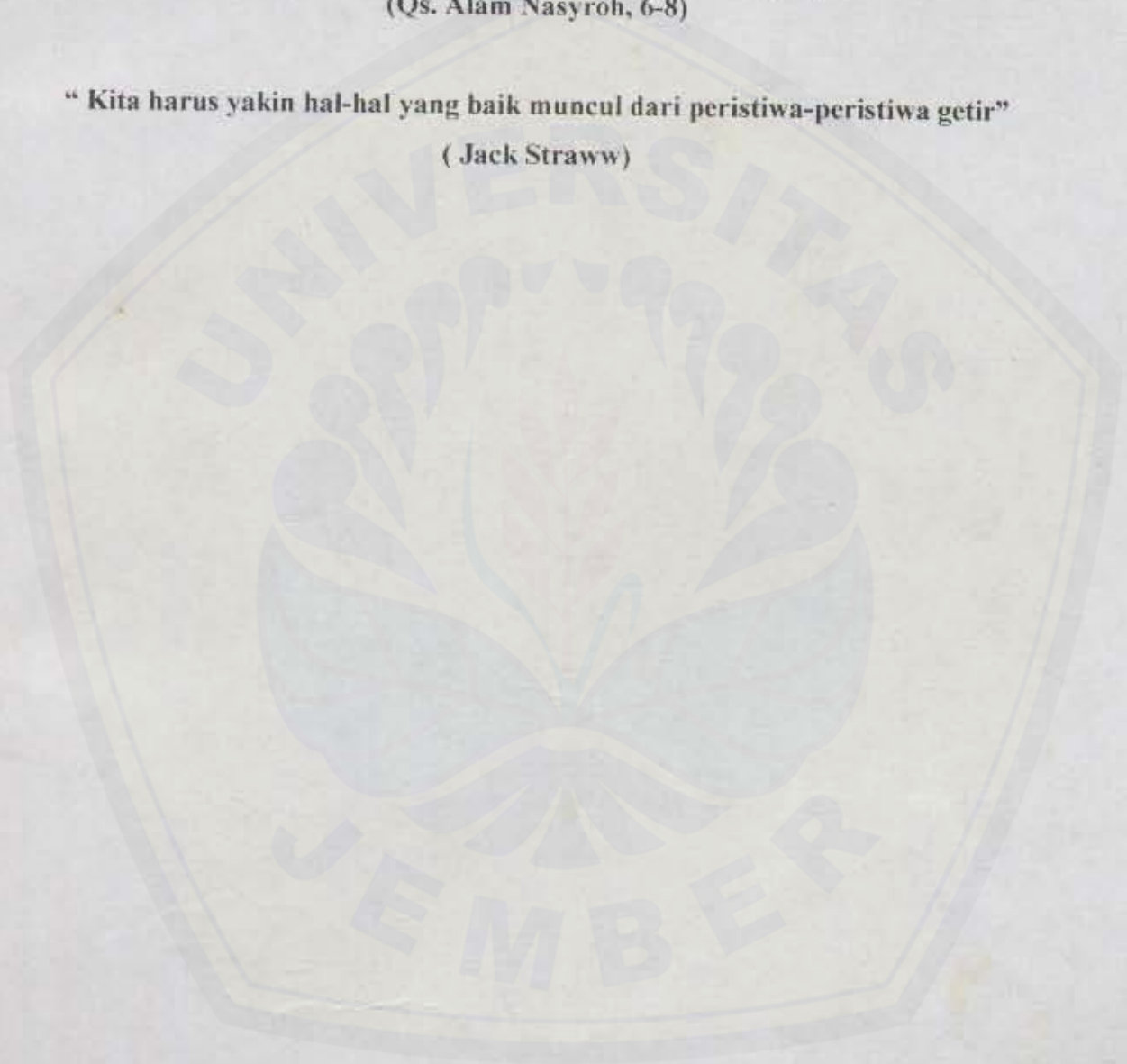
MOTTO:

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu, ada kemudahan.

**Maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan,
Kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain”
(Qs. Alam Nasyroh, 6-8)**

“ Kita harus yakin hal-hal yang baik muncul dari peristiwa-peristiwa getir”

(Jack Straww)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- ☀ Kedua orang tuaku ibunda tercinta Miati dan ayahanda terkasih Karmidi terimakasih atas perhatian, cinta dan kasih sayang yang tak pernah lelah berjuang untuk hidup ananda semoga awal keberhasilan ini menjadi setitik kebahagiaanmu
- ☀ Saudara-saudarku Mbak Zum terimakasih atas perjuangannya demi cita-cita adikmu ini dan kakakku Mas Abd. Wahid, Mas Mukti yang selalu memberi semangat, perhatian, kasih sayang serta dorongannya, dan adikku Riris, keponakanku Wanda Afif, serta “Sikecil” Krisna yang selalu aku rindukan selama dalam studiku ini.
- ☀ Semua sahabatku dan semua orang yang pernah aku cintai yang memberikan gesekan ide , wacana dan suntikan kedamaian sebagai torehan pengalaman hidup yang tidak akan pernah penulis lupakan.
- ☀ Rakyat, Negara, Nusa dan Bangsaku
- ☀ Almamaterku yang kubanggakan

I. LEMBAR PENGESAHAN

Diterima dan dipertahankan di depan Panitia Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Hari : Kamis
Tanggal : 31 Juli 2003
Jam : 08.00 WIB

Ketua

Drs. Abdul Kholiq Ashari, M.Si
NIP : 131 832 305

Sekretaris

Dra. Inti Wasiati, MM
NIP: 130 808 982

Anggota Tim Penguji:

1. Drs. Abdul Kholiq Ashari, M.Si
2. Dra. Inti Wasiati, MM
3. Drs. Anwar, M.Si
4. Selfi Budi H. S.sos, M.Si

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Jember

Dekan



Drs. H. Moch Toerki
NIP : 130 524 832

Kata Pengantar

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan Judul : **“PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP KEMANDIRIAN FISKAL DAERAH DI KABUPATEN JEMBER”**

Dalam penyusunan Skripsi ini, penulis telah berusaha sesuai dengan segala kemampuan yang ada pada diri penulis dengan dorongan dan bantuan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak. Peran mereka sangat besar artinya bagi penulis untuk itu penulis menyampaikan rasa hormat penghargaan setinggi-tingginya, sebagai ungkapan terimakasih kepada :

1. Bapak dan Ibu yang penuh kesabaran dan kasih sayang selalu memberi dorongan semangat serta restu dan mendoa'kan putranya dalam meraih segala cita-citanya.
2. Bapak Drs. H. Moh. Toerki selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
3. Bapak Drs. Ardianto Msi. Selaku Ketua Jurusan Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
4. Bapak Drs. H. Boedijono, Msi Selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara.
5. Ibu Dra. Inti Wasiati, MM Selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Drs. Anwar, Msi selaku asisten pembimbing yang meluangkan waktu, pemikiran dan dedikasinya untuk membimbing penulisan skripsi ini.
6. Bapak Drs. Sutomo, Msi selaku dosen wali yang senantiasa membina dan memberi pengarahan selama penulis menjadi mahasiswa FISIP Universitas Jember.
7. Semua staf pengajar dan karyawan dilingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
8. Bapak Drs. Imam Wahyudi, Msi yang telah memberikan ijin untuk tempat penelitian pada penulis dan juga Bapak Anas selaku Kasubdin

Pendataan yang telah memberikan informasi dalam data serta semua pegawai Dinas pendapatan asli Daerah kabupaten Jember yang telah membantu selama penelitian.

9. Mas Hadi Makmur S.sos yang telah memberikan suntikan wacana , prinsip dalam hidup dan sahabat-sahabat PMAL , sahabat-sahabatku ex. Bangka III/22 (PMII Fisip), yakinlah perjuanganmu adalah investasi ibadahmu serta sesama aktivis kampus dan gerakan terima kasih atas kebersamaan dalam olah wacana dan berbagi duka, suka yang akan menjadi kenangan yang telah kita coretkan selama ini.
10. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi akhir ini.

Tiada suatu karya yang sempurna, kecuali milik Allah semata. Oleh karena itu segala bentuk kritik dan saran atas skripsi ini untuk lebih menyempurnakanya penulis menerima dengan senang hati, semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait Allahumma Amien..

Jember Juni 2003.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN MOTTO	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	7
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
1.3.1 Tujuan Penelitian	9
1.3.1.1 Tujuan Umum	9
1.3.1.2 Tujuan Khusus	9
1.3.2 Kegunaan Penelitian	9
1.4 Kerangka Teori	10
1.4.1 Otonomi Daerah	11
1.4.1.1 Desentralisasi Fiskal Daerah	12
1.4.1.2 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah	14
1.4.1.3 Kebijakan Keuangan Daerah	17
1.4.2 Konsep Pendapatan Asli Daerah	19
1.4.2.1. Konsep Pajak Daerah (X1)	22
1.4.2.1. Konsep Retribusi Daerah (X2)	23
1.4.3 Konsep Kemandirian Fiskal Daerah (Y)	24
1.4.4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	29

1.5 Hipotesis.....	31
1.6 Definisi Operasional.....	32
1.7 Model Penelitian.....	32
1.8 Metode Penelitian.....	35
1.8.1 Tipe Penelitian.....	35
1.8.2 Obyek Penelitian.....	35
1.8.3 Lokasi Penelitian.....	36
1.8.4 Tekhnik pengumpulan data.....	37
1.8.5 Tekhnik analisis data dan Uji Hipotesis.....	37
1.8.5.1 Analisa deskriptif.....	37
1.8.5.2 Analisa Inferensial.....	38
1.8.6 Uji Hipotesis.....	39
A. Uji F.....	39
B. Uji t.....	40
C. Uji r^2	40
D. Uji R^2	41

BAB II DISKRIPSI DAERAH PENELITIAN

2.1 Pengantar.....	42
2.2 Letak Geografis.....	42
2.3 Pemerintahan.....	43
2.4 Penduduk dan Tenaga Kerja.....	43
2.5 Sosial Budaya.....	46
2.6 Pertanian.....	46
2.7 Industri.....	50
2.8 Perdagangan.....	51
2.9 Keuangan.....	53
2.10 Pendapatan Regional.....	54

BAB III PENYAJIAN DATA

3.1 Pengantar.....	55
3.2.1 Gambaran Sumber Penerimaan APBD Kabupaten Jember.....	55

3.2.2	Gambaran Pendapatan Asli Daerah dan Sumber-sumber Penerimaan Pendapatan Asli Daerah.....	56
-------	---	----

BAB IV ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN

4.1	Kemandirian Fiskal Daerah Kabupaten Jember.....	60
4.1.1	Kontribusi Penerimaan Daerah terhadap Total Penerimaan Daerah	61
4.1.2	Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah Pengantar.....	65
4.2	Kontribusi Sumber-sumber PAD terhadap Penerimaan Daerah.....	66
4.2.1	Penerimaan PAD dari Sektor Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Jember tahun 1995/1996-tahun 2002	66
4.2.2	Penerimaan PAD dari Sektor Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Jember tahun 1995/1996-tahun 2002	69
4.3	Analisis Regresi Berganda	72
4.3.1	Analisa Hasil.....	73
4.3.1.1	Koefisien Determinasi Berganda (R^2)	73
4.3.1.2	Pengujian Hipotesis Koefisien regresi secara simultan dengan Uji F.....	73
4.3.1.3	Pengujian Koefisien regresi secara Individu dengan Uji t.....	74
4.3.2	Pembahasan Hasil Analisa.....	77
4.3.3	Hasil Pajak.....	79
4.3.4	Hasil Retribusi.....	81

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1	Kesimpulan.....	85
5.2	Saran.....	86

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penerimaan Daerah Kabupaten dan Kota Seluruh Indonesia Tahun 1997/1998 –1999/2000.....	3
Tabel 2. Sumber Penerimaan APBD Kabupaten Jember menurut Tahun Anggaran 1995/1996-tahun2002.....	4
Tabel 3. Skala Interval Dejjat Desentralisasi Fiskal.....	29
Tabel 4. Gambaran Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kabupaten Tahun 1999.....	44
Tabel 5. Gambaran Kepadatan Penduduk Pada Masing-masing Wilayah Di Kabupaten Jember 1999.....	45
Tabel 6. Gambaran Area Intensifikasi Komiditi Prioritas tahun 1999/2002....	47
Tabel 7. Gambaran Realisasi Pengadaan Pangan Tahun 1999/2000.....	48
Tabel 8. Gambaran Populasi Ternak tahun 1998/1999-1999/2000.....	49
Tabel 9. Gambaran Perkembangan Produksi Perikanan tahun 1997/1998.....	50
Tabel 10.Sumber Penerimaan APBD Kabupaten Jember menurut Tahun Anggaran 1995/1996-tahun2002.....	56
Tabel 11.Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 1995/1996-tahun 2002.....	57
Tabel 12.Target Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 1995/1996-tahun 2002.....	58
Tabel 13.Realisasi Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 1995/1996-tahun 2002.....	58
Tabel 14.Proporsi Penerimaan Daerah terhadap Total Penerimaan Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 1995/1996-tahun 2002.....	61
Tabel 15.Proporsi Sumber-sumber/Komponen PAD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 1995/1996-tahun 2002.....	63
Tabel 16.Perkembangan PAD dan Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 1995/1996-tahun 2002.....	65
Tabel 17.Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 1995/1996-tahun 2002.....	67

Tabel 18. Perkembangan Proporsi Sumber-sumber/Komponen Pajak Daerah Terhadap Total Penerimaan Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 1995/1996-tahun 2002.....	68
Tabel 19. Target dan Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 1995/1996-tahun 2002.....	70
Tabel 20. Perkembangan Proporsi Sumber-sumber/Komponen Retribusi Daerah Terhadap Total Penerimaan Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 1995/1996-tahun 2002.....	71
Tabel 21. Analisis regresi Linier Berganda.....	72
Tabel 22. Rangkuman Hasil Pengujian Variabel Bebas Secara Simultan	74
Tabel 23. Perbandingan antar nilai t hitung Dengan nilai t tabel masing-masing variabel bebas pada tingkat signifikansi 0,025 %.....	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Indikator yang Mempengaruhi Kesiapan untuk Melaksanakan Otonomi Daerah.....	26
Gambar 2. Model Penelitian “ Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Fiskal Daerah.....	34
Gambar 3. Rata-rata Proporsi dan Peringkat Sumber-sumber Penerimaan Daerah Kabupaten Jember Tahun 1998/1999-1999/2000.....	62
Gambar 4. Rata-rata Proporsi dan Peringkat Sumber-sumber Penerimaan PAD Kabupaten Jember Tahun 1998/1999-1999/2000.....	64
Gambar 5. Kurva normal uji hipotesis dua arah variabel dengan uji t.....	75
Gambar 6. Kurva normal uji hipotesis dua arah variabel dengan uji t.....	76

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Daftar Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 1995/1996 –tahun 2002.
- Lampiran 2. Hasil Regresi Linier Berganda dengan SPSS 10.0 for Windows dan data input analisis regresi
- Lampiran 4. Surat Ijin Penelitian dari Lembaga Penelitian Universitas Jember Kepada Kepala BAKESBANG Kabupaten Jember
- Lampiran 5 Surat Ijin Penelitian dari BAKESBANG Kepada Kepala DISPENDA, BPS, BAPPEDA, Bag Keuangan Pemda Kabupaten Jember
- Lampiran 6 Surat telah mengadakan Penelitian dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

BAB I
PENDAHULUAN



Milik UPT Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER

1.1 Latar Belakang Masalah

Menghadapi era globalisasi perdagangan bebas, isu mengenai kemandirian daerah dalam mengelola pembangunan telah mendapat banyak perhatian dari berbagai kalangan. Di era globalisasi pembangunan suatu bangsa tidak akan berjalan dengan cepat dan merata bila pembangunan di daerah selalu ditentukan oleh pemerintahan pusat. Daerah harus memiliki kemandirian dan inisiatif bagi pembangunan daerahnya.

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Untuk mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kuat perlu memberdayakan pelaku dan potensi daerah serta memperhatikan penataan ruang, baik fisik maupun sosial sehingga terjadi pemerataan ekonomi sejalan dengan otonomi daerah. Pembangunan daerah bertujuan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat didaerah melalui pembangunan yang serasi dan terpadu baik antar sektor maupun antara pembangunan sektoral dengan perencanaan pembangunan oleh daerah yang efisien efektif menuju tercapainya kemandirian daerah dan kemajuan yang merata di seluruh pelosok tanah air (Dirjen Dikti, Depdikbud RI, 1993)

Ditinjau dari segi politik ketatanegaraan yang sangat penting adalah terjadinya pergeseran paradigma dari sistem pemerintahan yang bercorak sentralistik mengarah pada sistem yang desentralistik yang memberi keleluasaan kepada daerah dalam wujud otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai kondisi dan potensi wilayahnya (Koswara, 2000).

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom maupun berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerah artinya daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber – sumber keuangan sendiri mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup dan memadai untuk

membayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar, yang didukung oleh kebijaksanaan perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai prasarat mendasar sistem pemerintahan negara.

Dalam hal pelaksanaan otonomi daerah paling tidak terdapat empat elemen dasar yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, keempat elemen tersebut menurut Cheema dan Rondinelli (1989) adalah desentralisasi politik, desentralisasi fiskal, desentralisasi ekonomi. Keempat elemen tersebut menjadi kewajiban daerah untuk mengelolanya secara efisien dan efektif sehingga dengan demikian tercapai kemandirian daerah untuk melaksanakan fungsi-fungsinya dengan baik. Salah satu elemen yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tersebut adalah desentralisasi fiskal (*fiscal decentralitation*) yang merupakan komponen utama dari desentralisasi.

Pemerintah daerah Kabupaten sebagai daerah otonom memiliki otonomi daerah yang nyata, bertanggung jawab dan dinamis, yang berkedudukan lebih langsung berhubungan dengan masyarakat merupakan salah satu pelaku dan harus berperan sebagai *engine of growth* dalam upaya pembangunan daerah. Peran pemerintah daerah tersebut akan terseleksi dalam pendayagunaan kemampuan mengelola sektor-sektor publik, terutama kemandirian dalam keuangan daerah dan pengelolaannya serta penggalian sumber-sumber penerimaan daerah.

Kemandirian daerah dalam keuangan setidaknya pembiayaan untuk pengeluaran rutin dengan PAD tetap merupakan suatu usaha yang harus ditingkatkan, menurut Pontjowinoto (1991 :33) ditinjau dari sudut kebijakan (*discretion*) dalam penggunaan dana PAD merupakan sumber pembangunan yang paling memberikan otonomi kepada daerah.

Menurut Devas (1989 : 46) , untuk dapat melaksanakan perubahan (pemerintahan dan pembangunan) di daerah dalam kerangka otonomi daerah, "mungkin sudah memadai jika 20 % pengeluaran berasal dari sumber-sumber di daerah ". Ini berarti bahwa 20 % dari total pengeluaran / belanja daerah bersumber dari pendapatan asli daerah.

Dari pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa daerah kota / kabupaten dapat dikatakan siap untuk melaksanakan otonomi daerah dari sisi keuangan daerah, jika total sumber penerimaan / pendapatan asli daerah (PAD) mencapai 20 % dari total pendapatan daerah dan atau terpenuhi masing-masing 10 % untuk membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan daerah yang bersangkutan.

Sampai saat ini di dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan di daerah kabupaten / kota di seluruh Indonesia sebagian besar masih menggantungkan pada subsidi dari pemerintah pusat, hal ini disebabkan karena sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten / kota masih relatif kecil sekali keadaan ini dapat dilihat pada tabel 1 sebagai berikut .

Tabel 1
Penerimaan Daerah Kabupaten dan Kota Seluruh Indonesia Tahun
1997 / 1998 -1999/2000

Uraian	1997/1998		1998/1999		1999/2000	
	Jumlah Rp Miliar	Proporsi (%)	Jumlah Rp Miliar	Proporsi (%)	Jumlah Rp Miliar	Proporsi (%)
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2.078,81	13,03	2.248,63	10,76	2.354,69	9,63
Bagian Daerah	22.342,35	14,70	2.988,62	14,29	2.886,78	11,80
Subsidi Daerah Otonom (SDO)	10.889,93	68,32	14.861,12	71,09	18.457,08	75,44
Pinjaman Daerah	127,17	0,80	267,03	1,28	215,06	0,88
Sisa Lebih Th. sebelumnya	503,40	3,16	539,76	2,58	551,49	2,25
APBD Kab/Kota	15.939,66	100,00	20.905,16	100,00	24.465,10	100,00

Sumber : *Nota Keuangan, 2000 (dalam Wulandari 2001)*

Bedasarkan data diatas bahwa proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di seluruh kabupaten / kota di Indonesia terus menurun, dan rata-rata proporsi PAD terhadap APBD hanya 9,63 %. Hal ini karena dasar hukum dari dari sumber-sumber PAD tersebut masih mengacu pada UU No. 8 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dimana undang-undang ini sangat membatasi kreativitas daerah dalam menggali sumber penerimaan aslinya karena hanya

menetapkan 6 jenis pajak yang dipungut oleh kabupaten/kodya. Ini menunjukkan betapa kecilnya sumber pendapatan yang dapat dihasilkan oleh pemerintah daerah kabupaten / kota di seluruh Indonesia. Dalam sistem desentralisasi fiskal hal ini tidak relevan karena salah satu syarat desentralisasi fiskal adalah pemberian kewenangan yang longgar dalam memungut pajak lokal sehingga peran PAD tidak lagi relatif kecil terhadap kemandirian daerah.

Pemerintah Kabupaten Jember sebagai daerah otonom dengan kemampuan keuangannya diharapkan dalam jangka panjang dapat membiayai sendiri program pembangunannya. Pada era otonomi daerah sumber dari PAD diharapkan mempunyai peranan penting didalamnya terutama dalam meningkatkan total penerimaan APBD untuk membiayai pengeluaran rutin daerah.

Pemerintah Kabupaten Jember sendiri sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten masih relatif kecil sekali sehingga dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya sebagian besar masih menggantungkan pada subsidi dari pemerintah pusat, meskipun terjadi kenaikan besarnya realisasi PAD, keadaan ini dapat dilihat dalam tabel perkembangan APBD Kabupaten Jember selama tahun anggaran 1995/1996 – tahun 2002 ditunjukkan sebagai berikut :

TABEL 2 SUMBER PENERIMAAN APBD KABUPATEN JEMBER MENURUT TAHUN ANGGARAN 1995/1996- tahun 2002 (dalam ribuan rupiah)

Tahun.	Penerimaan Total	SLPATL	Pendapatan Asli Daerah	Bagi Hasil Pajak /Bagi Pajak	Subsidi	Lain-2	Pinjaman
95/96	45,955,963	825,034	10,709,882	7,269,843	27,151,204	0	0
96/97	56,472,322	1,932,338	15,048,073	8,674,411	30,817,300	0	0
97/98	58,644,105	2,454,252	13,589,542	9,389,792	33,210,519	0	0
98/99	156,966,150	2,529,211	20,141,359	12,308,507	121,987,073	0	0
99/00	203,346,623	6,344,071	25,611,912	14,619,932	156,770,708	0	0
2000	211,582,921	7,191,395	16,478,605	15,977,603	171,246,903	33,000	655,415
2001	480,507,902	8,423,659	26,469,441	27,709,009	417,861,793	44,000	0
2002	555,433,345	47,540,655	38,184,247	28,557,699	426,854,740	14,296,004	0
Rata-2	321,567,388	96,550,827	25,377,112	15,563,349	258,944,243	1,796,626	81,927

Sumber : Dispenda, Bappeda, dan BPS Kabupaten Jember tahun 2002(data diolah)

Berdasarkan data tersebut Penerimaan PAD tahun 1995/1996-tahun 2002 sendiri rata-rata sebesar Rp 25,377,112,000,- atau sekitar 7,89 % dan terjadi kenaikan PAD tiap tahunnya. Namun sumber penerimaan APBD tahun 1995/1996-tahun 2002 terbesar diperoleh dari subsidi /bantuan dengan rata-rata sebesar Rp 258,944,243,000,- sekitar 80,5 %. Berdasarkan gambaran tersebut bahwa total PAD untuk membiayai total pengeluaran daerah hanya sekitar 7,89 % atau kurang dari 20 % .

Pada tahun 2002 PAD mengalami kenaikan yang mencolok namun ini dirasa tidak cukup bila digunakan untuk menopang biaya pembangunan daerah. Untuk itu pemerintah daerah pada tahun anggaran 2003 perlu menaikkan PADnya. Sebagaimana yang disampaikan Anggota DPRD Jember, Soedjatmiko, mengatakan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun anggaran 2003 perlu dinaikkan minimal 10 persen dari tahun 2002 (Rp 26,268 milyar). "Kenaikan ini diharapkan dapat digunakan untuk menopang program pembangunan yang selama ini dananya belum mencukupi," kata Sudjatmiko. (Kompas, 2002)

Untuk itu dalam mencukupi pembiayaan pembangunan pada tahun anggaran 2003 pemerintah daerah Jember sangat berharap pada bantuan pusat berupa DAU yang besar, yaitu mencapai Rp 456 milyar atau naik dari Rp 423,625 milyar. Sebagaimana menurut informasi yang diperoleh Bupati Jember, penerimaan DAU Kabupaten Jember bukan lagi Rp 423,625 milyar seperti tahun lalu, namun diharapkan Rp 456 milyar. Meski demikian, Pemkab Jember tidak akan mencantumkan dana itu dalam RAPBD karena masih belum ada keppresnya.(Kompas , 2002)

Dari hal diatas menampakkan bahwa dalam proses pembiayaan pembangunan daerah peran PAD masih kurang begitu besar, sehingga daerah masih membutuhkan bantuan pusat berupa subsidi atau bantuan dari pemerintah pusat berupa SDO / DAU yang jumlahnya jauh melebihi dari jumlah PAD. Padahal dengan patokan 20 % sebenarnya 80 % anggaran pengeluaran daerah bisa didapatkan dari pusat melalui DAU (Dana Alokasi Umum) dan DAK (Dana Alokasi Khusus), namun hal ini tidak bisa dijadikan dasar daerah untuk

terus menggantungkan diri kepada pusat. Atas asumsi inilah sebagaimana apa yang disampaikan oleh anggota DPR diatas maka PAD dari tahun ke tahun perlu ditingkatkan terus agar daerah mampu berotonomi dalam pembiayaan pembangunan daerah, dengan mengurangi ketergantungan yang besar pada bantuan pusat.

Kekhawatiran dari berbagai daerah di Indonesia termasuk Kabupaten Jember sendiri karena minimnya penerimaan daerah tentunya bisa dipahami karena pelaksanaan otonomi daerah membawa konsekuensi bagi pemerintah daerah untuk lebih mandiri, sehingga leluasa dalam menentukan arah pembangunan daerahnya. Akan tetapi, sampai saat ini masih banyak masalah yang dihadapi pemerintah daerah kabupaten/kota terkait dengan upaya meningkatkan penerimaan daerahnya, antara lain : *pertama*, tingginya tingkat kebutuhan daerah (*fiscal need*) yang tidak seimbang dengan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) yang dimiliki daerah sehingga menimbulkan *fiscal gap*; *kedua*, kualitas pelayanan yang masih rendah sehingga menimbulkan produk pelayanan publik yang dapat dijual ke masyarakat direspon secara negatif. Keadaan ini menimbulkan keengganan masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah sehingga mempengaruhi optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD aktual); *ketiga*, lemahnya infrastruktur prasarana dan sarana umum; *keempat* semakin berkurangnya bantuan dari pusat (DAU yang dikurangi); *kelima*, belum diketahui potensi PAD yang mendekati riil.

Menurut Mardiasmo (2002: 146), pemerintah diharapkan dapat meningkatkan PAD untuk mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan dari pusat, dalam meningkatkan otonomi dan keleluasaan daerah (*local discretion*). Karena itu otonomi daerah ini bisa diwujudkan apabila disertai dengan otonomi keuangan yang efektif. Ini berarti bahwa pemerintah daerah secara finansial harus bersifat independen terhadap pemerintah pusat dengan jalan sebanyak mungkin menggali sumber-sumber PAD seperti pajak dan retribusi (Radianto, 1997 : 42) Langkah penting yang harus dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah adalah dengan mencoba menghitung kembali potensi PAD

yang riil dimiliki daerah. Untuk itu diperlukan metode perhitungan PAD yang sistematis dan rasional.

Berdasarkan fakta diatas sehubungan dengan realisasi penerimaan PAD (*PAD actual*) Kabupaten Jember, dimungkinkan terdapat adanya fenomena perbedaan (*disparity*) kemampuan PAD yang seharusnya diperoleh (*PAD Potensial*) dengan hasil realisasi penerimaan PAD (*PAD actual*) di Kabupaten Jember agar mampu dalam mencukupi kegiatan pemerintahan dan pembiayaan pembangunan. Berdasarkan tulisan Kristiadi (1985) yang menyatakan bahwa salah satu faktor penting dari usaha peningkatan PAD adalah keadaan perekonomian pada umumnya dan realisasi sumber-sumber PAD itu sendiri. Oleh karena itu kemungkinan munculnya fenomena disparitas tersebut menjadikan perlu dikaji kembali tentang kemampuan dalam meningkatkan PAD aktualnya daerah Kabupaten Jember. Hal lain yang juga perlu diperhatikan adalah dengan diberlakukannya Undang-undang No. 25 / 1999 bahwa keuangan daerah masih tetap memiliki ketergantungan yang sangat besar terhadap pusat khususnya dana perimbangan yang berasal dari PAD. Untuk masa datang PAD itulah yang harus dirumuskan kembali formulanya agar peranannya menjadi besar, sehingga kemandirian daerah dalam pengelolaan fiskal menjadi semakin besar. Atas dasar inilah maka penulis tertarik mengkaji dalam studi penelitian dalam mengetahui pengaruh sumber-sumber PAD dari pajak daerah dan retribusi daerah terhadap kemandirian fiskal (*Fiscal Decentralitation*) daerah.

1.2 Perumusan Masalah

Pada dasarnya penelitian yang dilakukan oleh seseorang karena adanya rasa ingin tahu, juga dorongan – dorongan dalam dirinya sehingga terdorong melakukan penelitian untuk mendapatkan data yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah, untuk itu setiap penelitian yang akan dilakukan berangkat dari masalah.

Seperti yang telah diuraikan diatas bahwa suatu daerah otonom dapat dikatakan mampu berotonomi salah satunya adalah daerah mempunyai kemampuan keuangan untuk membiayai pemerintahan didaerahnya. Sehingga

kemampuan keuangan untuk membiayai pemerintahan didaerahnya. Sehingga dalam penyelenggaraan otonomi di daerah , daerah perlu dukungan sumber pembiayaan berdasarkan asas desentralisasi , dekonsentrasi , tugas pembantuan dan itu perlu diatur dengan adanya perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang berupa sistem keuangan berdasarkan pembagian kewenangan, tugas dan tanggung jawab yang jelas antara tingkat wilayah. Kemampuan keuangan daerah yang dimaksud diatas artinya adalah daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber – sumber keuangan sendiri mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup dan memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Atas dasar inilah yang menjadi permasalahan keuangan daerah berkisar pada usaha untuk menggali potensi-potensi keuangan yang ada di daerah se-efektif dan se-efisien mungkin dalam batas undang-undang yang berlaku. Berdasarkan UU No 22 dan UU No 25 th 1999 salah satu upaya yang perlu dilakukan daerah dengan menggali keuangan melalui peningkatan pendapatan khususnya dari sumber –sumber PAD. Penggunaan dana sumber-sumber PAD merupakan sumber pembangunan yang paling memberikan otonomi kepada daerah dan menunjukkan bahwa pada era otonomi daerah, ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin.

Berdasarkan hal-hal diatas, penelitian ini disusun dalam rumusan masalah sebagai berikut :

1. Seberapa besar perkembangan sumber-sumber PAD dan kemandirian fiskal daerah Kabupaten Jember selama tahun (1995/1996- tahun 2002) ?
2. Apakah sumber-sumber PAD dari pajak daerah, dan retribusi daerah, secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang bermakna terhadap Kemandirian fiskal daerah Kabupaten Jember selama tahun (1995/1996- tahun 2002) ?
3. Seberapa besar perubahan kemandirian fiskal daerah sebagai akibat dari perubahan faktor hasil pajak daerah dan hasil retribusi daerah di Kabupaten Jember selama tahun (1995/1996- tahun 2002) ?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1.3.1.1 Tujuan Umum

Hasil penelitian ini secara umum diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah kabupataen Jember dalam menentukan kebijakan keuangan daerah dengan melihat gambaran kemampuan daerah yang berkaitan dengan sumber-sumber Potensial PAD yang mempengaruhi kemampuan otonomi fiskal daerah. Sehingga aparaturn pemerintah daerah diharapkan dapat menambah wawasan inovatif, dan enterprreneurship dalam menentukan kebijakan tersebut.

1.3.1.2 Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui seberapa besar perkembangan sumber-sumber PAD dan kemandirian fiskal daerah Kabupaten Jember selama tahun (1995/1996- tahun 2002) ?
- b. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh sumber-sumber PAD dari pajak daerah, dan retribusi daerah, secara bersama-sama terhadap Kemandirian fiskal daerah Kabupaten Jember selama tahun (1995/1996- tahun 2002) ?
- c. Untuk mengetahui besarnya perubahan kemandirian fiskal daerah sebagai akibat dari perubahan faktor hasil pajak daerah dan hasil retribusi daerah di Kabupaten Jember selama tahun (1995/1996- tahun 2002) ?

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Manfaat yang bisa diperoleh dari penelitian ini antara lain adalah :

1. Dapat memberikan masukan berarti dalam kaitannya terhadap otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab di kabupaten Jember.
2. Diharapkan dapat berguna sebagai masukan berharga bagi pemerintah daerah Kabupaten Jember dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan upaya peningkatan PAD.

1.4 Kerangka Teori

Dalam setiap penelitian kerangka teori dimaksudkan untuk memberikan landasan-landasan konseptual. Pengertian teori menurut Kerlinger dalam (Effendi Ed.,1995: 37) Mendefinisikan teori sebagai berikut “Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, konstruk, definisi dan proposisi untuk menerangkan sesuatu secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep”.

Lebih lanjut Kerlinger (Effendi Ed., 1995: 37) menyatakan :

“Menurut definisi ini teori mengandung tiga hal : *pertama*, teori adalah serangkaian proposisi antar konsep-konsep yang sedang berhubungan; *kedua*, teori menerangkan secara sistematis suatu fenomena sosial dengan cara menentukan hubungan antar konsep; *ketiga*, teori menerangkan fenomena tertentu dengan cara menentukan konsep mana yang berhubungan dengan konsep lainnya dan bagaiman hubungannya “

Berhubungan dengan konsep menurut Effendi Ed (1995 : 34) adalah sebagai berikut :

“ konsep, yakni istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian , keadaan kelompok dan individu yang menjadi pusat perhatian. Konsep adalah abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik kejadian, keadaan kelompok atau individu tertentu “

Dari pendapat diatas lebih lanjut penulis akan uraikan dalam konsep sebagai berikut :

Seperti yang dijelaskan bahwa ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi adalah pada kemampuan keuangan daerahnya. Artinya daerah memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Untuk itu otonomi fiskal daerah merupakan aspek yang penting dari otonomi daerah secara keseluruhan guna mendorong kemampuan pemerintah daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya secara mandiri.

Maxwel tahun 1997 (Wulandari, 2001 : 21) berpendapat bahwa otonomi keuangan daerah adalah:

“Kemampuan pemerintah daerah dalam menggali sumber-sumber penerimaan yang independen seperti pajak daerah dan retribusi daerah. Alokasi dana dari pusat kepada daerah akan disertai dengan kontrol yang ketat terhadap pengeluaran daerah sehingga dapat mematikan inisiatif

daerah, yang pada gilirannya akan membuat daerah tersebut semakin bergantung pada pemerintah pusat”.

Pendapat ini didukung oleh Radianto (1997 : 42) otonomi keuangan berarti bahwa pemerintah daerah secara finansial harus bersifat independen terhadap pemerintah pusat dengan jalan sebanyak mungkin menggali sumber-sumber PAD seperti pajak dan retribusi.

Menurut Santoso (1995 : 20), proporsi PAD terhadap total penerimaan daerah merupakan indikasi derajat kemandirian / kemampuan suatu daerah, sering juga disebut sebagai kemandirian fiskal (*fiscal independence*).

Dari pendapat tersebut Kemandirian fiskal daerah merupakan kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan daerah dengan lebih menggali sumber-sumber penerimaan yang independen bagi daerah dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti pajak daerah dan retribusi daerah.

1.4.1 Otonomi Daerah

Pemberian otonomi daerah kepada pemerintah daerah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan yang demokratis, dan keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam rangka melakukan pemberdayaan untuk mendorong terciptanya kemandirian daerah agar daerah mampu bersaing di era globalisasi.

Dalam UU No 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, Otonomi Daerah adalah kewenangan yang diberikan pada Daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab dengan titik berat penerapannya pada daerah kabupaten dan kota.

Kebijakan pembangunan daerah didasarkan pada pemberian prinsip-prinsip otonomi dan pendelegasian wewenang kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan pembangunan daerah. Dalam penyelenggaraan Otonomi daerah, dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip –prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Ada tiga azas yang dianut dalam sistem penyelenggaraan

Pemerintahan daerah otonom, yaitu azas desentralisasi, azas dekonsentrasi, azas tugas pembantuan.

1.4.1.1 Desentralisasi Fiskal Daerah

Menurut Admosudirdjo “ Desentralisasi adalah penunjukan proses pendelegasian dari pada tanggung jawab terhadap sebagian dari dalam administrasi negara kepada badan-badan otonom dan tidak hanya mengenai kewenangan dari suatu urusan tertentu (1970 : 211). Sedangkan Danuredjo mengartikan desentralisasi sebagai pelimpahan wewenang dalam otonomi dari organ-organ lebih tinggi (pemerintah pusat) kepada organ-organ otonom (kepada daerah swatantra / istimewa tingkat I / II / serta Dewan Perwakilan Rakyatnya.

Dengan mengemukakan kriteria-kriteria perumusan diatas jelas kiranya desentralisasi yaitu penyerahan urusan pemerintah pusat / daerah tingkat atas kepada daerah yang menjadi urusan rumah tangganya. Urusan-urusan pemerintah telah diserahkan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan azas desentralisasi, pada dasarnya menjadi wewenang dan tanggung jawab daerah sepenuhnya. Dalam hal ini prakarsa sepenuhnya diserahkan kepada daerah yang menyangkut penentuan kebijaksanaan, perencanaan, pelaksanaan, maupun menyangkut segi-segi pembiayaannya.

Sementara itu menurut Pontjowinoto (1991 : 41) desentralisasi perencanaan dan pengelolaan pembangunan perlu di dukung oleh kebijakan penyerahan sumber keuangan yang memadai. Kebijakan ini tidak hanya mencakup besarnya dana yang dialokasikan kepada daerah, tetapi terlebih lagi dibutuhkan pelimpahan kewenangan kepada daerah untuk menggunakan dana tersebut sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah.

Salah satu aspek utama yang harus ditegakkan oleh pemerintah pusat adalah aspek otonomi pembiayaan pembangunan daerah (desentralisasi fiskal) kepada pemerintah daerah (Basri , 1995 : 112). Dalam hal ini pemerintah daerah harus diberi kewenangan yang luas , nyata, dan bertanggung jawab di daerah secara proposional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya manusia yang berkeadilan serta perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah (Tunggal , 1999: 24).

Menurut Bird (2000 : 4), ada tiga variasi desentralisasi fiskal dalam kaitannya dengan derajat kemandirian pengambilan keputusan daerah :

Pertama, desentralisasi berarti pelepasan tanggung jawab yang berada dalam lingkungan pemerintah pusat ke instansi vertikal di daerah atau pemerintah daerah; *kedua*, delegasi berhubungan suatu situasi, yaitu daerah bertindak sebagai perwakilan pemerintah untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu atas nama pemerintah; *ketiga*, devolusi (pelimpahan) berhubungan dengan suatu situasi yang bukan saja implementasi tetapi juga kewenangan untuk memutuskan apa yang perlu dikerjakan, berada di daerah.

Berdasarkan hal diatas desentralisasi fiskal sendiri dapat diartikan sebagai pelimpahan kewenangan di bidang penerimaan yang sebelumnya tersentralisasi baik secara administrasi dan pemanfaatannya diatur atau dilakukan pemerintah pusat (Elmi, 2002 : 26). Dengan terjadinya pelimpahan sebagian kewenangan terhadap sumber-sumber penerimaan negara kepada pemerintahan di daerah, diharapkan daerah-daerah akan mampu melaksanakan tugas-tugas rutin, pelayanan publik dan meningkatkan investasi yang produktif di daerahnya.

Oleh karena itu salah satu makna dari desentralisasi fiskal dalam bentuk pemberian otonomi di bidang keuangan (sebagian sumber penerimaan) kepada daerah-daerah merupakan suatu proses untuk mengintensifikan peranan sekaligus pemberdayaan daerah dalam pembangunan.

Di negara-negara berkembang untuk menuju proses keberhasilan desentralisasi, maka dipertegas dengan pemberlakuan persyaratan-persyaratan yang ketat. Secara khusus, perlu diwaspadai bahwa desentralisasi bisa gagal memperbaiki pelayanan daerah, dan juga dapat mengganggu stabilitas nasional. Hal itu terjadi karena desentralisasi tanpa disertai langkah-langkah yang memadai dalam stabilitas mobilisasi dana yang mencukupi bagi daerah.

Menurut Bird (2000 : 16), berdasarkan pengalaman dari berbagai situasi mengisyaratkan adanya dua persyaratan yang kelihatannya sangat penting untuk kesuksesan desentralisasi, terlepas dari keseimbangan makro atau efisiensi mikro, yaitu :

Pertama, proses pengambilan keputusan di daerah harus demokratis, yaitu pengambilan keputusan di daerah harus demokratis, yaitu pengambilan keputusan tentang manfaat dan biayanya harus transparan dan pihak-pihak yang terkait memiliki kesempatan untuk mempengaruhi keputusan-

keputusan tersebut ; *kedua*, yang lebih sesuai dengan rancangan kebijakan –biaya-biaya dari keputusan yang diambil, sepenuhnya di tanggung oleh masyarakat setempat. Untuk itu seharusnya tidak perlu terjadi “ekspor pajak” dan tidak ada tambahan transfer dari jenjang pemerintahan yang lain. Maksudnya, pemerintah daerah perlu memiliki kontrol atas tarif dan obyek pajak di daerah.

Berdasarkan hal diatas dalam pelaksanaan otonomi daerah paling tidak terdapat empat elemen dasar yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, keempat elemen tersebut menurut Cheema dan Rondinelli dalam Wulandari (2001:18) adalah desentralisasi politik, , desentralisasi fiskal, desentralisasi administratif, dan desentralisasi ekonomi. Keempat elemen tersebut menjadi kewajiban daerah untuk mengelolanya secara efisien dan efektif sehingga dengan demikian tercapai kemandirian daerah untuk melaksanakan fungsi-fungsinya dengan baik. Salah satu elemen yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tersebut adalah desentralisasi fiskal (*fiscal decentralitation*) yang merupakan komponen utama dari desentralisasi. Apabila pemerintah daerah melaksanakan fungsinya secara efektif, maka harus didukung sumber-sumber keuangan yang memadai baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), bagi hasil pajak dan bukan pajak, maupun dari subsidi / bantuan dari pemerintah pusat. Agar desentralisasi memberikan hasil-hasil yang efesien adalah dengan pemberlakuan anggaran berimbang yang tetap dalam kaitannya dengan fungsi-fungsi yang didelegasikan di daerah agar akuntabilitas dapat dijamin dan juga didukung peraturan perundang -undangan.

1.4.1.2 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah melalui penyediaan sumber-sumber berdasarkan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan, perlu diatur perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan daerah berupa sistem keuangan yang diatur berdasarkan pembagian kewenangan, tugas, dan tanggung jawab yang jelas antara pemerintah.

Permasalahan keuangan daerah berkisar pada usaha untuk menggali potensi-potensi pada keuangan yang ada pada daerah se-efektif mungkin dalam batas menurut peraturan perundang–undangan yang berlaku, menyatakan bahwa penggalan potensi keuangan daerah untuk mencukupi semua kebutuhan

pemerintah Daerah dilandasi pada prinsip orientasi yang seluas-luasnya dalam pelaksanaannya (Prawiraamidjaja 1974 ; 127)

Persoalan utama keuangan daerah adalah berkaitan dengan alokasi sumber – sumber keuangan antara pusat dan daerah. Oleh karena itu, dalam menentukan kebijakan keuangan daerah tidak terlepas dari pola hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah.

Pada dasarnya hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah menyangkut pembagian dana. Hubungan ini menurut Davey (1988 : 179) adalah suatu pembagian tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu. Pembagian tanggung jawab ini juga mengisyaratkan adanya pembagian sumber penerimaan untuk menutup pengeluaran yang ada akibat kegiatan tersebut.

Tujuan utama hubungan ini adalah mencapai perimbangan agar potensi dan sumber daya masing-masing daerah dapat sesuai. Implementasi dari tujuan ini adalah adanya pemberian hak mengambil keputusan dan mengenai anggaran belanja bagi pemerintah daerah, bagaimana memperoleh dan membelanjakannya yang merupakan urusan penting dalam menjalankan pemerintahan.

Menurut Kuncoro (1995 : 9) pengaturan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah didasarkan atas empat prinsip, yaitu :

1. Urusan yang merupakan tugas pemerintah pusat di daerah dalam rangka dekonsentrasi dibiayai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN)
2. Urusan yang merupakan tugas pemerintah daerah sendiri dalam rangka desentralisasi dibiayai dan atas beban APBD
3. Urusan yang merupakan tugas pembantuan dibiayai oleh pemerintah pusat atas beban APBN atau oleh pemerintah daerah tingkat atasnya atas beban APBD-nya sebagai pihak yang menugaskan
4. Sepanjang potensi sumber-sumber keuangan daerah belum mencukupi maka pemerintah memberikan sumbangan.

Hubungan keuangan pusat dan daerah mencerminkan tujuan politik yang mendasar sekali karena perannya dalam menentukan bobot kekuasaan yang dijalankan Pemerintah daerah dalam keseluruhan sistem pemerintahan (Devas, 1989 :179). Hubungan ini juga harus dapat menunjukkan pada pola hubungan keuangan antar berbagai tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi terhadap tingkat pemerintahan yang lebih rendah (Suparmoko , 1990 :306)

Hubungan keuangan antar pemerintah pusat dan daerah dapat dilakukan berdasarkan (Davey, 1988 : 164) :

1. Pendekatan kapitalis yaitu pendekatan yang dilaksanakan berdasarkan atas kuasi komersial dimana pemerintah pusat mengadakan investasi modalnya di daerah dan daerah pemerintah daerah sebagai pengelolannya dengan pembagian keuntungan sebagian untuk pemerintah pusat dan sebagian untuk pemerintah daerah berdasarkan peraturan yang berlaku.
2. Pendekatan sumber pendapatan yaitu pemberian sumber-sumber pendapatan oleh pemerintah pusat kepada daerah melalui pemberian wewenang pada daerah untuk menikmati sebagian pungutan yang dilakukan oleh atau atas nama pusat
3. Pendekatan belanja yaitu pendekatan yang mendasarkan diri pada kebutuhan pengeluaran biaya-biaya untuk suatu proyek atau bidang kegiatan tertentu bagi pemerintah daerah
4. Pendekatan komprehensif yaitu pemberian wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber pendapatan sendiri untuk membiayai pengeluarannya dan mencoba untuk mempertemukan antara sumber-sumber pendapatan dengan target pengeluarannya.

Ada 4 hal yang perlu diperhatikan dalam suatu hubungan pusat dan daerah, yaitu harus menjamin adanya (Davey, 1988 : 22) :

1. Suatu pembagian kekuasaan yang rasional tingkat-tingkat pemerintah dalam memungut dan membelanjakan sumber dana pembangunan, yaitu pembagian yang sesuai dengan pola umum desentralisasi.
2. Suatu pembagian yang memadai dari sumber-sumber dan keseluruhan yang intinya membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi, penyediaan pelayanan pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah
3. Pembagian yang adil diantara daerah-daerah atas pengeluaran pemerintah, atau sekurang-kurangnya ada perkembangan yang memang diusahakan ke arah itu.
4. Suatu upaya perpajakan di dalam memungut pajak dan retribusi oleh pemerintah daerah yang sesuai dengan pembagian yang adil atas beban keseluruhan dari pengeluaran dalam masyarakat.

Devas (1989 : 179) menyatakan bahwa tujuan utama hubungan keuangan pusat dan daerah adalah mencapai perimbangan antar berbagai pembagian, bagaimana agar potensi dan sumber daya masing-masing daerah dapat sesuai. Menurut Talaohu (1998 : 68) :

“perimbangan keuangan adalah pengaturan atau penyerahan sumber-sumber keuangan oleh pemerintah pusat kepada daerah dengan jelas dan

pasti secara berimbang berasaskan keadilan yang distributif dengan mempertimbangkan faktor-faktor kepentingan daerah dan masyarakat secara proposional melalui persentasi tertentu”.

Dalam kaitannya dengan perimbangan keuangan, kesenjangan pendapatan antara pemerintah pusat dan daerah semestinya dieliminir sampai pada tingkat serendah mungkin yang tidak akan memberikan peluang untuk timbulnya benih-benih pembawa keretakan persatuan dan kesatuan bangsa.

Kebijakan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah merupakan sistem pembagian sumber-sumber penerimaan antar kekuasaan pada berbagai tingkatan. Perimbangan keuangan antara pusat dan daerah ini penting keberadaannya untuk melakukan pemberdayaan dan menciptakan keseimbangan keuangan pada berbagai daerah tingkat II yang ada, sehingga daerah tingkat II memiliki kemampuan yang lebih besar dalam mengurus rumah tangganya sendiri secara mandiri. Dengan kata lain, kebijakan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah merupakan suatu sistem pengaturan sumber-sumber penerimaan daerah.

1.4.1.3. Kebijakan Keuangan daerah

Kebijakan Pengembangan Keuangan daerah (*local finance*) pada prinsipnya mencakup dua dimensi penataan anggaran sektor publik, yaitu penataan aspek pendapatan (*revenue side*) dan aspek pengeluaran (*expenditure side*), seperti yang tercermin dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Menurut Pontjowinoto (1991 : 32) kebijakan keuangan mencakup berbagai aspek seperti :

1. Pembiayaan dalam rangka desentralisasi, dekonsentrasi dan azas pembantuan
2. Sumber-sumber pendapatan daerah, baik yang bersumber dari mobilisasi PAD maupun dalam bentuk subsidi dan bantuan serta pinjaman.
3. Pengelolaan keuangan daerah dan peningkatan kemampuan paratur daerah dalam mengelola keuangan dan pendapatan daerah

Dalam kaitan dengan peningkatan pendapatan khususnya PAD, maka kebijakan yang perlu ditempuh menurut Kamaluddin (1984 : 85) dan Lains (

1985 : 55) adalah dalam bentuk intensifikasi dan Ekstensifikasi pemungutan sehingga diharapkan Pendapatan Asli Daerah akan dapat lebih berperan.

Kebijakan dan usaha intensifikasi adalah berupa peningkatan pendapatan asli daerah dari sumber-sumber yang telah berjalan selama ini sedangkan kebijakan dan usaha ekstensifikasi dalam pemungutan ini adalah berupa mencari dan menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang baru dalam batas ketentuan perundang – undangan. Proses intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber akan sangat tergantung pada aparat pemerintah daerah untuk mampu mengkoordinasikan lembaga-lembaga penghasil sumber PAD dan kreatifitas aparatur tentunya sangat ditentukan oleh kualitas aparatur.

Menurut Radianto (1997 : 41), dalam melaksanakan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab dan dinamis diterbitkan lima kebijakan pokok bidang keuangan daerah :

1. Kebijakan untuk meningkat PAD, khususnya yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah, selain meningkatkan penerimaan bagi hasil pajak secara optimal, subsidi dan bantuan , serta pinjaman keppada pemerintah daerah dan BUMD sehingga pemda mamapu mengelola dan menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah.
2. Kebijaksanaan di bidang pengeluaran pemerintah daerah pada dasarnya diarahkan untuk menciptakan peningkatan perekonomian masyarakat yag lebih baik, memperluas lapangan kerja, mendorong usaha pemerataan mendorong sektor swasta, membantu pengusaha lemah serta meningkatkan produksi komoditas ekspor dan pariwisata.
3. Peningkatan kemampuan organisasi pemerintahan daerah termasuk peningkatan kemampuan manajemen dan penyempurnaan struktur organisasi.
4. Peningkatan sistem informasi keuangan daerah dan pengendalian pembangunan daerah.
5. Kebijaksanaan untuk mendorong keikutsetaan swasta dalam pelayanan masyarakat di daerah, baik sebagai penanam modal maupun sebagai pengelola jasa pelayanan masyarakat.

Kebijakan keuangan menurut pendapat Tambunan (1996:51) adalah sebagai berikut :

- “ Kebijaksanaan dibidang keuangan daerah meliputi tiga bidang ; 1) Kebijaksanaan di bidang penggalian dan peningkatan sumber, 2) Kebijaksanaan di bidang pembiayaan dan kegiatan pemerintah daerah,dan 3) Kebijaksanaan di bidang pengembangan kegiatan intitusi dan pengelolaan (manajemen Keuangan).

Menurut Mardiasmo (2002 : 104) secara garis besar, manajemen keuangan daerah dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu, manajemen penerimaan daerah dan manajemen pengeluaran daerah. Pengelolaan penerimaan daerah harus dapat dilakukan secara cermat, tepat dan hati-hati. Penerimaan daerah perlu memperhatikan bahwa semua potensi penerimaan dapat terkumpul dan dicatat dalam sistem akuntansi pemerintahan daerah.

Salah satu upaya dalam melaksanakan manajemen keuangan menurut pendapat Mardiasmo (2002:145) sebagai berikut:

“ Manajemen Keuangan bisa dilakukan dengan penyederhanaan prosedur administrasi, namun ditingkatkan prosedur pengendalian. Penyederhanaan prosedur ini dimaksudkan untuk kemudahan pelayanan misalnya untuk meningkatkan sumber pajak daerah dan retribusi daerah maka di beri kemudahan dalam pembayarannya.”

1.4.2 Konsep Pendapatan Asli Daerah

Keuangan daerah menurut kajian sebagai alat fiskal pemerintah daerah, merupakan bagian integral dari keuangan negara dalam mengalokasikan sumber-sumber ekonomi, pemeratakan hasil pembangunan , dan menciptakan stabilitas ekonomi selain stabilitas sosial politik. Peranan keuangan daerah makin penting, selain karena keterbatasan dana yang dapat dialihkan kedaerah berupa subsidi dan bantuan, tetapi karena juga kompleksitasnya persoalan yang dihadapi daerah dan pemecahannya membutuhkan partisipasi aktif masyarakat daerah. Selain itu, peranan keuangan daerah yang makin meningkat akan mendorong terwujudnya otonomi daerah yang lebih nyata dan bertanggung jawab.

Ciri Utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerah artinya , daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, sehingga pendapatan asli daerah (PAD) harus menjadi sumber keuangan yang terbesar, yang didukung oleh kebijakan Perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai prasarat mendasar dalam sistem pemerintahan negara (Koswara, 2000 : 21)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan daerah, dan lain-lain usaha daerah yang sah. PAD merupakan sumber pendapatan yang benar-benar diperoleh dan dipergunakan oleh daerah untuk membiayai penyelenggaraan otonomi daerah. Semakin besar penerimaan PAD berarti pula bahwa kemampuan dalam melaksanakan pembangunan akan lebih baik, dan semakin tinggi kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah, maka dikatakan daerah itu semakin mandiri.

Selama ini peranan PAD dalam struktur penerimaan daerah, baik untuk daerah tingkat I maupun daerah tingkat II relatif masih kecil. Presentasi terbesar dalam penerimaan daerah masih terdapat pada sumbangan dari pemerintah pusat. Struktur penerimaan daerah yang demikian tersebut belum mencerminkan kemandirian daerah dalam membiayai kegiatan-kegiatan pemerintahan dan pembangunannya. Prinsip otonomi daerah yang lebih menekankan pada pengelolaan Daerah secara mandiri harus menempatkan PAD pada posisi yang sangat strategis dalam struktur penerimaan daerah. Fakta memperlihatkan belum dioptimalkannya PAD sebagai sumber penerimaan daerah yang utama.

Dalam Mahi (2000: 58) disebutkan sebab –sebab PAD belum dimanfaatkan oleh daerah sebagai sumber pembiayaan otonomi daerah , yakni :

1. Relatif rendahnya basis pajak dan retribusi daerah
2. Berdasarkan UU No 18 th 1997, beberapa pajak / retribusi yang ditetapkan untuk daerah memiliki basis pungutan yang relatif kecil, dan sifatnya bervariasi antar daerah. Beberapa daerah pariwisata menikmati penerimaan PAD yang terbesar karena aktivitas hotel dan restoran, demikian pula daerah yang memiliki aktivitas bisnis yang luas (industri dan jasa), serta yang memiliki banyak kendaraan bermotor. Berbeda halnya dengan daerah terpencil, ataupun daerah yang sangat luas basis pertaniannya, relatif hanya sedikit PAD yang terderivasi dari aktivitas ini. Sempitnya basis pajak ini bagi sementara daerah berarti memperkecil manuver keuangan daerah dalam menghadapi goncangan ekonomi seperti krisis ekonomi.
3. Perannya yang tergolong kecil dalam total penerimaan daerah. Sebagian besar penerimaan daerah masih berasal dari bantuan pusat. Dari segi upaya pemungutan pajak , banyak bantuan dan subsidi ini mempengaruhi “ usaha “ daerah dalam memungut PAD-nya, dan lebih mengandalkan kemampuan “ negosiasi “ daerah terhadap pusat untuk mendapatkan tambahan bantuan.

4. Kemampuan Administrasi pemungutan di daerah yang masih rendah. Hal ini mengakibatkan bahwa pemungutan pajak masih dibebani oleh biaya pemungutan yang besar. PAD masih tergolong memiliki tingkat *buycancy* yang rendah. Salah satu sebabnya adalah tidak ditetapkannya sistem “ target “ dalam pungutan daerah. Sebagai akibatnya, beberapa daerah lebih condong memenuhi target tersebut, walaupun dari sisi pertumbuhan ekonomi sebenarnya pemasukan pajak / retribusi daerah dapat melampaui target yang ditentukan.
5. Kemampuan perencanaan dan pengawasan yang lemah
Hal ini mengakibatkan penerimaan daerah mengalami kebocoran-kebocoran yang sangat berarti bagi daerah.

Mengingat PAD memiliki posisi yang sangat strategis dalam struktur penerimaan daerah maka diperlukan pengeloaan dan pengembangan sumber-sumber keuangan bagi peningkatan PAD bagi pelaksanaan otonomi daerah. Tanpa optimalisasi PAD pelaksanaan otonomi daerah akan sulit dilaksanakan.

Pemerintah mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, memerlukan sumber pembiayaan dalam bentuk uang yang tidak sedikit jumlahnya, untuk menutup pengeluaran dan memenuhi kebutuhan pemerintah daerah dengan menggali sumber-sumber PAD sendiri sesuai dengan potensi dan kemampuan masyarakat setempat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendapatan daerah merupakan salah satu faktor penting dalam mengukur secara nyata kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi. Pendapatan daerah menyangkut upaya mendapatkan uang maupun membelanjakannya sehingga masalah yang timbul dalam keuangan daerah adalah bagaimana sumber keuangan itu dapat digali dan didistribusikan.

Menurut Mac Andrews (1995 : 118) mengartikan PAD adalah sebagai proporsi pendapatan propinsi dan kabupaten yang dapat diperoleh sumber-sumber diluar dari pemerintah atasnya. Sementara Kaho (1997 : 26) membagi pendapatan asli daerah dalam 1) Hasil pajak daerah, 2) hasil retribusi daerah, 3) pendapatan dinas daerah , dan 4) lain-lain usaha daerah yang sah.

Selanjutnya akan diuraikan mengenai pengertian pajak daerah, retribusi daerah , perusahaan daerah, penerimaan dinas-dinas dan penerimaan lainnya sebagai berikut.

1.4.2.1 Konsep Pajak Daerah (XI)

Pajak daerah secara teori dikehendaki dapat memenuhi beberapa persyaratan diantaranya pajak daerah tidak boleh bertentangan atau harus searah dengan kebijaksanaan pemerintah pusat. Pajak daerah harus sederhana dan tidak terlalu banyak jenisnya, biaya administrasi harus rendah, pajak daerah tidak mencampuri sistem perpajakan pusat. Pajak sebagai salah satu sumber PAD, pajak merupakan iuran wajib berupa uang atau benda yang dipungut pemerintah berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum (Kaho, 1997 : 129)

Pengertian pajak daerah sendiri, menurut Sumitro (1979 : 29) adalah pajak lokal atau pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh daerah-daerah swatantra, seperti propinsi, kotapraja, kabupaten, dan sebagainya. Sedang Davey (1988 : 39) merumuskan pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dengan pengaturan dari daerah sendiri.

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak daerah adalah pajak negara yang diserahkan kepada daerah untuk dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik.

Jenis pajak daerah tingkat II terdiri dari : a) Pajak hotel dan restoran ; b) Pajak hiburan ; c) Pajak reklame; c) Pajak penerangan jalan; d) pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan c ; dan f) pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.

Dengan peraturan pemerintah dapat ditetapkan jenis pajak selain yang ditetapkan diatas. Pada ayat 1) dan ayat 2) yang memenuhi kriteria sebagai berikut : a) bersifat sebagai pajak dan bukan retribusi; b) obyek dan pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum; c) potensinya memadai; d) tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif; e) memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat ; dan f) menjaga kelestarian lingkungan.

Pajak ditetapkan dengan peraturan daerah. Peraturan daerah tentang pajak tidak dapat berlaku surut. Peraturan daerah tentang pajak sekurang-kurangnya mengatur ketentuan mengenai : a) nama, obyek dan subyek pajak; b) dasar

pengenaan tarif, dan cara perhitungan pajak; c) wilayah pemungutan; d) masa pajak; e) penetapan; f) tata cara pembayaran dan penagihan; g) kadaluarsa; h) sanksi administrasi; dan i) mulai berlakunya.

Peraturan daerah tentang pajak dapat mengatur tentang : a) pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak dan sanksinya ; b) tata cara penghapusan piutang pajak yang kadaluarsa; dan c) asas imbal balik.

1.4.2.2 Konsep Restribusi Daerah (X2)

Restribusi menurut Feldman (dalam Nurpratiwi, 1997 : 59) merupakan penerimaan yang diperoleh penguasa publik dari rumah tangga swasta, berdasarkan norma-norma umum yang ditetapkan, berhubungan dengan prestasi-prestasi yang diselenggarakannya atas usul dan kepentingan rumah tangga swasta dan prestasi tersebut karena berhubungan dengan kepentingan umum, secara khusus dilaksanakan sendiri oleh pengawas publik.

Selanjutnya Bawazier (1996 : 15) memberikan pengertian retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai imbalan atas pemakaian atau manfaat yang diperoleh secara langsung oleh seseorang atau badan atas jasa pelayanan, pekerjaan, pemakaian, barang atau izin yang diberikan oleh pemerintah.

Dari pengertian ini maka retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial, hal ini tergantung dengan besar kecilnya jasa layanan yang diberikan oleh daerah yang bersangkutan.

Secara konseptual, terdapat berbagai pendapat pro dan kontra atas perlu atau tidaknya penyediaan suatu barang dan jasa di beri retribusi. Mengenai hal ini dapat ditarik kesimpulan tentang perlu tidaknya retribusi itu ditarik adalah bahwa penyediaan barang/ jasa yang dibiayai dari pajak atau retribusi tergantung dari pada " derajat kemanfaatan " suatu barang dan jasa itu sendiri. J.R. Kaho (1997 : 158) berpendapat bahwa retribusi merupakan sektor sumber utama, tingginya pendapatan daerah dari sektor retribusi antara lain disebabkan karena hampir semua retribusi dapat dipungut.

Lebih lanjut dijelaskan oleh Redjo (1995 : 17) pada prinsipnya kemanfaatan dalam penarikan retribusi, maka mereka yang tidak mendapatkan

manfaat dari penyediaan barang/ jasa tidak harus membayar. Sebaliknya mereka yang tidak membayar dapat dikecualikan dari mengkonsumsi barang dan jasa tersebut. Obyek retribusi terdiri dari : a) Jasa Umum; b) Jasa Usaha; c) Perizinan tertentu. Retribusi dibagi dalam tiga golongan : a) retribusi jasa umum; b) retribusi jasa usaha ; c) retribusi perizinan tertentu. Besarnya retribusi yang terhutang dihitung berdasarkan : a) tingkat penggunaan jasa; dan b) tarif retribusi.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif ditentukan sebagai berikut :

1. Untuk retribusi jasa umum, ditetapkan berdasarkan kebijaksanaan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.
2. Untuk retribusi Jasa Usaha , didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak
3. Untuk retribusi perizinan tertentu, didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian ijin yang bersangkutan

1.4.3 Konsep Kemandirian Fiskal Daerah (Y)

Thoha (1985 : 27) menyatakan ada empat hal penting untuk menilai suatu daerah dapat mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri :

1. Adanya urusan-urusan yang diberikan oleh pemerintah atasannya.
2. Pengaturan dan pengurusan itu dilakukan atas inisiatif dan kebijaksanaan sendiri
3. Untuk mengatur urusan tersebut diperlukan perlengkapan atau aparatur sendiri
4. Untuk membiayai urusan yang diserahkan itu diperlukan sumber keuangan sendiri.

Dengan demikian otonomi daerah terjadi bila pemerintah yang lebih atas memberikan atau menyerahkan sebagian urusan rumahtangganya kepada pemerintah di bawahnya. Sebaliknya pemerintah bawahan yang akan menerima sebagian urusan tersebut telah mampu melaksanakan urusan tersebut. Kekuatan atau kemampuan daerah untuk melaksanakan urusan yang diserahkan, merupakan pertimbangan yang pokok supaya pemberian otonomi dalam arti penyerahan urusan rumah tangganya sendiri tersebut tidak menjadi beban dan melemahkan suatu daerah. Semakin suatu daerah memiliki kekuatan atau kemampuan yang

tinggi, maka otonomi juga akan semakin kuat, atau sebaliknya. Hal ini dapat pula diartikan bahwa semakin daerah memiliki kemampuan yang tinggi, maka semakin banyak urusan yang diserahkan oleh pemerintah atasannya. Inilah sesungguhnya arti otonomi yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab.

Menurut Dirjen Pemerintahan Umum dan otonomi Daerah yang dikutip oleh Marzuki Nyakman dan M. Ryaaas Rasyid (dalam Widjaja, 1992 : 107) ada lima Variabel sebagai faktor untuk mengukur daerah untuk berotonomi yaitu :

1. Kemampuan keuangan daerah, nilainya ditentukan oleh berapa besar peranan PAD terhadap jumlah (total) pembiayaan daerah
2. Mengangkut kemampuan aparatur berapa rasio jumlah pegawai terhadap jumlah penduduk, masa kerja pegawai, golongan pegawai, pendidikan formal dan pendidikan fungsional aparat.
3. Partisipasi masyarakat, bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa yang menyangkut kesehatan dan pelayanan sosial.
4. Variabel ekonomi di daerah dengan mengukur indikator seper nilai rata-rata pendapatan perkapita dalam lima tahun terakhir, berapa persentase (%) sektor-sektor pertanian pertambangan dan pemerintahan terhadap PDRB.
5. Variabel Demografi, indikasinya berapa pendapatan penduduk pertumbuhan penduduk, jumlah penduduk yang buta aksara, rasio ketergantungan, tempat pendidikan penduduk, usia muda, pendidikan yang diutamakan dan tersedianya lapangan kerja.

Menurut Kaho (1991) penyelenggaraan pemerintah daerah dengan sistem otonomi memiliki bebera konsekuensi yang harus dipersiapkan seperti : *pertama*, kesiapan sumberdaya manusia aparatur; *kedua*, kesiapan dari sisi keuangan daerah; *ketiga* kesiapan sarana dan prasarana yang memadai; keempat kesiapan organisasi dan manajemen dalam pemerintahan daerah.

Untuk lebih menjelaskan hal diatas maka akan digunakan pendekatan sebagaimana yang dituangkan dalam gambar sebagai berikut :

Gambar 1 : Indikator yang mempengaruhi kesiapan untuk melaksanakan otonomi daerah



Sumber : Maloo Kii dan Kameo (2001)

Dari pendapat dan gambaran tersebut diatas faktor yang paling jelas untuk mengukur kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri atau daerah mampu berotonomi adalah dari faktor kemampuan keuangan dengan tanpa mengesampingkan faktor lain .

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Kaho (1991: 123) sebagai berikut :

“Salah satu kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri adalah kemampuan *self-supporting* dalam bidang keuangan. Dengan kata lain faktor keuangan merupakan faktor esensial dalam mengukur tingkat (kemandirian) daerah dalam melaksanakan otonominya “.

Penyelenggaraan otonomi daerah yang sehat hanya bisa dicapai apabila sumber utama keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan kebutuhan rutin pemerintah daerah berasal dari pendapatan daerah. Oleh karena itu kemandirian fiskal daerah merupakan aspek yang penting dari otonomi daerah secara keseluruhan untuk mendorong kemampuan pemerintah daerah dalam mengatur dan mengurus rumahtangganya secara mandiri.

Booth (1993 : 132) menyatakan kemandirian fiskal daerah tidak akan menjadi kenyataan kalau pusat menguasai sebagian besar dana, sebaliknya yang terjadi justru peningkatan ketergantungan anggaran daerah kepada pusat, untuk maksud ini maka dipandang perlu mendorong pemerintah daerah agar lebih keras berupaya meningkatkan pendapatan.

Kemandirian suatu daerah, tidak berarti setiap daerah harus mampu membiayai seluruh pengeluarannya (rutin maupun pembangunan) dari PAD, namun kemandirian daerah dalam pembiayaan setidaknya pengeluaran rutin dengan PAD tetap merupakan suatu usaha yang harus ditingkatkan,. menurut Pontjowinoto (1991 :33) ditinjau dari sudut kebijakan (*discretion*) dalam penggunaan dana PAD merupakan sumber pembangunan yang paling memberikan otonomi kepada daerah.

Karena itu otonomi daerah ini biasanya diwujudkan apabila disertai otonomi keuangan yang efektif. Ini berarti bahwa pemerintah daerah secara finansial harus bersifat independen terhadap pemerintah pusat dengan jalan sebanyak mungkin menggali sumber-sumber PAD seperti pajak dan restribusi (Radianto, 1997 : 42).

Sebagaimana dikemukakan oleh Devas (1989 : 46), pemerintah daerah tidak harus berdiri sendiri dari segi keuangan agar dapat memiliki otonomi yang berarti. Yang penting adalah "wewenang ditepi", artinya memiliki penerimaan daerah sendiri yang cukup sehingga dapat mengadakan perubahan disana-sini pada tingkat pelayanan jasa yang disediakan, untuk itu mungkin sudah cukup memadai jika 20 % dari pengeluaran berasal dari sumber-sumber daerah.

Sedangkan Davey (1988 :182) berpendapat bahwa hubungan antara ketergantungan daerah atas dana pusat dengan keleluasaan daerah akan pengeluarannya adalah tidak langsung. Pandangan ini mengatakan bahwa yang penting dari bagi daerah otonom adalah keleluasaan (*discretionary power*) dalam menggunakan dana bagi kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan oleh undang-undang tanpa melihat pada asal dana tersebut.

Menurut Santoso (19995 : 20), meskipun PAD harus dapat membiayai seluruh anggaran belanja daerah, namun proporsi PAD terhadap total penerimaan daerah merupakan indikasi derajat kemandirian / kemampuan suatu daerah, sering juga disebut sebagai kemandirian fiskal (*fiscal independence*).

Sejalan dengan statemen diatas, menurut Wulandari (2001 : 21) kemandirian fiskal dapat dipelajari dengan melihat pada besarnya derajat desentralisasi fiskal suatu daerah. Menurut Kuncoro (1995 : 8) yang menyatakan bahwa indikator derajat desentralisasi fiskal adalah rasio antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total penerimaan daerah.

Berdasarkan hal diatas untuk mendefinisikan tingkatan kemandirian fiskal daerah (derajat desentralisasi fiskal) tim peneliti Fisipol UGM dalam (Wulandari, 2001 : 21) menggunakan skala interval sebagaimana terlihat dalam tabel sebagai berikut :

TABEL 4 SKALA INTERVAL DERAJAT DESENTRALISASI FISKAL DAERAH

Rasio PAD terhadap TPD (%)	Kriteria Kemandirian Fiskal Daerah
00,00-10,00	Sangat Kurang
10,01-20,00	Kurang
20,01-30,00	Cukup
30,01-40,00	Sedang
40,01-50,01	Baik
> 50,00	Sangat baik

Sumber : Wulandari, 2001

1.4.4 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Gambaran mengenai keuangan daerah tercermin dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Pada setiap tahun anggaran baik tingkat I dan tingkat II. Sumber penerimaan daerah tingkat II dalam APBD dirinci menjadi : 1) Pendapatan asli Daerah yang diperoleh dari pendapatan pajak daerah , restribusi daerah, bagian laba BUMD, penerimaan dinas-dinas, dan penerimaan lainnya ; 2) Bagi hasil pajak dan bukan pajak dari pemerintah pusat dan dati 1 ; 3) Sumbangan dan bantuan dari pemerintah pusat dan dati I; 4) Penerimaan pembangunan (pinjaman daerah) ; dan 5) sisa anggaran tahun sebelumnya.

Dari penerimaan dalam APBD sumber penerimaan yang belum dijelaskan pada uraian diatas adalah sumbangan / bantuan (*grant*). Sumbangan / subsidi pusat dan mekanisme penyalurannya menurut Kuncoro (1995:11) adalah sebagai berikut :

“ Subsidi/ transfer dana dari pusat kepada daerah melalui tiga jalur yaitu : pertama SDO (subsidi Daerah Otonom) yaitu transfer kepada pemerintah daerah untuk membiayai pengeluaran rutin seperti belanja pegawai negeri belanja non pegawai yang diarahkan, dan belanja non pegawai yang ditetapkan yaitu subsidi/ganjaran; kedua, program Inpres (dana non DIP) baik yang bersifat sektoral maupun umum yang digunakan untuk membantu pembangunan (propinsi, kabupaten / kota, desa), untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan, sekaligus sebagai upaya

untuk mengatasi ke tidak seimbangan struktur keuangan antar daerah; dan ketiga, DIP (pengeluaran sektoral) yang dialokasikan untuk membiayai proyek-proyek/pengeluaran pembangunan sebagai perwujudan dekonsentrasi. "

Sumbangan / bantuan (*grant*) secara umum dapat dibedakan menjadi dua : pertama, bantuan umum atau blok (*general grant / block grant / unconditional grant*), yaitu bantuan kepada pemerintah daerah yang tidak disertai dengan ikatan atau syarat tertentu dalam arti daerah mampu menggunakannya / mengalokasikannya kepada penggunaan yang dikehendaki oleh daerah yang bersangkutan. Kedua, bantuan khusus (*specific grant / conditional grant*), yaitu bantuan yang diberikan kepada daerah untuk menyediakan pelayanan atau jasa publik yang di berikan oleh pemerintah pusat.

Menurut UU No 25 /1999, penerimaan daerah pada dasarnya akan terdiri dari tiga hal besar sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang umumnya berasal dari pajak dan retribusi daerah
2. Dana perimbangan, yang terdiri dari atas dana alokasi umum (DAU) dan danan alokasi Khusus (DAK) dan dana bagi hasil (termasuk bagi hasil sumber daya alam)
3. Pinjaman daerah. (Mahi, 2000:54)

Sementara itu, yang dimaksud dengan Dana Alokasi Umum (DAU) tidak lain adalah dalam bentuk bantuan dana yang bersifat *block grant* Dimasa lalu *block grant*, seperti dana inpres dati I ,Inppres dati II. Sedangkan dana alokasi Khusus tidak lain adalah dana yang bersifat khusus seperti *specific grant* . Di masa lalu kita juga mengenal sebagai dana inpres SD, inpres kesehatan, dan bahkan Subsidi daerah Otonom (SDO). (Mahi, 2000:55).

Meskipun di UU no 25 / 1999 tidak dijelaskan secara rinci, tetapi tersirat bahwa bantuan DAU ini merupakan penggantian terhadap bantuan SDO dan bantuan INPRES umum yang telah diterima oleh daerah selama ini

Sejalan dengan upaya memperkuat otonomi daerah atau peningkatan Pendapatan asli Daerah (PAD), maka subsidi/ bantuan dari pemerintah pusat sesungguhnya hanya merupakan suatu instrumen yang yang dapat diharapkan memacu / mendorong (*stimulation*) peningkatan PAD tersebut, dan bukan sebaliknya. Hal ini ditekankan oleh Nurjaman Arsyad (dalam Radianto , 1997 :

44) bahwa hakekat bantuan/ subsidi adalah untuk memperkuat tingkat otonomi suatu daerah. Oleh sebab itu daerah mempunyai keleluasaan dalam menggunakan dana-dana bantuan yang ada sehingga mempunyai dampak positif terhadap peningkatan PAD. Dengan kata lain, adanya kebebasan dalam menggunakan subsidi dari pemerintah pusat menyebabkan betul-betul daerah memprioritaskan kegiatan yang bisa mendorong PAD-nya.

1.5 Hipotesis

Hipotesis adalah suatu pernyataan yang bersifat sementara dan merupakan suatu rumusan yang menyatakan harapan dari penulis tentang hubungan dua variabel dimana akan memberikan suatu kepastian terhadap dasar pemikiran yang telah dituangkan.

Adapun pengertian dari hipotesis menurut Surachmad (1990: 39) adalah sebagai berikut:

Hipotesis adalah sebuah kesimpulan, tetapi kesimpulan ini belum final dan harus dibuktikan kebenarannya. Jelasnya hipotesis merupakan suatu jawaban dugaan yang dianggap benar kemungkinannya untuk menjadi jawaban yang benar.

Sedangkan menurut Sugiyono (1999 ; 51) yang dimaksud dengan hipotesis adalah

“..jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Dikatakan sementara karena jawabannya baru berdasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis dapat dikatakan sebagai jawaban teoritis terhadap masalah penelitian, belum jawaban yang empiris.”

Berangkat dari landasan teori yang dikemukakan oleh penulis diatas, hipotesis yang dapat dirumuskan dan akan diuji kebenarannya berdasarkan permasalahan yang ada dan sedang dihadapi adalah :

“ Bahwa faktor hasil pajak daerah dan retribusi daerah secara bersama-sama di kabupaten Jember diduga mempunyai pengaruh yang bermakna terhadap kemandirian fiskal daerah di kabupaten Jember “.

Secara statistik, hipotesa yang telah dirumuskan diatas dapat ditulis sebagai berikut :

- a. Hipotesis Nol (H_0) : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan faktor hasil pajak daerah dan retribusi daerah terhadap kemandirian fiskal daerah Kabupaten Jember
- b. Hipotesis Kerja (H_1) : Terdapat pengaruh yang signifikan faktor hasil pajak daerah dan retribusi daerah terhadap kemandirian fiskal daerah Kabupaten Jember

1.6 Definisi Operasional

Berdasarkan pada rumusan dan hipotesis sebelumnya maka variabel yang akan ditarik dari penjabaran konsep diatas dan akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Variabel Bebas (Independent Variable) / (X), yaitu :
 - a. Hasil Pendapatan Pajak Daerah (X_1) , realisasi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah yang diukur dalam satuan moneter (rupiah) pertahun
 - b. Hasil Retribusi Daerah (X_2), realisasi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah yang diukur dalam satuan moneter (rupiah) pertahun
2. Variabel Terikat (Dependent Variable) / (Y), yaitu variabel kemandirian fiskal daerah yaitu kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan daerahnya dan dinyatakan dengan derajat desentralisasi fiskal yang menurut Kuncoro (1995 : 8) bahwa indikator derajat desentralisasi fiskal adalah rasio antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total penerimaan daerah, dalam satuan moneter (rupiah) pertahun

1.7 Model Penelitian

Model Penelitian ini merupakan abstraksi dari konsep yang disederhanakan, dimaksudkan agar penelitian mudah digambarkan secara menyeluruh (*Holistic*) tentang kemandirian fiskal daerah Kabupaten Jember dan juga menjelaskan tentang pengaruh sumber-sumber PAD terhadap kemandirian fiskal daerah

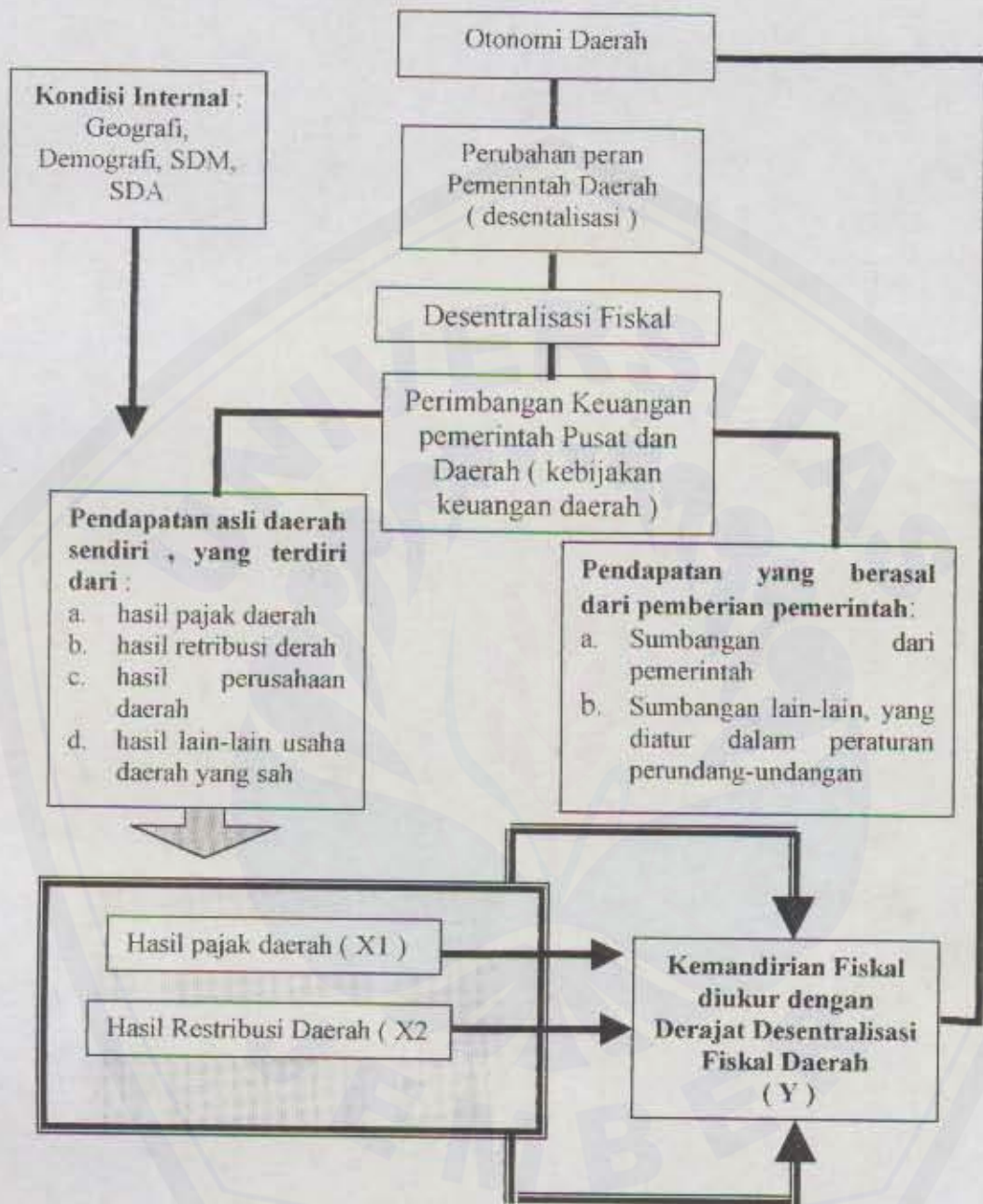
Sumber keuangan daerah sebagai mana yang digambarkan dalam APBD mengenai keuangan daerah sebagian besar masih berupa bantuan dari pemerintah pusat. Apabila hanya sebagian kecil yang merupakan PAD, ini jelas akan mengurangi sifat kemandirian pemerintah daerah di bidang keuangan. Tanpa ada bantuan dari pemerintah pusat argumentasinya pemerintah akan kesusahan dalam melaksanakan pembangunan daerah. Saat ini, arah yang ditempuh untuk mampu meningkatkan kemampuan daerah dalam bentuk peningkatan kepercayaan daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Sejalan dengan upaya memperkuat otonomi daerah dengan memperhatikan kemandirian fiskalnya melalui peningkatan PAD, maka keberadaan bantuan dari pemerintah pusat (*grant*) sesungguhnya merupakan suatu instrumen yang dapat memacu / mendorong peningkatan PAD tersebut, dan bukan sebaliknya. Menurut Arsyad (1990) dalam Radianto “ hakekat bantuan / subsidi adalah untuk memperkuat tingkat otonomi suatu daerah. Karena itu daerah perlu memiliki keleluasaan dalam menggunakan dana-dana bantuan yang ada sehingga mempunyai dampak positif terhadap peningkatan PAD “

Dari penjelasan diatas PAD merupakan pendapatan yang benar-benar diperoleh dan dipergunakan oleh daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. PAD menunjukkan kualitas suatu daerah. Dalam kemandiriannya untuk mengelola rumah tangganya sendiri semakin besar penerimaan PAD, berarti semakin meningkat kemandirian fiskal daerah, sehingga daerah dapat melaksanakan program pembangunan akan lebih baik . Atas dasar inilah maka perlu diketahui seberapa besar kemandirian fiskal daerah Kabupaten Jember dan seberapa besar faktor sumber-sumber/komponen PAD pajak daerah dan retribusi daerah pengaruhnya terhadap kemandirian fiskal.

Secara sederhana model penelitiannya dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2 Model Penelitian “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Fiskal Daerah”



Sumber : UU No 22 dan UU No 25 Tentang Pemerintah Daerah dan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

1.8 Metode Penelitian

Setiap penelitian pasti memerlukan metode yang akan dipakai untuk menentukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengalaman. Metode dapat pula digunakan untuk menerangkan gejala-gejala atau fenomena yang satu dengan dengan fenomena yang lain. Hasil dari suatu penelitian dapat diterima secara ilmiah apabila ia mempergunakan suatu metode penelitian secara ilmiah dan benar.

Menurut Koentjaraningrat (1990:16) yang dimaksud metode adalah, "Jalan atau cara sehubungan dengan upaya ilmiah maka metode ini menyangkut cara untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan."

Sedangkan penelitian menurut Hadi (1989: 4) adalah, "Penelitian atau research dapat diartikan usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah."

Menurut Sugiyono (1999: 1), Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu

Dengan demikian metode penelitian adalah cara kerja ilmiah yang harus ditempuh dan digunakan dalam penelitian dengan maksud untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu penelitian. Adapun metode penelitian meliputi :

1.8.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *penelitian eksplanatif*.

Menurut Sugiyono (1999: 10) penelitian eksplanatif adalah, " penelitian yang bermaksud menjelaskan kedudukan variabel yang diteliti serta hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain."

1.8. 2 Obyek Penelitian

Dalam penelitian ini obyek penelitiannya adalah berupa laporan keuangan tahunan tentang perkembangan PAD dan APBD Kabupaten Jember. Sedangkan periode waktu yang dipilih yang menjadi obyek penelitian adalah selama runtut

waktu (*time series*) delapan tahun terakhir tahun 1995/1996–tahun 2002. Pemilihan periodisasi waktu tersebut dengan pertimbangan :

- a. Faktor ketersediaan data
- b. Berdasarkan pada kenyataan bahwa semakin berkembangnya pembangunan Jember, sehingga dana dalam PAD secara khusus dan APBD secara umum semakin penting perannya dalam estimasi kemandirian fiskal daerah.

Penelitian ini memfokuskan pada beberapa data keuangan daerah berupa laporan tahunan, yaitu :

- a. Perkembangan data keuangan tahunan hasil penerimaan PAD Kabupaten Jember dalam runtut waktu (*time series*) (1995/1996-tahun 2002)
- b. Perkembangan data keuangan tahunan tentang realisasi kontribusi sumber-sumber PAD terhadap penerimaan PAD Kabupaten Jember dalam runtut waktu (*time series*) (1995/1996-tahun 2002)
- c. Perkembangan data keuangan tahunan tentang APBD daerah Kabupaten Jember dalam runtut waktu (*time series*) (1995/1996-tahun 2002)
- d. Perkembangan data keuangan tahunan tentang subsidi / bantuan Pemerintah pusat daerah Kabupaten Jember dalam runtut waktu (*time series*) (1995/1996- tahun 2002)

1.8.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Jember dimana daerah Jember adalah sebagai pusat pengembangan wilayah Jawa Timur bagian timur, dengan sumber daya alam yang cukup melimpah dan keberadaan beberapa Perguruan Tinggi sebagai mitra dalam mengkaji konsep-konsep pengembangan pembangunan daerah yang tepat, sehingga Kabupaten Jember memiliki peluang untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya.

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data skunder tentang laporan keuangan tahunan daerah runtut waktu (*time series*) 1995/1996 – tahun 2002. Data tersebut dapat diperoleh dan tercatat di berbagai instansi terkait di

wilayah Kabupaten Jember seperti, kantor Bappeda, Bagian Keuangan Setwilda, Dinas Pendapatan Daerah, dan BPS.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data diperlukan dalam rangka memperoleh data yang akurat dan reliabel untuk mendukung keberhasilan penelitian. Menurut Sugiyono (1999: 12) "pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber dan berbagai cara". Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Library Research

Data dikumpulkan melalui literatur yang berkaitan dengan bahasan pada penelitian. Literatur ini berupa buku, jurnal, majalah, dan juga dokumen – dokumen serta dari media internet yang dapat mendukung untuk pembahasan penelitian.

2. Field Research

Data dikumpulkan dengan mendatangi sumber data langsung yang berupa data skunder tentang laporan keuangan tahunan daerah runtut waktu (time series) 1995/1996- tahun 2002 di berbagai instansi terkait di wilayah Kabupaten Jember seperti, kantor Bappeda, Bagian Keuangan Setwilda, Dinas Pendapatan Daerah, dan BPS.

1.8.5 Teknik Analisis Data dan Uji Hipotesis

Analisis data dapat dilakukan melalui analisa kualitatif dan analisa kuantitatif sebagaimana yang dikemukakan oleh Koentjaraningrat (1997: 26) yaitu, "Sesungguhnya analisa data itu dibedakan menjadi dua macam yaitu kualitatif dan kuantitatif. Perbedaan ini tergantung pada sifat data yang dikumpulkan peneliti."

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa data statistik, yang menurut Hadi (1986:221) metode statistik adalah, "cara-cara ilmiah yang dipersiapkan untuk mengumpulkan, menyajikan dan menganalisa data penyelidikan yang berwujud angka-angka."

Setelah semua data terkumpul, kemudian dianalisa dengan menggunakan statistik parametrik, dengan menggunakan rumus yang sesuai.

$$DDFD = \frac{PAD}{TPD}$$

$$TPD = PAD + BHBP + SB$$

Dimana :

DDFD = Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah

PAD = Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD aktual)

BHBP = Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak

BG = Block Grant (subsidi / bantuan) yang diperoleh dari transfer pusat

TPD = Total Penerimaan Daerah

1.8.5.2 Analisa Inferensial

Analisa inferensial bertujuan untuk menguji pengaruh antara variabel bebas (*independen variable*) terhadap variabel terikat (*dependen variable*). Statistik Inferensial yang digunakan dalam analisis data menggunakan model persamaan Regresi Linier berganda yaitu persamaan regresi yang menghubungkan beberapa prediktor (Variabel Independen) dengan satu kriterium (variabel dependen). Adapun analisis statistik ini dipilih karena alasan sebagai berikut :

1. Menguji pengaruh simultan dari beberapa variabel independen terhadap variabel dependen
2. Menguji secara parsial untuk melihat dominasi pengaruh diantara variabel independen terhadap variabel dependen
3. Melakukan peramalan terhadap perubahan variabel prediktor (variabel independen) yang mempengaruhi perubahan variabel dependen, baik secara simultan maupun parsial.

Adapun model persamaan regresi linier berganda menurut Supranto (1995 : 22) sebagai berikut :

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + e$$

- Y** = Variabel dependen
X = Variabel independen
a = Intersep (konstanta)
b₁-b₃ = Koefisien regresi
e = Variabel Pengganggu

Dimana kalau nilai X_1 , X_2 , dan X_3 nilainya diketahui, maka nilai Y dapat diramalkan

1.8.6.3 Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis secara statistik melalui beberapa tahapan sebagai berikut :

A. Uji F, dimaksudkan untuk menguji signifikansi pengaruh variabel-variabel independen (X) secara keseluruhan terhadap variabel dependen (Y), dengan tahapan sebagai berikut :

1. Merumuskan Hipotesis

$H_0 : \beta_1 = 0$, berarti independen X_i secara keseluruhan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen Y

$H_0 : \beta_1 \neq 0$, berarti variabel independent X_i secara keseluruhan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen Y

2. Menentukan tingkat signifikansi

Tingkat signifikansi yang diharapkan adalah α 5 % atau *confidence interval* 95 %

3. Menentukan F hitung (F hit) dicari dengan rumus (Supranto, 1995 : 267)

$$F_{hitung} = \frac{R^2 / (k - 1)}{(1 - R^2) / (n - k)}$$

Membandingkan nilai F hitung dengan F tabel untuk menentukan apakah hipotesis nol diterima atau ditolak, dengan ketentuan sbb :

$F_{hit} < F_{tab}$ berarti H_0 diterima dan H_1 ditolak

$F_{hit} > F_{tab}$ berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima

B. Uji t

Uji t, digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh parsial variabel-variabel independen (X) secara keseluruhan terhadap variabel dependen.

Tahapan dalam uji t adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan Hipotesis

$H_0 : \beta_1 = 0$, berarti masing – masing variabel independent X_i tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen Y

$H_0 : \beta_1 \neq 0$, berarti masing –masing variabel independent X_i mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen Y

2. Menentukan tingkat signifikansi

Tingkat signifikansi yang diharapkan adalah 5 % atau confidence interval 95 % dan degree of freedom atau $df (n-k-1)$ dimana k merupakan jumlah variabel independen atau regresor.

3. Menentukan nilai t hitung

4. Membandingkan nilai t hitung dengan t tabel

$t_{hit} < t_{tab}$ berarti H_0 diterima H_1 ditolak

$t_{hit} > t_{tab}$ berarti H_0 ditolak H_1 diterima

C. Uji r^2 (Koefisien Determinasi Sampel)

Penentuan Variabel Independen yang paling berpengaruh terhadap variabel dependen. Hal ini dapat diketahui dengan melihat seberapa besar r^2 suatu variabel bebas, dimana semakin besar r^2 maka menunjukkan semakin dominannya variabel bebas tersebut terhadap variabel terikatnya. Supranto (1995 : 92) merumuskan koefisien determinasi (r^2) sebagai berikut :

variabel terikatnya. Supranto (1995 : 92) merumuskan koefisien determinasi parsial (r^2) sebagai berikut :

$$r = \frac{n \sum X_i Y_i - \sum X_i \sum Y_i}{\sqrt{n \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2} \sqrt{n \sum Y_i^2 - (\sum Y_i)^2}}$$

$$\text{atau } r^2 = 1 - \frac{\sum e_i^2}{\sum y_i^2} \quad (\text{Supranto, 1995 :94})$$

dimana : Y_i = variabel dependen dan X_i = variabel independen

D. Penentuan Koefisien Determinasi (R^2)

Untuk mengetahui seberapa jauh variabel bebas dapat menjelaskan variabel terikat, maka perlu diketahui koefisien determinasi (R^2). Rumus R^2 adalah sebagai berikut (Supranto, 1995 : 205) :

$$R^2 = 1 - \frac{b_{123} \sum x_{2i} y_i + b_{132} \sum x_{3i} y_i}{\sum y_i^2}$$

BAB II
DESKRIPSI DAERAH PENELITIAN



2.1 Pengantar

Deskripsi daerah penelitian merupakan suatu gambaran mengenai daerah, tempat dimana penelitian ini dilakukan. Daerah yang dijadikan sebagai tempat untuk mengadakan penelitian ini adalah daerah Kabupaten Jember.

Gambaran tentang daerah penelitian dapat diperoleh melalui pengamatan dan observasi data-data sekunder yang diperoleh dari instansi yang terkait langsung dengan obyek penelitian. Gambaran tentang daerah penelitian terdiri atas gambaran: letak geografis, pemerintahan, penduduk dan tenaga kerja, sosial budaya, pertanian, industri, perdagangan, keuangan, dan pendapatan regional. Untuk lebih jelasnya akan penulis terangkan sebagai berikut :

2.2 Letak Geografis

Kabupaten Jember dengan luas 3.293,34 Km terletak pada posisi $6^{\circ} 27' 9''$ s/d $7^{\circ} 14' 33''$ Bujur Timur dan $7^{\circ} 59' 6''$ s/d $8^{\circ} 33' 56''$ Lintang Selatan. Berbentuk dataran ngarai yang subur pada bagian tengah dan selatan, dikelilingi pengunungan yang memanjang sepanjang batas utara dan timur serta Samudra Indonesia sepanjang batas selatan dengan pulau Nusabarong yang merupakan pulau satu satunya yang ada di wilayah Kabupaten Jember. Batas batas administrasi Kabupaten Jember adalah disebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bondowoso dan sebagian kecil Kabupaten Probolinggo, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Banyuwangi, sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Lumajang.

Pada tahun 1999 di Kabupaten Jember mendapatkan curah hujan lebih besar 59,50% dibandingkan tahun 1998, dengan rata-rata 2.346,25 mm/tahun. Kenaikan ini disebabkan adanya kenaikan rata-rata jumlah hari hujan per tahunnya, yaitu dengan kenaikan 41,98% atau lebih 34 hari/tahun dibandingkan tahun 1998. Kecamatan dengan rata-rata hujan tertinggi adalah Ledokombo yaitu 3.015,96 mm/tahun menggeser kecamatan Sumberjambe pada tahun 1998, sebaliknya kecamatan dengan rata-rata terendah adalah kecamatan Ambulu dengan ketinggian curah hujan rata-rata 1.647mm/tahun. Seperti biasanya pengaruh

angin Muson, pada bulan-bulan Mei s/d pertengahan Oktober adalah bulan-bulan kering, sedangkan Nopember s/d pertengahan April merupakan bulan-bulan basah.

2.3 Pemerintahan

Secara administratif Kabupaten Jember terbagi menjadi 31 kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan sebanyak 244 desa/kelurahan, 23 diantaranya dengan status kelurahan. Semua desa di Kabupaten Jember telah terklasifikasikan menjadi desa swasembada semua tanpa adanya status desa swakarya, dengan katagori 86 desa swadaya II selebihnya adalah katagori swadaya III.

Dari pelaksanaan Pemilihan Umum pada era reformasi di Kabupaten Jember telah diikuti oleh semua peserta pemilu dengan jumlah 48 partai semua ada.

2.4 Penduduk dan Tenaga Kerja

Dari registrasi penduduk Kabupaten Jember pada akhir tahun 1999 tercatat sebanyak 2.106.632 Jiwa, dengan sex ratio sebesar 95,16% yang artinya bahwa jumlah penduduk perempuan 4,84% lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki.

Berikut gambaran penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Kabupaten Jember :

TABEL 4 GAMBARAN PENDUDUK MENURUT KELOMPOK UMUR DAN JENIS KELAMIN KABUPATEN JEMBER TAHUN 1999

NO	Kelompok Umur	JUMLAH		Jumlah Total
		Laki - Laki	Percempuan	
1	2	3	4	5
1	0 - 4	88 794	94 038	182 832
2	5 - 9	98 510	96 072	194 582
3	10 - 14	107 606	103 069	210 675
4	15 - 19	83 038	88 823	176 861
5	20 - 24	67 133	90 857	157 990
6	25 - 29	81 552	106 654	188 206
7	30 - 34	86 356	100 602	186 958
8	35 - 39	82 295	90 042	172 337
9	40 - 44	83 110	77 318	160 428
10	45 - 49	58 131	59 790	117 921
11	50 - 54	62 870	52 786	115 656
12	55 - 59	38 879	52 447	91 326
13	60 - 64	42 536	45 428	87 964
14	65 +	52 988	65 186	118 174

Sumber : BPS Kabupaten Jember

Pada tahun 1999 kepadatan penduduk Kabupaten Jember rata-rata sebanyak 829.96 jiwa/Km² ini berarti ada kenaikan sebesar 0.82%/Km², dibanding keadaan tahun 1998.

Gambaran kepadatan penduduk pada masing-masing wilayah di Kabupaten Jember akan diuraikan dalam tabel berikut :

TABEL 5 GAMBARAN KEPADATAN PENDUDUK PADA MASING-MASING WILAYAH DI KABUPATEN JEMBER TAHUN 1999

NO	Kecamatan	L u a s	Penduduk	Kepadatan
1	2	3	4	5
1	Kencong	58.65	64 039	1 091.88
2	Jombang	50.05	58 594	1170.71
3	Gumukmas	81.45	75 243	9 23.79
4	Puger	73.57	102 414	1 392.06
5	Wuluhan	88.99	102 463	1151.40
6	Ambulu	104.39	97 407	933.11
7	Tempurejo	302.26	69 115	228.66
8	Silo	310.98	88 791	285.52
9	Mayang	53.69	42 686	795.05
10	Mumbulsari	93.11	54 772	588.25
11	Jenggawah	57.51	74 804	1 300.71
12	Ajung	56.80	62 905	1 107.48
13	Sukorambi	40.52	34 223	844.60
14	Rambipuji	54.83	67 259	1 226.68
15	Balung	46.84	71 274	1 521.65
16	Umbulsari	64.44	67 447	1 062.18
17	Sumberbaru	156.41	94 918	606.85
18	Tanggul	107.14	74 333	693.79
19	Semboro	36.55	43 882	1 200.60
20	Bangsalsari	167.38	101 916	608.89
21	Panti	93.96	52 910	563.11
22	Arjasa	40.01	34 610	865.03
23	Jelbuk	42.15	28 850	684.46
24	Pakusari	29.19	35 900	1 229.87
25	Kalisat	50.53	64 786	1 282.31
26	Sukowono	43.55	53 275	1 223.31
27	Ledokombo	70.34	55 781	793.02
28	Sumberjambe	65.62	53 169	810.26
29	Sumpersari	35.32	100 986	2 859.17
30	Kaliwates	26.73	90 897	3 400.56
31	Patrang	35.28	85 983	2 437.16
J u m l a h		2 538.24	2 106 632	829.96

Sumber : BPS Kabupaten Jember

Berdasarkan tabel diatas kecamatan paling padat penduduknya adalah kecamatan Kaliwates dan disusul kecamatan Sumpersari, masing-masing dengan kepadatan sebesar 3.400.56 dan 2.859.17 jiwa/Km², sedangkan kecamatan

tempurejo adalah kecamatan paling jarang penduduknya dengan kepadatan rata-rata hanya 288.16 penduduk per Km² nya. Total luas Kabupaten Jember adalah 2.538.24 Km². Dari total penduduk Jember tersebut diatas 706 jiwa diantaranya adalah warga negara asing, yang tersebar ke 12 kecamatan di Kabupaten Jember.

Lapangan pekerjaan penduduk Kabupaten Jember masih didominasi sektor pertanian yaitu sebesar 46,92% dari seluruh tenaga kerja di Jember. Menurut catatan departemen Tenaga Kerja Kabupaten Jember jumlah pencari kerja di Jember sebanyak 5 529 orang, ini berarti mengalami penurunan yang tajam bila dibandingkan tahun 1998 yaitu sebanyak 51.37 % dari 11 369 orang pencari kerja di tahun sebelumnya. Hal ini barangkali telah terciptanya lapangan kerja sektor informal.

2.5 Sosial Budaya

Selain menjadi pusat perdagangan di kawasan karesidenan Besuki, Jember tercatat juga sebagai kota pendidikan, hal ini karena didukung dengan tumbuh suburnya lembaga-lembaga pendidikan yang bermunculan di Kabupaten Jember.

Kebijakan pembangunan di bidang seni dan budaya Jember dapat dikatakan berhasil, hal ini dapat dilihat perkembangan tumbuhnya perkumpulan kesenian di berbagai jenis yang ada di Jember. Pada tahun 1997 tercatat sebanyak 120 meningkat menjadi 169 perkumpulan di tahun 1998, sedang pada akhir 1999 meningkat lagi menjadi 225 organisasi perkumpulan kesenian.

Pembangunan di bidang kesehatan prioritas utama dalam penanganannya, hal ini dapat dilihat dari jumlah sarana dan fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Jember yang melayani program jaring pengaman sosial di bidang kesehatan (JPS BK) yang marak diseluruh sarana-sarana kesehatan yang tersebar di wilayah pelosok Kabupaten Jember.

2.6 Pertanian

Pembangunan pertanian mengalami peningkatan yang sangat berarti, khususnya sub sektor tanaman pangan, walaupun mengalami penurunan lahan panen sebesar 0,08 % namun ada peningkatan produksi padi sebesar 9,18 % dibandingkan tahun 1998. Hal ini berarti ada peningkatan produktivitas sebesar

9,28 % dimana pada tahun 1998 produktivitas padi sebesar 47,83 Kw/Ha menjadi 52,27 Kw/Ha pada tahun 1999

Untuk Komoditi Jagung, Kabupaten Jember mengalami kenaikan sebesar 18,43 % dari tahun 1998, walaupun luas panen mengalami penurunan sebesar 15,51% namun produktivitas naik sangat tajam sebesar 40,18% dari 33,05 Kw/Ha pada tahun 1998 menjadi 46,33 Kw/Ha di Tahun 1999, sehingga secara total produksi jagung di Kabupaten Jember mengalami kenaikan yang fantastis.

Demikian juga pada komoditi kedelai, lahan panen pada tahun ini meningkat sebesar 35,43%, produktivitas juga naik sebesar 2,98% dari 11,42 Kw/Ha pada tahun 1998 menjadi 11,76 Kw/Ha sehingga produksi total kedelai secara keseluruhan meningkat sebesar 39,53 % dari 28.137 ton ditahun 1998 menjadi 39.259 ton ditahun 1999.

Dalam upaya mendukung peningkatan *Ketahanan Pangan Nasional*, Pemerintah Daerah telah mengambil kebijaksanaan dan langkah-langkah operasional melalui pemberdayaan masyarakat/petani dengan gerakan mandiri padi, kedelai dan jagung atau lebih dikenal dengan "*Gema Palagung 2001*" untuk lebih jelasnya digambarkan dalam tabel berikut :

TABEL 6 GAMBARAN AREA INTENSIFIKASI KOMIDITI PRIORITAS TAHUN 1999/2000

No	Komoditi	MT.1999 (Ha)	MT.1999/2000 (Ha)
1.	Padi	45.500	86.500
2.	Kedelai	21.500	8.500
3.	Jagung	24.000	27.500

Sumber : Pemerintah Daerah Kabupaten Jember 2002

TABEL 7 GAMBARAN REALISASI PENGADAAN PANGAN TAHUN 1999/2000

No.	Kontraktor	Target (kg)		Realisasi (kg)	
		Unit	Kwantum	Unit	Kwantum
1.	KUD	39	49.800.000	37	39.587.800
2.	Kop. LSM	1	200.000	1	55.400
3.	Satgas	1	3.018.000	1	3.018.000

Sumber : Pemerintah Daerah Kabupaten Jember 2002

Kabupaten Jember selain dikenal sebagai lumbung pangan, juga merupakan wilayah perkebunan dimana ± 23 % wilayahnya merupakan areal perkebunan yang mencapai areal seluas 78.590,74 Ha dengan berbagai komoditi yang berorientasi pada ekspor, seperti kakao, kopi, karet, tembakau, teh, kelapa, cengkeh, pinang dan lain-lain. Untuk menunjang program pengembangan tanaman kopi dan kakao di Indonesia, di Jember terdapat *Pusat Penelitian Kopi dan Kakao*. Untuk pengembangan tanaman tembakau sebagai komoditi ekspor andalan Kabupaten Jember, baik tembakau jenis Besuki Na - Oogst maupun Besuki Voor - Oogst ditingkatkan melalui Program Pembangunan Perkebunan Rakyat Terpadu dan Pembinaan Kemitraan Pertembakauan. Sedangkan untuk program pembinaan dan peningkatan produksi perkebunan lainnya, juga dikembangkan tanaman kopi Arabika, mlinjo, lada, cabe jamu, kelapa dan pinang.

Secara umum untuk subsektor tanaman perkebunan dan kehutanan mengalami kenaikan yang sangat variatif, kecuali komoditi kelapa, kapuk randu dan pinang mengalami penurunan produksi

Pada tahun 1999 untuk komoditi peternakan di kabupaten Jember mengalami penurunan produksi, hal ini dapat dilihat dari indikator jumlah sapi potong dan kambing/domba yang dipotong pada tahun 1999 mengalami penurunan masing-masing sebesar 22,36 dan 3,04% dibanding pada tahun 1998.

Pembangunan sektor peternakan di Kabupaten Jember dititik beratkan pada kegiatan peningkatan produksi ternak, peningkatan kesempatan kerja

peningkatan kesejahteraan petani ternak, pengembangan agrobisnis serta pemanfaatan Sumber Daya Alam secara optimal.

TABEL 8 PERKEMBANGAN POPULASI TERNAK TAHUN 1998/1999-1999/2000

Jenis Ternak	1998/1999	1999/2000
Kuda	1.134	1.147
Sapi potong	187.693	187.928
Sapi perah	515	541
Kerbau	4.771	4.784
Kambing	60.189	61.442
Domba	85.395	88.170
Babi	1.574	1.613
Ayam Buras	1.978.726	2.010.880
Ayam Ras Petelur	270.054	280.518
Ayam Ras Pedaging	580.175	602.175
Itik	145.429	147.792

Sumber : Pemerintah Daerah Kabupaten Jember 2002

Dibanding pada tahun 1998 sub sektor perikanan mengalami kenaikan produksi, baik budidaya perikanan darat maupun penangkapan ikan laut pada tahun 1999 secara variatif.

Pembangunan sektor perikanan di Kabupaten Jember bertumpu pada usaha peningkatan produksi dan produktifitas nelayan dan petani ikan, serta upaya menyelamatkan usaha perikanan .Upaya tersebut meliputi peningkatan pendapatan petani nelayan dan produksi ikan, meningkatkan penyerapan tenaga kerja serta menurunkan kegiatan penangkapan ikan yang merusak lingkungan dan kelestarian sumber daya perikanan.

TABEL 9 GAMBARAN PERKEMBANGAN PRODUKSI PERIKANAN TAHUN 1997/1998

Jenis Usaha	Produksi 1997	Produksi 1998
	(ton)	(ton)
1. Jenis Penangkapan		
- Laut	9.619,35	9.126,90
- Perairan Umum	209,20	257,20
2. Budidaya		
- Tambak	385,60	340,00
- Kolam	271,80	339,50
- Mina Padi	18,00	19,50
- Longyam	11,50	12,80
- Karamba	2,80	3,20
- Katak	14,10	9,70
- Bekicot	65,70	52,40
- Labi-labi	15,19	14,20
3. Pembenihan		
- Ikan Hias	775.850,00	925.450,00
- KPI	10.507.850,00	12.955.000,00
- BBI	4.525.000,00	5.225.000,00

Sumber : Pemerintah Daerah Kabupaten Jember 2002

2.7 Industri

Sektor industri di Kabupaten Jember tahun 1999 tercatat sebanyak 35 industri besar dan 98 industri sedang. Hal ini tidak banyak mengalami banyak perubahan. Sementara kebijaksanaan pembangunan sektor industri diarahkan pada terciptanya industri yang mengarah pada penguatan industri yang dimotori oleh terciptanya industri kecil dan menengah. Sedang usaha industri

kecil kerajinan terus dikembangkan bersamaan dengan memanfaatkan kemampuan teknologi. Jumlah unit usaha sektor industri di Kabupaten Jember tercatat sebanyak 14.175 unit usaha, terdiri dari 599 unit usaha industri formal dan 13.576 unit Usaha industri non formal

Perlu diketahui bahwa konsep dari industri memang sedikit agak berbeda bila dibandingkan dengan konsep pada umumnya. Pada data yang dikumpulkan dengan konsep industri dititik beratkan pada jumlah tenaga kerja yang terlibat bukan pada modalnya.

Lain lagi sektor air bersih dan listrik, dengan pertumbuhan penduduk yang selalu bertambah dan pertumbuhan ekonomi, maka sektor air bersih dan listrik harus juga mendukung, mengingat sektor ini sangat vital kegunaannya.

Air bersih yang dikelola Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Jember pada tahun 1999 untuk katagori jenis pelanggan rumah tangga mengalami kenaikan yang sangat fantastis yakni sebesar 1 212.47%, bila dibanding tahun 1998 sebanyak 283 367 M3 menjadi 3 435 744 M3 di tahun 1999. Hal ini merupakan prestasi dan sekaligus tantangan bagi lembaga PDAM untuk selalu menyiapkan sumber daya air yang selalu meningkat.

Untuk kebutuhan listrik yang disediakan Perusahaan Listril Negara Kabupaten Jember, tahun 1999 mengalami kenaikan sebesar 14.08% dari tahun 1998 listrik yang dibangkitkan sebesar 268 208 778 KWh menjadi 305 965 346 KWh pada tahun 1999.

2.8 Perdagangan

Dalam era krisis ekonomi yang berkepanjangan, Kabupaten Jember tidak dapat lepas dari dampak yang menggilas tersebut. Pada tahun 1998 total nilai ekspor Kabupaten Jember dari berbagai jenis komoditi mencapai nilai sebesar 103 717 184.8 US ruurun pada tahun 1998 menjadi sebesar 65 598 062.3 US\$, ini berarti nilai ekspor total Kabupaten Jember mengalami penurunan sebesar 36.6%.

Jenis komoditi ekspor andalan Jember adalah jenis karet, kopi, coklat, tembakau, vanilli, batu piring, kedelai sayur dan furniture. Perkembanganinflasi di Kabupaten Jember tahun 1999 mengalami penurunan tahun sebelumnya . Dimana inflasi tahun 1998 sebesar 64.30% turun menjadi

3.30% pada tahun 1999. Inflasi tertinggi pada bulan Januari disusul bulan Desember masing-masing sebesar 4.26% dan 2.51%, sedangkan inflasi terendah pada bulan Juli 1999 yaitu sebesar minus 2.04% (deflasi). Penyebab tingginya inflasi pada bulan-bulan tersebut dikarenakan ada moment Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Natal, dimana moment tersebut kebutuhan masyarakat meningkat sehingga barang dan jasa juga meningkat pula.

Jalan merupakan prasarana perhubungan yang sangat vital. Dari data yang ada panjang jalan di Kabupaten Jember sepanjang 1 527.732 Km, yang dirinci menurut jenisnya menjadi 63% aspal, 0.03% kerikil selebihnya sebesar 34% masih dari tanah dimana kondisinya lebih baik 46%, sedang 12% rusak ringan, 8% rusak berat sebesar 34.33%.

Sarana angkutan kereta api adalah sarana transportasi yang murah dan aman bagi golongan menengah kebawah. Walaupun pada tahun 1998 mengalami penurunan sebesar 1.96%, namun pada tahun 1999 ini mengalami peningkatan yang sangat berarti. Dari data yang dihimpun dari seluruh stasiun yang ada di Kabupaten Jember, jumlah penumpang yang datang mengalami kenaikan sebesar 22.10% pada tahun 1999 ini. Dimana pada tahun 1998 jumlah penumpang yang datang sebanyak 672 667 penumpang, naik menjadi 821 319 penumpang, sedangkan jumlah penumpang yang diberangkatkan dari Kabupaten Jember pada tahun 1998 sebanyak 670 964 penumpang, naik menjadi 864 456 penumpang pada tahun 1999, atau ada kenaikan sebesar 28.84%. Hal ini disebabkan bahwa pilihan masyarakat akan transportasi jatuh pada sarana kereta api, karena kenaikan ongkos jasa transportasi yang disebabkan adanya kenaikan harga bahan bakar minyak, tidak terlalu berdampak pada sarana transportasi kereta api.

Perkembangan di bidang sarana telpon di Kabupaten ada kemajuan yang sangat significant, mengingat sarana telpon adalah sarana utama di era globalisasi informasi saat ini. Kemajuan sarana dan prasarana instrumen elektronik di Kabupaten Jember ini dapat dilihat dari perkembangan dari tahun 1998, jumlah sarana Wartel/Kiospon/TUT sebanyak 643 buah meningkat menjadi sebanyak 1 245 buah pada tahun 1999, atau meningkat sebesar 93.62%. Kalau kita lihat dari data jumlah pelanggan telpon menurut jenisnya pada tahun 1998 sebanyak 32 883

pelanggan naik menjadi 36 002 pelanggan pada tahun 1999, atau naik sebesar 9.49%. Sedangkan kalau kita bandingkan dari data banyaknya satuan sambungan telpon terpasang di Kabupaten Jember pada tahun 1998 sebanyak 35 515 sambungan, naik pada tahun 1999 menjadi 8 782 sambungan telpon terpasang, ini berarti ada kenaikan sebesar 9.20%.

Badai krisis ekonomi dan krisis moneter yang melanda bangsa Indonesia sejak tahun 1997, ternyata terimbas pada sektor perhotelan di Kabupaten Jember pada tahun 1999 ini. Hal ini dapat dilihat dari terpengaruhnya perkembangan sektor perhotelan di Kabupaten Jember. Pada tahun 1998 jumlah tamu yang menginap di hotel berbagai klasifikasi sebanyak 146 929, turun menjadi 86 857 orang pada tahun 1999, hal ini berarti mengalami penurunan sebesar 40.86%. Bias dari krisis ekonomi dan krisis moneter yang melanda sektor perhotelan di Kabupaten Jember memang merupakan cobaan dan sekaligus tantangan bagi pengusaha hotel untuk selalu meningkatkan pengelolaan dan pelayanannya.

2.9 Keuangan

Kabupaten Jember sebagai pusat perdagangan di wilayah timur Jawa Timur perkembangannya mampu mendorong tumbuh suburnya jasa perbankan dalam membantu menampung dan menyalurkan dana masyarakat dalam kegiatan pembangunan. Ada 5 Bank Pemerintah, 9 Bank Swasta serta sejumlah Bank Perkreditan Rakyat yang beroperasi dan tersebar di wilayah Kecamatan

Indikator pembangunan sektor keuangan di Kabupaten Jember dapat dilihat dari jumlah dana yang dihimpun oleh lembaga keuangan yang ada di Kabupaten Jember, baik yang berupa giro, deposito maupun tabungan. Menurut data yang ada pada Bank Indonesia wilayah Jember, jumlah dana yang dihimpun lembaga keuangan yang ada di Kabupaten Jember posisi bulan Desember pada masing-masing tahun 1998 dan 1999 adalah sebagai berikut :

1. GIRO, mengalami kenaikan sebesar 26.01% dari sebesar 120 324 juta di tahun 1998 menjadi 151 625 juta pada tahun 1999.
2. DEPOSITO, mengalami penurunan sebesar 25.36% dari sebesar 803 776 juta di tahun 1998 menjadi 599 992 juta pada tahun 1999. Hal ini

dikarenakan turunnya suku bunga bank, sehingga pada deposito menarik depositonya.

3. TABUNGAN, mengalami kenaikan sebesar 94.20% dari sebesar 309 634 juta pada tahun 1998 naik menjadi 601 300 juta di tahun 1999.

Namun secara global, sektor keuangan di Kabupaten Jember dari nominal mengalami kenaikan yang sangat berarti dimana pada tahun 1998 posisi Desember sebesar 1 233 734 juta naik menjadi 1 352 847 juta pada posisi yang sama di tahun 1999. Hal ini berarti mengalami kenaikan sebesar 9.65%.

2.10 Pendapatan Regional

Secara riil pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jember dilihat dari penghitungan Produk Domestik Regional Bruto, mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitannya, setelah didera badai krisis yang berkepanjangan. Pada tahun 1998 Kabupaten Jember mengalami pertumbuhan ekonomi yang memprihatinkan, yaitu sebesar 7.58% dengan tingkat inflasi sebesar 62.48%. Namun pada tahun 1999 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jember sudah mulai menunjukkan tanda-tanda pulih kembali, yaitu dengan tumbuh sebesar 1.89% dengan taraf inflasi sebesar 3.11%.

Secara sektoral, kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB masih didominasi sektor pertanian yaitu sebesar 50.32% dengan pertumbuhan riil sebesar 4.02% dan tingkat inflasi sebesar 1.25%, kemudian disusul sektor perdagangan sebesar 16.55% yang tumbuh sebesar 2.32% dan tingkat inflasi di sektor ini sebesar 5.87%. pertumbuhan tertinggi ada pada subsektor listrik sebesar 15.27% dan terendah pada subsektor perbankan yaitu sebesar minus 34.49%.

Kalau kita cermati Pendapatan Regional per kapitanya, pada tahun 1998 mengalami kenaikan sebesar 47.49% dengan nominalnya tahun 1997 sebesar 1 302 110 rupiah menjadi sebesar 1 920 440 rupiah pada tahun 1998, dan pada tahun 1999 naik sebesar 4.24% dengan nominal sebesar 2 001 820 rupiah per kapitanya. Penurunan angka pertumbuhan pendapatan perkapita ini, bukan berarti penurunan daya beli masyarakat terhadap kebutuhan akan barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat, karena tingkat inflasi pada tahun 1998 sebesar 62.48%, sedangkan pada tahun 1999 hanya sebesar 3.11%.

BAB III PENYAJIAN DATA



3.1 Pengantar

Pada bab ini akan dibahas secara garis besar mengenai variabel-variabel penelitian, disamping itu juga akan di paparkan tentang gambaran data sekunder yang didapat oleh penulis.

Langkah ini sebagai kelanjutan dari proses pengumpulan data dari lokasi penelitian yang terkait dengan obyek penelitian. Data yang terkumpul disajikan secara teratur dan sistematis dalam membantu proses analisis sesuai dengan variabel penelitian

Dalam penelitian ini ada dua variabel yang mendasari kerangka analisis penelitian :

1. Variabel Independen yang sekaligus sebagai variabel prediktor (X_i) yang terdiri atas beberapa variabel yaitu :
 - a. Pajak daerah (X_1)
 - b. Retribusi daerah (X_2)
2. Variabel dependen (Y) yaitu kemandirian fiskal daerah

3.2 Gambaran Sumber Penerimaan APBD Kabupaten Jember

Menurut Talaohu (1998 : 62), menyatakan bahwa keuangan daerah adalah subsistem dari keuangan negara yang diwujudkan dalam bentuk Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Persoalan utama daerah yang berkaitan dengan alokasi sumber-sumber keuangan antara pusat dan daerah. Hal ini menyebabkan penentuan kebijakan keuangan daerah tidak terlepas dari pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah.

Realisasi APBD Kabupaten Jember terdiri dari : (a) Penerimaan Daerah, b) Bagian Urusan Kas dan Perhitungan. Penerimaan Daerah terdiri dari : bagian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SLPATL), Pendapatan Asli Daerah (PAD) , bagian Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak (BHP/BP), bagian Sumbangan dan Bantuan, serta Bagian Penerimaan Pembangunan.

Perkembangan APBD Kabupaten Jember selama tahun anggaran 1995/1996 – tahun 2002 ditunjukkan tabel berikut :

**TABEL 10 SUMBER PENERIMAAN APBD KABUPATEN JEMBER
MENURUT TAHUN ANGGARAN 1995/1996- tahun 2002
(dalam ribuan rupiah)**

TH	PNR TOTAL	SLPATI	PAD	BHP/BP	SUBSIDI	LAIN-2	PINJAM AN
95/96	45,955,963	825,034	10,709,882	7,269,843	27,151,204	0	0
96/97	56,472,122	1,932,338	15,048,073	8,674,411	30,817,300	0	0
97/98	58,644,105	2,454,252	13,589,542	9,389,792	33,210,519	0	0
98/99	156,966,150	2,529,211	20,141,359	12,308,507	121,987,073	0	0
99/00	203,346,623	6,344,071	25,611,912	14,619,932	156,770,708	0	0
2000	211,582,921	7,191,395	16,478,605	15,977,603	171,246,903	33,000	655,415
2001	480,507,902	8,423,659	26,469,441	27,709,009	417,861,793	44,000	0
2002	555,433,345	47,540,655	38,184,247	28,557,699	426,854,740	14,296,004	0
Rata-2	321,567,388	96,550,827	25,377,112	15,563,349	258,944,243	1,796,626	81,927

Sumber : Dispenda, Bappeda, dan BPS Kabupaten Jember tahun 2002(data diolah)

Tabel 11 diatas menunjukkan total penerimaan APBD tahun 1995/1996- tahun 2002 rata-rata sebesar Rp 321,567,388,000,-. Penerimaan APBD tertinggi terjadi pada tahun 2002 sebesar Rp 555,433,345,000,- dan terendah terjadi pada tahun 1995/1996 sebesar Rp 45,955,962,000,-.

Sedangkan sumber penerimaan APBD tahun 1995/1996-tahun 2002 terbesar diperoleh dari subsidi / bantuan dengan rata-rata sebesar Rp 258,944,243,000,- sekitar 80,5 %. Penerimaan PAD sendiri rata-rata sebesar Rp 25,377,112,000,- atau sekitar 7,89 %. Untuk lebih jelasnya akan digambarkan sebagai berikut :

3.3 Gambaran Pendapatan Asli Daerah dan Sumber-sumber Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan yang diperoleh dengan memanfaatkan serta mengelola sumber-sumber keuangan sendiri. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana yang tertera dalam UU No 25 tahun 1999 dan yang diungkapkan oleh Kaho (1997 : 26) bahwa PAD adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber –sumber daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan daerah, dan hasil pendapatan dinas daerah, serta lain-lain usaha daerah yang sah. PAD merupakan sumber-sumber pendapatan yang benar-benar diperoleh dan dipergunakan oleh daerah

untuk membiayai penyelenggaraan otonomi daerah. Semakin besar penerimaan PAD, berarti pula bahwa kemampuan dalam melaksanakan pembangunan akan lebih baik, dan semakin tinggi kontribusi terhadap total penerimaan daerah, maka bisa dikatakan bahwa daerah itu semakin mandiri dalam pembiayaan daerah.

Gambaran target dan realisasi PAD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 1995/1996- tahun 2002 dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 11 TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD aktual) KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 1995/1996- tahun 2002 (dalam ribuan rupiah dan persen)

TAHUN	TARGET (Rp. 000,-)	REALISASI	
		NILAI (Rp. 000,-)	EFEKTIVITAS (%)
1995/1996	10,341,734	10,709,882	104
1996/1997	14,909,415	15,048,073	101
1997/1998	14,201,097	13,589,542	95,69
1998/1999	15,983,918	20,141,359	126
1999/2000	24,378,547	25,611,912	105
2000	16,984,311	16,478,605	97,02
2001	23,127,646	26,469,441	114
2002	26,268,969	38,184,247	145
RATA-RATA			111,01

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember tahun 2002

Tabel 12 diatas menunjukkan tingkat efektivitas rata-rata PAD sebesar 111,01 % artinya realisasi dari PAD (PAD aktual) Kabupaten Jember mampu melampaui target yang di tetapkan dari tahun ke tahun, kecuali pada tahun 1997/1998 sebesar 95,69 % dan tahun 2000 sebesar 97,02 %.

Tidak tercapainya target pada tahun 1997/1998 karena imbas krisis moneter di Indonesia termasuk di Jember sedangkan pada tahun 2000 karena adanya perubahan format tahun anggaran baik APBN atau APBD. Sebelum tahun anggaran 2000, format anggaran dimulai 1 April diakhiri tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Terhitung sejak tahun 2000 format anggaran dimulai tanggal 1 Januari dan diakhiri tanggal 31 Desember tahun yang sama. Jadi pada tahun 2000 anggaran praktis dilaksanakan 9 bulan, yaitu 1 April sampai dengan 31 Desember tahun 2000.

Untuk memperoleh gambaran secara rinci data masing-masing sumber penerimaan PAD baik target dan realisasinya akan dijelaskan sebagai berikut :

TABEL 12 TARGET SUMBER-SUMBER PENERIMAAN KABUPATEN JEMBER TAHUN 1995/1996- TAHUN 2002 (dalam ribuan rupiah)

Tahun	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Bag.Laba BUMD	Pen Dinas	Lain-lain	PAD
95/96	2,619,967	5,861,100	57,879	13,529	193,813	10,341,734
96/97	3,270,921	6,617,819	1,179,109	866,223	319,102	14,909,415
97/98	3,594,300	7,611,423	1,669,413	1,022,960	303,000	14,201,097
98/99	3,222,161	9,338,953	2,326,422	0	1,096,382	15,983,918
99/00	4,430,000	11,371,032	8,177,515	0	400,000	24,378,547
2000	4,358,300	9,537,952	2,267,138	0	820,921	16,984,311
2001	6,670,000	13,546,596	2,318,050	0	593,000	23,127,646
2002	6,325,500	17,269,769	1,352,700	0	1,321,000	26,268,969
Rata-rata	4,311,393	10,144,330	2,418,528	364,162	796,040	18,274,454

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember tahun 2002

Adapun Realisasi penerimaan sumber-sumber PAD Kabupaten Jember mulai tahun 1995/1996-tahun 2002 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

TABEL13 REALISASI SUMBER-SUMBER PENERIMAAN KABUPATEN JEMBER TAHUN 1995/1996- TAHUN 2002 (dalam ribuan rupiah)

Tahun	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Bag.Laba BUMD	Pen. Dinas	Lain-lain	PAD
95/96	2,858,947	5,784,301	1,030,600	757,122	278,911	10,709,882
96/97	3,450,200	6,124,765	4,237,476	881,836	344,792	15,048,073
97/98	3,600,844	6,965,318	1,669,413	1,030,162	323,805	13,589,542
98/99	3,699,583	10,523,147	2,319,428	0	4,374,492	20,141,359
99/00	5,408,902	11,239,034	8,177,515	0	786,461	25,611,912
2000	4,015,314	9,195,041	2,262,638	0	1,005,612	16,478,605
2001	7,161,839	14,086,001	2,324,400	0	2,897,200	26,469,441
2002	9,795,713	21,184,232	2,227,363	0	3,386,480	38,184,247
Rata-rata	4,998,918	10,637,729	3,031,104	283,640	1,674,719	20,779,132

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember tahun 2002

Berdasarkan data tabel diatas bahwa sumber penerimaan PAD dari retribusi memberikan kontribusi terbesar bagi realisasi PAD (PAD aktual) Kabupaten Jember pada tahun 1995/1996- tahun 2002. Hal itu dapat dilihat dari realisasi penerimaan retribusi rata-rata sebesar Rp 10,637,729,000,- dan sumbangan penerimaan retribusi yang sangat besar dibanding sumber penerimaan lain pada realisasi PAD (PAD aktual) karena jenis retribusi yang bisa dipungut oleh pemerintah Kabupaten Jember sangat banyak dan proses pemungutannya mudah dan cepat, selain itu ada imbalan bagi wajib retribusi secara langsung berupa jasa/ layanan.

Sumber penerimaan PAD terbesar kedua adalah pajak daerah dengan realisasi penerimaan rata-rata sebesar Rp 4,998,918,000,- kemudian diikuti oleh laba BUMD dengan realisasi penerimaan rata-rata sebesar Rp 3,031,104,000,- dan penerimaan lain-lain yang sah dengan realisasi penerimaan rata-rata sebesar Rp1,674,719,000,-. Terakhir penerimaan dinas daerah dengan realisasi penerimaan rata-rata sebesar Rp 283,640,000,-

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Kemandirian Fiskal Daerah Kabupaten Jember

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Kaho (1991: 123) bahwa satu kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri adalah kemampuan self-supporting dalam bidang keuangan. Dengan kata lain faktor keuangan merupakan faktor essential dalam mengukur tingkat (kemandirian) daerah dalam melaksanakan otonominya.

Kemampuan keuangan daerah dapat dijadikan sebagai tolak ukur kemampuan suatu daerah dalam melaksanakan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab. Hal ini dapat dilihat dari besarnya kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Menurut Devas (1989 : 46), pemerintah daerah tidak harus berdiri sendiri dari segi keuangan agar dapat memiliki otonomi yang berarti. Yang penting adalah “ wewenang ditepi “, artinya memiliki penerimaan daerah sendiri yang cukup sehingga dapat mengadakan perubahan disana-sini pada tingkat layanan jasa yang disediakan, untuk itu mungkin sudah cukup memadai jika 20 % dari pengeluaran berasal dari sumber-sumber daerah. artinya indikasi kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah tidak boleh kurang dari 20 %.

Menurut Santoso (19995 : 20), meskipun PAD harus dapat membiayai seluruh anggaran belanja daerah, namun proporsi PAD terhadap total penerimaan daerah merupakan indikasi derajat kemandirian / kemampuan suatu daerah, sering juga disebut sebagai kemandirian fiskal (*fiscal independence*).

Dari uraian diatas maka untuk menjelaskan kemandirian fiskal daerah dapat diketahui dengan melihat kontribusi penerimaan PAD (PAD aktual) terhadap total penerimaan daerah yang menurut Kuncoro (1995 : 8) yang dinyatakan dengan derajat desentralisasi fiskal daerah. Indikator derajat desentralisasi fiskal adalah rasio antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total penerimaan daerah.

Untuk menggambarkan data tentang kontribusi PAD terhadap total penerimaan Daerah dan kemandirian fiskal akan dijelaskan sebagai berikut :

4.1.1 Kontribusi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD aktual) terhadap total penerimaan daerah

Kontribusi PAD aktual terhadap total penerimaan daerah dapat dilihat dari besarnya proporsi PAD aktual terhadap total penerimaan daerah. Untuk mengetahui besarnya proporsi digunakan analisis Proporsi (Djarwanto , 1982 : 129),

Gambaran proporsi kontribusi PAD dan juga komponen penerimaan daerah lainnya terhadap total penerimaan daerah Kabupaten Jember dapat dilihat pada tabel :

TABEL 14 PROPORSI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD aktual) DAN KOMPONEN PENERIMAAN DAERAH LAINNYA KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 1995/1996- tahun 2002 (dalam persen)

TH	PNR. TOTAL	SLPATL	PAD	BHP/BP	SUBSIDI	LAIN-2	PINJAMAN
95/96	100	1,8	23,3	15,82	59,08	0	0
96/97	100	3,42	26,65	15,36	54,57	0	0
97/98	100	4,18	23,17	16,01	56,63	0	0
98/99	100	1,61	12,83	7,84	77,71	0	0
99/00	100	3,12	12,6	7,19	77,09	0	0
2000	100	3,4	7,78	7,55	80,93	0,015	0,31
2001	100	1,75	5,50	5,76	86,96	0,009	0
2002	100	8,56	6,87	5,14	76,85	2,573	0
Rata-2	100	3,69	9,12	6,69	79,91	0,519	0,062

Sumber : Tabel 10 diolah

Tabel 15 diatas menunjukkan bahwa proporsi atau sumbangan PAD kabupaten Jember terhadap total penerimaan daerah selama 8 (delapan) tahun terakhir tahun 1995/1996- tahun 2002 rata-rata sebesar 9,12 %. Proporsi terkecil terjadi pada tahun 2001 yaitu hanya sekitar 5,50 %. Sedangkan proporsi terbesar terjadi pada tahun 1996/1997 sebesar 26,65 %.

Hal ini menampakkan bahwa selama kurun waktu delapan tahun terakhir Kabupaten Jember secara kemampuan keuangan daerah tidak cukup memadai dalam membiayai urusan rumah tangganya baik kegiatan rutin maupun pembangunan, sebagaimana kriteria Devas (1989 : 46) kemampuan keuangan cukup memadai jika 20 % dari pengeluaran berasal dari sumber-sumber daerah,

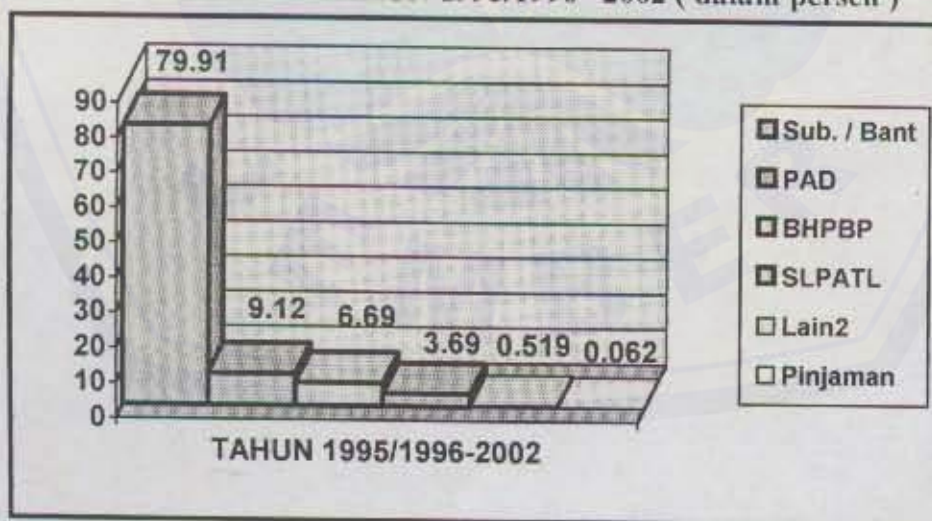
artinya indikasi kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah tidak boleh kurang dari 20 %.

Berdasarkan skala interval derajat desentralisasi fiskal daerah / kemandirian fiskal daerah (Tim Fisipol UGM dalam Wulandari, 2001 : 21), selama delapan tahun terakhir Kabupaten Jember dengan proporsi PAD rata-rata bisa 9,12 % bisa dikatakan dalam kategori sangat kurang dalam kemampuan keuangan daerahnya (berdasarkan kriteria pada tabel 4)

Sedangkan rata-rata proporsi Subsidi/bantuan selama 8 (delapan) tahun terakhir tahun 1995/1996- tahun 2002 menduduki urutan tertinggi, yaitu rata-rata sebesar 79,91 %, ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan daerah Kabupaten Jember terhadap dana sumbangan/subsidi dari pemerintah di atasnya masih sangat tinggi atau lebih dari 70 % (Maloo Kii dan Kameo, 2002). Untuk itu selama kurun waktu lima tahun terakhir secara kesiapan keuangan daerah Kabupaten Jember tidak mampu untuk berotonomi.

Secara keseluruhan proporsi rata-rata selama delapan tahun terakhir menunjukkan bahwa sumbangan sumber/komponen Penerimaan Daerah terhadap Total Penerimaan Daerah yang terbesar sampai terkecil secara berturut-turut dapat diperoleh dalam gambar diagram sebagai berikut :

GAMBAR 3 RATA-RATA PROPORSI DAN PERINGKAT SUMBER-SUMBER PENERIMAAN DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 1995/1996 –2002 (dalam persen)



Sumber :Tabel 14

Sementara itu untuk mengetahui besarnya PAD suatu daerah dapat dihitung dengan membandingkan masing-masing sumber/komponen PAD terhadap total PAD tersebut. Semakin besar proporsi suatu sumber PAD, maka sumbangan terhadap PAD semakin besar. Sebaliknya semakin kecil proporsi suatu sumber PAD, maka sumbangan terhadap PAD semakin kecil. Perhitungan proporsi setiap komponen PAD yang potensial di suatu daerah tersebut, tahap selanjutnya akan membantu pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan PAD dengan menitik beratkan pada setiap sumber/komponen PAD yang potensial tersebut. Sehingga upaya menitik beratkan PAD dapat dilaksanakan dengan cara efektif dan efisien.

Gambaran besarnya proporsi setiap sumber/komponen PAD selama tahun 1995/1996- tahun 2002 dapat dilihat pada table berikut :

TABEL 15 PROPORSI SUMBER-SUMBER / KOMPONEN PAD KABUPATEN JEMBER TAHUN 1995/1996- TAHUN 2002 (dalam persen)

Tahun	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Bag.Laba BUMD	Pen. Dinas	Lain-lain	PAD
95/96	26,69	54,01	9,62	7,07	2,60	100
96/97	22,93	40,7	28,16	5,86	2,29	100
97/98	26,5	51,25	12,28	7,58	2,38	100
98/99	18,37	52,25	11,52	0	21,72	100
99/00	21,12	43,88	31,93	0	3,07	100
2000	24,37	55,79	13,73	0	6,10	100
2001	27,06	53,22	8,78	0	10,9	100
2002	25,65	55,48	5,83	0	8,87	100
Rata-rata	24,09	50,82	15,23	2,56	7,25	100

Sumber : Tabel 13 diolah

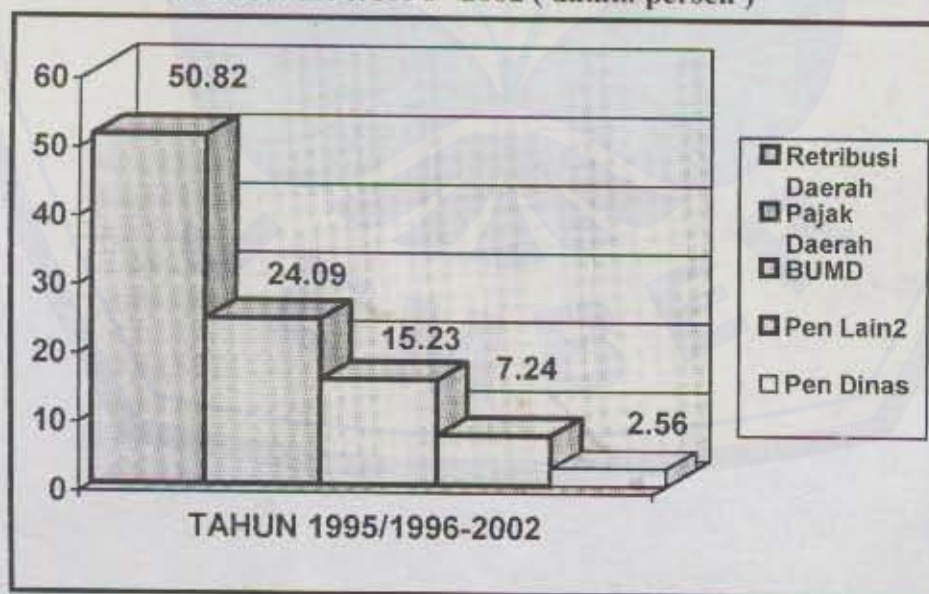
Berdasarkan tabel diatas memberi gambaran bahwa pencapaian sumber-sumber penerimaan PAD Kabupaten Jember antara tahun anggaran 1995/1996- tahun 2002. Pada periode tahun tersebut proporsi terbesar sumber PAD dari penerimaan Pajak daerah pada tahun 2002 sebesar 25,65 %, sedangkan terendah adalah pada tahun 1998/1999 sebesar 18,37 %. Proporsi sumber PAD dari Retribusi Daerah terbesar pada tahun 2002 sebesar 55,48 %, sedangkan terendah pada tahun 1996/1997 sebesar 40,70 %. Proporsi sumber PAD pada Perusahaan

Daerah (Laba BUMD) terbesar pada tahun 1999/2000 sebesar 31,93 %, terendah pada tahun 2002 sebesar 5,83 %.

Sumber –sumber PAD lainnya dari Penerimaan Dinas-dinas (seperti pungutan yang timbul karena menguasai sumber alam yang berupa penggunaan milik umum) selama kurun waktu delapan tahun terakhir (1995/1996-tahun 2002) rata-rata sebesar 2,56 %, namun kurun waktu lima tahun terakhir sumber Penerimaan dinas ini banyak tak tergali, artinya kontribusi terhadap realisasi penerimaan PAD (PAD aktual) Kabupaten Jember adalah 0,00 % atau nihil. Sementara itu, jenis sumber penerimaan PAD lainnya adalah dari pendapatan lain-lain yang sah (seperti hasil penjualan alat –alat dan bahan sisa, penerimaan sewa, bunga pinjaman Bank, dan Giro, dan penerimaan denda dari kontraktor) memberikan sumbangan terbesar tahun 1998/1999 21,72 %, sedang terendah tahun 1996/1997 adalah 2,29 %.

Secara keseluruhan proporsi rata-rata selama delapan tahun terkhir menunjukkan bahwa sumbangan sumber/komponen PAD terhadap PAD yang terbesar sampai terkecil secara berturut-turut dapat diperoleh dalam gambar diagram sebagai berikut :

GAMBAR 4 RATA-RATA PROPORSI DAN PERINGKAT SUMBER-SUMBER PENERIMAAN PAD KABUPATEN JEMBER TAHUN 1995/1996 –2002 (dalam persen)



Sumber :Tabel 15

4.1.2 Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah Kabupaten Jember

Pengertian Kemandirian fiskal daerah menggambarkan kemampuan Pendapatan Asli Daerah dalam membiayai anggaran daerah, dimana kemandirian fiskal dapat dipelajari dengan melihat pada derajat desentralisasi fiskal suatu daerah. Kuncoro (1995 : 8) menyatakan bahwa indikator derajat desentralisasi fiskal adalah rasio antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total penerimaan daerah

Untuk menggambarkan data mengenai besarnya Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah serta perkembangannya akan dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

TABEL 16 PERKEMBANGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD aktual) DAN DERAJAT DESENTRALISASI FISKAL DAERAH (DDFD) KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 1995/1996- tahun 2002 (dalam ribuan rupiah dan persen)

TAHUN	PAD aktual		Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah	
	PAD (Rp 000, -)	Pertumbuhan (%)	DDFD	Pertumbuhan (%)
95/96	10,709,882	-	0,233047	-
96/97	15,048,073	40,51	0,266469	14,34
97/98	13,589,542	-9,69	0,233902	-12,22
98/99	20,141,359	48,21	0,128317	-45,14
99/00	25,611,912	27,16	0,125952	-1,843
2000	16,478,605	-35,7	0,077882	-38,16
2001	26,469,441	60,63	0,055086	-29,27
2002	38,184,247	44,26	0,068747	24,8
Rata-2	20,779,132	25,06	0,148675	-12,5

Sumber : Tabel 10 diolah

Tabel diatas menunjukkan pertumbuhan PAD aktual Kabupaten Jember dari tahun anggaran 1995 / 1996- tahun 2002 rata-rata sebesar 25,06 %. Persentase pertumbuhan PAD aktual Kabupaten Jember tertinggi terjadi pada tahun 2001 sebesar 60,63 % dan terendah terjadi pada tahun 2000 sebesar -35,7 %. Sedangkan Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah (DDFD) Kabupaten Jember dari tahun anggaran 1995 / 1996- tahun 2002 rata-rata mengalami pertumbuhan -12,5 %. Persentase pertumbuhan DDFD tertinggi pada tahun 2002 sebesar 24,8 % dan terendah pada tahun 2002 sebesar -38,16 %

Berdasarkan gambaran diatas pertumbuhan PAD aktual Kabupaten Jember selama tahun 1995/1996- tahun 2002 dari tahun ketahun diatas 10 % (25,06 %). Pertumbuhan DDFD bisa dilihat bahwa secara rata-rata selama tahun 1995/1996- tahun 2002 dibawah 10 % (-12,5 %). Hal ini menampakkan bahwa meskipun pertumbuhan PAD yang cukup tinggi dengan rata-rata 25,06 % pertahun namun ternyata secara kemampuan PAD aktual daerah dalam membiayai pengeluaran rutinnya sangat rendah, dan yang menjadi tugas daerah adalah berupaya untuk meningkatkan kembali kemampuan PAD aktualnya yang belum optimal dari tahun ketahun. Salah satu upayanya adalah dengan lebih meningkatkan kontribusi sumber-sumber PAD sebagai faktor pendukung didalamnya.

4.2 Kontribusi Sumber-sumber PAD terhadap Penerimaan Daerah

4.2.1 Penerimaan PAD dari Sektor Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Jember Tahun 1995/1996-tahun 2002

Pajak daerah secara teori dikehendaki dapat memenuhi beberapa persyaratan diantaranya pajak daerah tidak boleh bertentangan atau harus searah dengan kebijaksanaan pemerintah pusat. Davey (1988 : 39) merumuskan pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dengan pengaturan dari daerah sendiri. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak daerah adalah pajak negara yang diserahkan kepada daerah untuk dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik.

Gambaran mengenai perkembangan Pajak Daerah Kabupaten Jember tahun 1995/1996–tahun 2002 dapat diketahui dari besaran target dan realisasi Pajak Daerah tiap tahun dalam tabel berikut :

TABEL 17 TARGET DAN REALISASI PAJAK DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 1995/1996- tahun 2002 (dalam ribuan rupiah dan persen)

TAHUN	TARGET (Rp. 000,-)	REALISASI	
		NILAI (Rp. 000,-)	PERTUMBUHAN (%)
95/96	2,619,967	2,858,947	-
96/97	3,270,921	3,450,200	20,68
97/98	3,594,300	3,600,844	4,36
98/99	3,222,161	3,699,583	2,74
99/00	4,430,000	5,408,902	46,2
2000	4,358,300	4,015,314	-25,76
2001	6,670,000	7,161,839	78,36
2002	6,325,500	9,795,713	36,78
RATA-RATA			23,34

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember tahun 2002

Tabel diatas menunjukkan pertumbuhan realisasi Pajak Daerah Kabupaten Jember dari tahun anggaran 1995 / 1996- tahun 2002 rata-rata mengalami pertumbuhan sebesar 23,34 %. Artinya pertumbuhan realisasi Pajak daerah Kabupaten Jember selama tahun 1995/1996- tahun 2002 dari tahun ketahun diatas 10 % (pertumbuhan rata-rata 23,34 %). Persentase pertumbuhan realisasi Pajak Daerah tertinggi terjadi pada tahun 2001 sebesar 78,36 % dan terendah terjadi pada tahun 2000 sebesar -25,76%.

Pertumbuhan terendah pada tahun 2000 disebabkan karena adanya perubahan format tahun anggaran baik APBN atau APBD. Sebelum tahun anggaran 2000, format anggaran dimulai 1 April diakhiri tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Dan terhitung sejak tahun 2000 format anggaran dimulai tanggal 1 Januari dan diakhiri tanggal 31 Desember tahun yang sama. Jadi pada tahun 2000 anggaran praktis dilaksanakan 9 bulan, yaitu 1 April sampai dengan 31 Desember tahun 2000.

Gambaran tentang perkembangan proporsi pajak daerah terhadap total penerimaan daerah tahun 1995/1996-tahun 2002 akan dijelaskan dalam tabel berikut :

TABEL 18 PERKEMBANGAN PROPORSI SUMBER / KOMPONEN PAJAK DAERAH TERHADAP TOTAL PENERIMAAN DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 1995/1996- tahun 2002 (dalam persen)

Tahun	PAJAK DAERAH thd PEN. TOTAL	
	PROPORSI (%)	PERTUMBUHAN (%)
95/96	6,22	
96/97	6,11	-1,79
97/98	6,14	0,5
98/99	2,36	-61,6
99/00	2,66	12,85
2000	1,9	-28,65
2001	1,49	-21,46
2001	1,76	18,33
Rata-rata	3,58	-11,7

Sumber : Tabel 13 dan 10 diolah

Pada tabel menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah terhadap total penerimaan daerah selama tahun 1995/1996- tahun 2002 rata-rata proporsinya sebesar 3,58 %, dengan pertumbuhan proporsi rata-rata -11,73 % Artinya pertumbuhan dari tahun ketahun kontribusi pajak daerah terhadap total penerimaan kabupaten Jember selama tahun 1995/1996- tahun 2002 dibawah 10 %. Persentase pertumbuhan proporsi terendah – 61,6 % terjadi pada tahun 1998/1999, sedangkan tertinggi sebesar 18,33 % terjadi pada tahun 2002.

Berdasarkan data-data diatas bahwa dari realisasi Pajak daerah bila dirata-rata terjadi pertumbuhannya diatas 10 % tiap tahunnya (tabel 18) dan juga proporsi terhadap PAD diatas 10 % (tabel 16) selama delapan tahun terakhir. Namun peningkatan realisasi pajak daerah dan jumlah proporsi terhadap PAD yang lebih dari 10 % jika dikaitkan dengan total penerimaan daerah tiap tahunnya, realisasi pajak daerah ternyata hanya mampu memberikan kontribusi terhadap total penerimaan daerah kurang dari 10 % tiap tahunnya. Bahkan selama delapan tahun terakhir peran pajak daerah terhadap total penerimaan cenderung menurun hal itu bisa dilihat dari pertumbuhan proporsi terhadap total penerimaan yang besarnya -11,7 %.

4.4.2 Penerimaan PAD dari Sektor Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Jember Tahun 1995/1996-tahun 2002

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial, hal ini tergantung dengan besar kecilnya jasa layanan yang diberikan oleh daerah yang bersangkutan. Kaho (1997 : 158) berpendapat bahwa retribusi merupakan sektor sumber utama, tingginya pendapatan daerah dari sektor retribusi antara lain disebabkan karena hampir semua retribusi dapat dipungut.

Obyek Retribusi terdiri dari : a) Jasa Umum; b) Jasa Usaha; c) Perizinan tertentu. Retribusi dibagi dalam tiga golongan : a) retribusi jasa umum; b) retribusi jasa usaha ; c) retribusi perizinan tertentu. Besarnya retribusi yang terhutang dihitung berdasarkan : a) tingkat penggunaan jasa; dan b) tarif retribusi. Pada UU No. 34 tahun 2000, jenis retribusi air, pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan, serta retribusi bahan galian golongan C dikategorikan sebagai pajak.

Adapun jenis Retribusi yang dipungut oleh pemerintah Kabupaten Jember adalah : retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pasar grosir dan pertokoan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi tempat penitipan anak, retribusi tempat penggrahan, retribusi penyedotan kakus, retribusi rumah potong hewan, retribusi tempat pendaftaran kapal, retribusi tempat rekreasi dan olah raga, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi penggantian biaya cetak KTP dan akta catatan sipil, retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, retribusi parkir di tepi jalan umum, retribusi pasar, retribusi air bersi, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemadam kebakaran, retribusi pengguna barang cetak peta, retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi penyebrangan diatas air, retribusi penolahan limbah air, retribusi penjualan produk usaha daerah, retribusi izin penggunaan tanah, retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, retribusi izin gangguan, retribusi izin trayek, retribusi izin pengambilan hasil hutan, retribusi jasa tunggu, retribusi penggunaan jalan kabupaten.

Gambaran mengenai perkembangan Retribusi Daerah Kabupaten Jember tahun 1995/1996–tahun 2002 dapat diketahui dari besaran target dan realisasi Retribusi Daerah tiap tahun dalam tabel berikut :

TABEL 19 TARGET DAN REALISASI RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 1995/1996-tahun 2002 (dalam ribuan rupiah dan persen)

TAHUN	TARGET (Rp. 000,-)	REALISASI	
		NILAI (Rp. 000,-)	PERTUMBUHAN (%)
1995/1996	5,861,100	5,784,301	-
1996/1997	6,617,819	6,124,765	5,89
1997/1998	7,611,423	6,965,318	13,72
1998/1999	9,338,953	10,523,147	51,1
1999/2000	11,371,032	11,239,034	6,80
2000	9,537,952	9,195,041	-18,19
2001	13,546,596	14,086,001	53,19
2002	17,269,769	21,184,232	50,39
RATA-RATA			23,26

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah dan BPS Kabupaten Jember tahun 2002

Tabel diatas menunjukkan pertumbuhan realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Jember dari tahun anggaran 1995 / 1996- tahun 2002 rata-rata mengalami pertumbuhan sebesar 23,26 %. Artinya pertumbuhan realisasi Retribusi daerah Kabupaten Jember selama tahun 1995/1996- tahun 2002 dari tahun ketahun diatas 10 % (pertumbuhan rata-rata 23,26 %). Persentase pertumbuhan realisasi Retribusi Daerah tertinggi terjadi pada tahun 2001 sebesar 53,19 % dan terendah terjadi pada tahun 2000 sebesar -18,19 %.

Gambaran tentang perkembangan proporsi pajak daerah terhadap total penerimaan daerah tahun 1995/1996 -tahun 2002 akan dijelaskan dalam tabel berikut :

TABEL 20 PERKEMBANGAN PROPORSI SUMBER/KOMPONEN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP TOTAL PENERIMAAN DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 1998/1999- tahun 2002 (dalam persen)

Tahun	RETRIBUSI DAERAH thd PEN. TOTAL	
	PROPORSI (%)	PERTUMBUHAN (%)
1995/1996	12,59	-
1996/1997	10,85	-13,83
1997/1998	11,88	9,51
1998/1999	6,70	-43,5
1999/2000	5,53	-17,55
2000	4,35	-21,37
2001	2,93	-32,54
2002	3,82	30,10
Rata-rata	7,32	-12,75

Sumber : Tabel 13 dan diolah

Pada tabel menunjukkan bahwa kontribusi retribusi daerah terhadap total penerimaan daerah selama tahun 1995/1996- tahun 2002 rata-rata proporsinya sebesar 7,32 %. Dengan pertumbuhan proporsi rata-rata -12,75 %, artinya pertumbuhan dari tahun ketahun kontribusi pajak daerah terhadap total penerimaan kabupaten Jember selama tahun 1995/1996- tahun 2002 dibawah 10 %. Persentase pertumbuhan proporsi terendah – 32,54 % terjadi pada tahun 2001, sedangkan tertinggi sebesar 30,10 % terjadi pada tahun 2002.

Berdasarkan data-data diatas bahwa dari realisasi retribusi daerah bila dirata-rata terjadi peningkatan diatas 10 % (tabel 20) tiap tahunnya selama delapan tahun terakhir. Bila dikaitkan dengan total penerimaan daerah peningkatan realisasi retribusi daerah 10 % tiap tahunnya ternyata hanya mampu memberikan kontribusi kurang dari 10 % tiap tahunnya terhadap pembiayaan pemerintahan di daerah. Bahkan selama delapan tahun terakhir peran retribusi daerah terhadap total penerimaan cenderung menurun hal itu bisa dilihat dari pertumbuhan proporsi terhadap total penerimaan yang besarnya –12,75 %.

Hal ini menunjukkan bahwa baik hasil pajak maupun retribusi daerah selama tahun 1995/1996-tahun 2002 kurang memberikan kontribusi yang nyata terhadap kemampuan otonomi fiskal daerah. Ini berarti sesuai dengan pendapat Radianto, (1997:42) bila pemerintah daerah ingin secara finansial bersifat independen (otonomi dalam fiskal) terhadap pemerintah pusat maka harus sebanyak mungkin menggali sumber PAD salah satunya adalah pajak daerah dan retribusi daerah.

4.3 Analisis Regresi Berganda

Analisis ini digunakan untuk menghitung besarnya pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah sumber-sumber PAD Kabupaten Jember dari hasil pajak daerah dan hasil retribusi daerah sedangkan variabel terikatnya adalah kemampuan otonomi fiskal yang diukur dengan Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah (DDFD) kabupaten Jember. Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan software SPSS versi 10.0, diperoleh hasil seperti nampak pada tabel berikut ini :

TABEL 21 ANALISIS REGRESI LINIER BERGANDA

Variabel	Koefisien Regresi	t _{hitung}	Significant t
Constanta	7,505	3,217	0,024
Hasil Pajak daerah (X1)	0,319	0,296	0,779
Hasil Retribusi daerah (X2)	1,506	1,471	0,201
R ²	0,857		
F _{hitung}	6,941		
N	5		

Sumber : Lampiran 2 , Analisis Regresi, SPSS Versi 10.0

Berdasarkan hasil perhitungan lampiran 2, maka model regresi linier berganda adalah sebagai berikut :

$$Y = 7,505 + 0,319 X_1 + 1,506 X_2 + e$$

(2,333) (1,080) (1,023)

Angka dalam kurung menunjukkan nilai Standart error (SE)

4.3.1 Analisa Hasil

4.3.1.1 Koefisien Determinasi Berganda (R^2)

Untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel hasil pajak daerah dan retribusi daerah terhadap kemampuan otonomi fiskal daerah secara bersama-sama digunakan analisis koefisien determinasi berganda.

Dari gambaran tabel diketahui, nilai koefisien determinasi (R^2) dari hasil regresi adalah sebesar 0,735. Ini berarti, bahwa 73,5 % kemampuan otonomi fiskal daerah dapat dijelaskan oleh faktor hasil pajak daerah dan retribusi daerah. Sedangkan sisanya sebesar 26,5 % dijelaskan oleh faktor lainnya yang tidak dimasukkan dalam model ini.

4.3.1.2 Pengujian Hipotesis Koefisien Regresi Secara Simultan Dengan Uji F

Pengujian hipotesis dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas, yaitu hasil pajak daerah (X_1) dan hasil retribusi daerah (X_2) terhadap kemampuan otonomi fiskal daerah (Y) secara bersama-sama, melalui perhitungan komputer (lampiran 2) adalah sebagai berikut :

1. $H_0: \beta_1 = 0$, artinya bahwa variabel bebas (hasil pajak daerah dan hasil retribusi daerah) secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap kemandirian fiskal daerah .
2. $\alpha = 0,05$
3. H_0 ditolak bila $F_{hitung} > F^{\alpha/2}$ atau $F_{hitung} < -F^{\alpha/2}$
 H_0 diterima bila $-F_{tabel} < F_{hitung} < F_{tabel}$
4. F_{tabel} dengan $\alpha = 0,05$, $df_1 = 2$, $df_2 = 5$ (lampiran 2) yaitu 5,79 (lampiran 3)

$F_{hitung} = 6,941$ (lampiran 2)

5. Oleh karena $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($6,941 > 5,79$) maka berarti bahwa variabel bebas (hasil pajak daerah dan hasil retribusi daerah) secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian fiskal daerah. Hal ini berarti bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel hasil analisis sebagai berikut :

TABEL 22 RANGKUMAN HASIL PENGUJIAN VARIABEL BEBAS SECARA SIMULTAN

Independen	dependent	R ²	Nilai F _{hitung}	Nilai F _{tabel}	Prob Sig.	Kesimpulan
Hasil Pajak daerah (X1) Hasil Retribusi daerah (X2)	Kemandirian fiskal daerah (DDFD) (Y)	0,857	6,941	6,61	0,36	Signifikan

Sumber : Analisa Regresi, lampiran 2

4.3.1.3 Pengujian koefisien Regresi Secara Individu Dengan Uji t

Pengujian ini digunakan untuk menguji pengaruh secara parsial masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Caranya adalah dengan membandingkan antara nilai t_{hitung} dengan nilai t_{tabel} , pada tingkat signifikansi yang diharapkan adalah 0,05 atau 5 % atau *confidence interval* 95 % untuk uji t dua arah (*two tail test*), atau membandingkan probabilitas dengan tingkat signifikansi (α) yang digunakan. Jika probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikansi (α) yang digunakan yaitu $\alpha = 0,05$, maka variabel bebas tersebut memiliki pengaruh secara signifikan (nyata) terhadap variabel terikat

Hasil pengujian terhadap masing-masing variabel yaitu hasil pajak daerah dan retribusi daerah terhadap kemampuan otonomi fiskal daerah adalah sebagai berikut :

1. Pengujian koefisien regresi variabel hasil pajak daerah (X₁)

- a. Dengan merumuskan hipotesis sebagai berikut

$H_0 : \beta_1 = 0$, artinya bahwa hasil pajak daerah tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian fiskal daerah.

$H_1 : \beta_1 \neq 0$, artinya bahwa hasil pajak daerah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian fiskal daerah

b. $\alpha = 0,05$

c. H_0 diterima bila $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $-t_{hitung} > t_{tabel}$

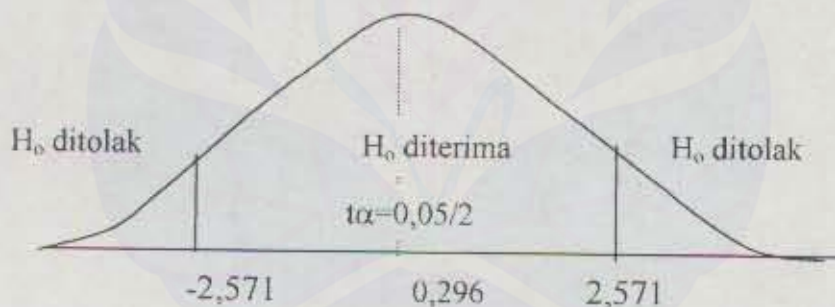
H_0 ditolak bila $t_{tabel} < t_{hitung}$ atau $-t_{hitung} < t_{tabel}$

d. t_{tabel} dengan $\alpha/2 = 0,05/2 = 0,025$ dan $df (n-k) = 5$ yaitu 2,571 (lampiran 3) sedangkan $t_{hitung} = 0,296$ (lampiran 2)

e. Oleh karena $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($0,296 < 2,571$), maka berarti bahwa hasil pajak daerah tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan otonomi fiskal daerah.

f. Berdasarkan hasil regresi probabilitas hasil pajak daerah $P=0,779$ sedangkan $\alpha = 0,05$, artinya probabilitas hasil pajak daerah lebih besar dari 0,05, maka berarti bahwa hasil pajak daerah tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan otonomi fiskal daerah.

Hal ini berarti bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak. Jika digambarkan dalam kurva normal dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Gambar 5 : Kurva normal uji hipotesis dua arah variabel hasil pajak daerah dengan uji t

2. Pengujian hipotesis koefisien regresi variabel hasil retribusi daerah (X_2)

a. Dengan merumuskan hipotesis sebagai berikut

$H_0 : \beta_1 = 0$, artinya bahwa hasil retribusi daerah tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan otonomi fiskal daerah.

$H_1 : \beta_1 \neq 0$, artinya bahwa hasil retribusi daerah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan otonomi fiskal daerah.

b. $\alpha = 0,05$

c. H_0 diterima bila $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $-t_{hitung} > t_{tabel}$

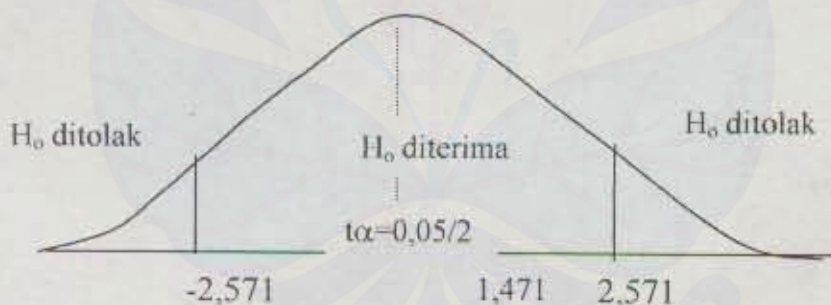
H_0 ditolak bila $t_{tabel} < t_{hitung}$ atau $-t_{hitung} < t_{tabel}$

d. t_{tabel} dengan $\alpha/2 = 0,05/2 = 0,025$ dan $df (n-k) = 5$ yaitu 2,571 (lampiran 3) sedangkan $t_{hitung} = 1,471$ (lampiran 2)

g. Oleh karena $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($1,471 < 2,571$), maka berarti bahwa hasil retribusi daerah tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan otonomi fiskal daerah.

h. Berdasarkan hasil regresi probabilitas hasil retribusi daerah $P=0,201$ sedangkan $\alpha = 0,05$, artinya probabilitas hasil retribusi daerah lebih kecil dari 0,05, maka berarti bahwa hasil retribusi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan otonomi fiskal daerah.

Hal ini berarti bahwa H_0 ditolak, dan H_1 diterima. Jika digambarkan dalam kurva normal dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Gambar 4 : Kurva normal uji hipotesis dua arah variabel hasil retribusi daerah dengan uji t

Jadi berdasarkan hasil analisa diatas, yaitu dengan menggunakan uji t dua arah (*two tailed test*), dapat disimpulkan bahwa variabel hasil pajak daerah secara statistik tidak mempunyai pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap variabel kemampuan otonomi fiskal daerah. Begitupula variabel hasil retribusi daerah secara statistik tidak mempunyai pengaruh yang signifikan secara parsial

terhadap variabel kemampuan otonomi fiskal daerah. Gambaran jelasnya disajikan dalam tabel berikut :

TABEL 23 PERBANDINGAN ANTAR NILAI t_{hitung} DENGAN NILAI t_{tabel} MASING-MASING VARIABEL BEBAS PADA TINGKAT SIGNIFIKANSI 0,025 %

Prediktor	r^2	Nilai t_{hitung}	Nilai t_{tabel}	Prob Sig.	Kesimpulan
Constant	7,505			0,24	
Hasil Pajak daerah (X1)	0,319	0,296	2,571	0,779	Tidak signifikan
Hasil Retribusi daerah (X2)	1,506	1,471	2,571	0,201	Tidak Signifikan

Sumber : Analisa Regresi, lampiran 2

Berdasarkan hasil analisis diatas dari uji hubungan antara variabel bebas (X) dengan variabel terikatnya (Y) terjadi perbedaan antara pengujian secara simultan (bersama-sama), dan secara parsial (sendiri-sendiri). Hal ini menjadi sesuatu yang wajar dengan didasarkan pada pendapat Gujarati (1993 :117), bahwa pengujian parsial menggunakan sampel / data yang independen, artinya pada pengujian parsial antara pengujian X1 / variabel hasil pajak daerah pengujiannya didasarkan sampel / data berbeda dengan pengujian antara X2 / variabel hasil retribusi daerah. Sedangkan pengujian hipotesis secara bersama-sama dengan didasarkan pada sampel / data yang sama.

Hasil pengujian parsial ini juga mempunyai asumsi yang sama juga dengan kenyataan realisasi hasil pajak daerah (tabel 19) dan retribusi daerah (tabel 21) yang tidak mempunyai peran yang bermakna dalam kemampuan otonomi fiskal daerah. Untuk itu dalam mencapai kemandirian fiskal daerah maka hasil pajak dan hasil retribusi masih perlu untuk ditingkatkan kembali.

4.3.2 Pembahasan Hasil Analisis

Pada sub bab terakhir bab IV ini, bagian –bagian yang belum diungkap pada sub bab terdahulu akan dibahas lebih rinci. Bila dalam analisa yang telah dilakukan sebelumnya, uraian diberikan secara kuantitatif maka pada bagian ini, uraian akan diberikan secara kualitatif.

Dari analisa data yang telah dilakukan diketahui, nilai koefisien determinasi (R^2) dari hasil regresi adalah sebesar 0,735. Ini berarti, bahwa 73,5 % kemampuan otonomi fiskal daerah dapat dijelaskan oleh faktor hasil pajak daerah dan retribusi daerah. Sedangkan sisanya sebesar 26,5 % dijelaskan oleh faktor lainnya yang tidak dimasukkan dalam model ini. Nilai ini bila dikaitkan dengan proporsi hasil pajak daerah dan retribusi daerah terhadap penerimaan PAD aktual, tampak bahwa memang kedua faktor ini yang paling dominan dengan persentase rata-rata diatas 20 % (lihat tabel 16).

Dari persentase yang tinggi nilai koefisien determinasi (R^2) hasil regresi adalah sebesar 73,5 %, dapat disimpulkan bahwa sudah sebagian besar faktor – faktor yang berpengaruh terhadap kemandirian fiskal daerah Kabupaten Jember yang sudah dimasukkan dalam model dan dapat dikatakan bahwa persamaan regresi yang dihasilkan sudah cukup baik untuk mengestimasi nilai dari variabel dependen bersangkutan. Hal ini berarti bahwa hasil pajak daerah dan hasil retribusi daerah merupakan sumber-sumber PAD sebagai sumber pembangunan yang potensial mampu memberikan otonomi kepada daerah selama delapan tahun terakhir. Ini berarti bahwa pemerintah daerah sesuai dengan pendapat Radianto (1997 : 42), bila secara finansial ingin bersifat independen terhadap pemerintah pusat maka dengan jalan sebanyak mungkin menggali sumber-sumber PAD seperti pajak dan retribusi.

Pada nilai r^2 diantara variabel independen hasil pajak daerah dan retribusi daerah persentase tertinggi adalah pada retribusi daerah yaitu 150,6 % (1,506) kemudian baru pajak daerah 31,9 % (0,319), hal ini menunjukkan bahwa diantara variabel independen yaitu pajak daerah dan retribusi daerah yang paling dominan dalam mempengaruhi kemampuan otonomi fiskal daerah kabupaten Jember adalah hasil retribusi daerah. Untuk itu benar asumsi bahwa retribusi daerah merupakan sektor sumber utama bagi tingginya pendapatan daerah (Kaho, 1997 : 158). Bila dikaitkan dengan nilai proporsi terhadap PAD aktual bisa dilihat bahwa hasil retribusi daerah mempunyai nilai proporsi tertinggi baru diikuti oleh hasil pajak daerah (lihat tabel 16).

Dari persamaan regresi, koefisien regresi positif mengimplikasikan terjadinya pergeseran yang searah dengan variabel terikat, artinya perubahan pergeseran hasil pajak daerah dan hasil retribusi daerah akan menyebabkan jika terjadi perubahan pergeseran yang searah pada kemandirian fiskal daerah Kabupaten Jember.

Berdasarkan hasil uji hipotesis secara bersama-sama (simultan) antara variabel hasil pajak daerah dengan hasil retribusi daerah. Ini berarti dengan persamaan regresi linier berganda yang diperoleh dari perhitungan data empiris bisa digunakan untuk meramalkan variabel kemandirian fiskal daerah (Y) (Supranto, 1995: 256). Untuk lebih jelasnya pembahasan hasil analisa didasarkan pada setiap variabel bebas dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Hasil pajak daerah (X1)

Hasil pajak daerah merupakan realisasi pajak daerah dalam pendapatan asli daerah yang diukur dalam satuan moneter (rupiah) pertahun.

Pajak daerah sendiri adalah pajak negara yang diserahkan kepada daerah untuk dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik.

Berdasarkan hasil perhitungan statistik hasil pajak daerah dan hasil retribusi daerah secara bersama sama berpengaruh secara signifikan terhadap kemampuan otonomi fiskal daerah kabupaten Jember selama periode 1995/1996-tahun 2002 dengan nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ (6,941 > 5,79). Artinya bahwa hasil persamaan regresi bisa digunakan untuk meramalkan variabel kemandirian fiskal daerah (Y), meskipun secara parsial bahwa hasil pajak daerah tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian fiskal daerah dengan nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ (0,296 < 2,571) dan hasil regresi probabilitas hasil pajak daerah $P=0,779$ sedangkan $\alpha = 0,05$, artinya probabilitas hasil pajak daerah lebih besar dari 0,05.

Dengan koefisien regresi positif sebesar positif 0,319 meng indikasikan hubungan yang positif terhadap variabel kemampuan otonomi fiskal daerah tetapi tidak signifikan. Artinya terdapat hubungan yang searah terhadap variabel terikat, maka dengan menjaga semua variabel yang lain konstan peningkatan 100 % hasil pajak daerah akan menyebabkan terjadinya peningkatan kemampuan otonomi

fiskal daerah sebesar 31,9 %. Bisa dikatakan bahwa naiknya 100 % hasil retribusi daerah akan menyebabkan kemampuan PAD dalam pembiayaan keuangan daerah naik sebesar 31,9 %.

Hasil regresi secara parsial diatas selama delapan tahun terakhir bahwa hasil pajak daerah kurang memberikan makna terhadap kemandirian fiskal daerah merupakan indikasi bahwa selama delapan tahun terakhir hasil pajak daerah mempunyai peran yang lemah terhadap kemandirian fiskal daerah, dan secara riil data bisa dilihat pada kecilnya kontribusi pada total penerimaan daerah (tabel 19). Bahkan kondisi ini nampak sekali pada lima tahun terakhir (lihat tabel 20 dan 21). Salah satu penyebabnya adalah dengan diberlakukannya UU No 18 th 1997 justru menjadikan basis pungutan pajak yang relatif kecil. Jenis-jenis Pajak Daerah yang terdiri dari 7 (tujuh) jenis, antara lain : pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C, pajak parkir.

Bahkan dari ketujuh jenis pajak tersebut yang memberikan kontribusi terbesar hanya komponen/jenis pajak daerah dari Pajak Penerangan Jalan (PPJ) yang hasilnya sejak tahun diberlakukan rata-rata besarnya sekitar 76,39 % (lampiran 1). Hal ini mudah dipahami berdasarkan Perda Kabupaten Jember No. 11 tahun 1998 wajib pajak dari pajak penerangan jalan adalah pemakai jasa/pelanggan PLN.

Pemberlakuan Undang-undang Perpajakan yang baru, UU No. 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, meskipun disana adanya pemberian keleluasaan daerah untuk memungut pajak baru sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan, yang merupakan sisi positif bagi daerah. Namun implikasi secara riil justru mengurangi obyek Pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan yang sangat prospektif dalam pemungutannya selama 3 tahun (lampiran 1). Hal ini karena obyek pajaknya sangat banyak dan sebelum tahun 1999/2000 pajak ini menjadi milik propinsi dan dikembalikan lagi menjadi milik propinsi pada tahun 2002 sehingga pada tahun tersebut penerimaan pajak ini tidak ada.

b. Hasil Retribusi Daerah (X₂)

Hasil retribusi daerah adalah realisasi retribusi daerah dalam pendapatan asli daerah yang diukur dalam satuan moneter (rupiah) pertahun.

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai imbalan atas pemakaian atau manfaat yang diperoleh secara langsung oleh seseorang atau badan atas jasa pelayanan, pekerjaan, pemakaian, barang atau izin yang diberikan oleh pemerintah (Bawazier , 1996: 15). Adapun jenis Retribusi yang dipungut oleh pemerintah Kabupaten Jember adalah : retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pasar grosir dan pertokoan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi tempat penitipan anak, retribusi tempat penggrahan, retribusi penyedotan kakus, retribusi rumah potong hewan, retribusi tempat pendaftaran kapal, retribusi tempat rekreasi dan olah raga, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi penggantian biaya cetak KTP dan akta catatan sipil, retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, retribusi parkir di tepi jalan umum, retribusi pasar, retribusi air bersih, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemadam kebakaran, retribusi pengguna barang cetak peta, retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi penyebrangan diatas air, retribusi penolakan limbah air, retribusi penjualan produk usaha daerah, retribusi izin penggunaan tanah, retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, retribusi izin gangguan, retribusi izin trayek, retribusi izin pengambilan hasil hutan, retribusi jasa tunggu, retribusi penggunaan jalan kabupaten.

Berdasarkan hasil perhitungan statistik secara parsial bahwa hasil retribusi daerah tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan otonomi fiskal daerah dengan nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($1,471 < 2,571$) dan hasil regresi probabilitas hasil pajak daerah $P=0,201$ sedangkan $\alpha = 0,05$, artinya probabilitas hasil pajak daerah lebih besar dari 0,05.

Nilai r^2 diantara variabel independen retribusi daerah persentase tertinggi yaitu 15,06 % (1,506), hal ini menunjukkan bahwa diantara variabel independen hasil retribusi daerah yang paling dominan dalam mempengaruhi kemandirian fiskal daerah kabupaten Jember.

Berdasarkan hasil hitungan regresi secara bersama-sama terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara hasil pajak daerah dan hasil retribusi daerah, sehingga hasil persamaan regresi dari hasil perhitungan bisa digunakan untuk meramalkan variabel kemandirian fiskal daerah.

Dari persamaan regresi dengan koefisien regresi positif sebesar 1,506 yang mengimplikasikan hubungan yang searah terhadap variabel kemampuan otonomi fiskal daerah. Artinya bahwa hasil retribusi daerah mempunyai pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kemampuan otonomi fiskal daerah. Dapat dijelaskan bila dengan menjaga variabel lain konstan, dan melakukan peningkatan sebesar 100 % , maka akan menyebabkan peningkatan 150,6 % kemampuan otonomi fiskal daerah kabupaten Jember. Bisa dikatakan bahwa naiknya 100 % hasil retribusi daerah akan menyebabkan kemampuan PAD dalam pembiayaan keuangan daerah naik sebesar 150,6 %.

Berdasarkan uraian pembahasan diatas bahwa berdasarkan data empiris selama delapan tahun (tahun 1995/1996-tahun 2002) pemerintah Jember dengan melihat pada realisasi penerimaan independennya yaitu hasil pajak daerah dan retribusi daerah mempunyai pengaruh positif terhadap otonomi fiskal daerah, namun secara parsial baik hasil pajak daerah maupun retribusi daerah ternyata tidak signifikan /memberikan makna terhadap otonomi fiskal daerah. Untuk itu peningkatan dan optimalisasi hasil pajak daerah dan hasil retribusi daerah masih diperlukan. Hal ini menegaskan apa yang disampaikan Radianto (1997 : 42), untuk mencapai otonomi fiskal ini berarti pemerintah daerah secara finansial harus bersifat independen terhadap pemerintah pusat dengan jalan sebanyak mungkin menggali sumber-sumber PAD seperti pajak dan retribusi.

Kenyataan hasil penelitian diatas juga sejalan dengan apa yang disampaikan Mahi (2000: 58) bahwa dalam pelaksanaan otonomi daerah PAD belum dimanfaatkan secara maksimal oleh daerah sebagai sumber pembiayaan otonomi daerah, sebab –sebabnya yakni

1. Relatif rendahnya basis pajak dan retribusi daerah dan UU No 18 th 1997, perbaruan dengan UU No. 34 tahun 2000 justru beberapa pajak / retribusi yang ditetapkan untuk daerah memiliki basis pungutan yang

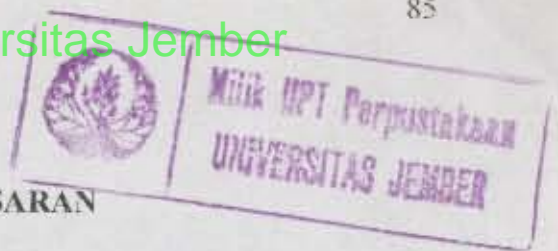
- relatif kecil akibatnya sempitnya basis pajak daerah yang berarti memperkecil manuver keuangan daerah dalam menghadapi guncangan ekonomi seperti krisis ekonomi.
2. Perannya retribusi dan pajak daerah yang tergolong kecil dalam total penerimaan daerah. Karena sebagian besar penerimaan daerah masih berasal dari bantuan pusat. Banyaknya bantuan dan subsidi ini mempengaruhi "usaha" daerah dalam memungut PAD-nya, dan lebih mengandalkan kemampuan "negosiasi" daerah terhadap pusat untuk mendapatkan tambahan bantuan. dari pada upaya optimalisasi pemungutan pajak.
 3. Kemampuan Administrasi pemungutan di daerah yang masih rendah. Hal ini mengakibatkan bahwa pemungutan pajak masih dibebani oleh biaya pemungutan yang besar. PAD masih tergolong memiliki tingkat *buynacy* yang rendah. Salah satu sebabnya adalah peetapan sistem "target" yang kurang tepat dalam pungutan daerah. Sebagai akibatnya upaya pemenuhan target dari sisi pertumbuhan ekonomi sebenarnya pemasukan pajak / retribusi daerah sudah dapat melampaui target yang ditentukan, namun dari pemenuhan untuk pembiayaan pemerintahan daerah masih kurang.

Berkenaan dengan upaya optimalisasi untuk peningkatan hasil hasil pajak daerah dan retribusi daerah adalah dalam bentuk intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan sehingga diharapkan penerimaan hasil retribusi daerah akan dapat lebih berperan. Peran daerah yang satu sisi dihadapkan pada upaya untuk meningkatkan hasil PADnya yang artinya meningkatkan sumber-sumbernya termasuk hasil pajak dan dan retribusi daerah. Namun disisi lain daerah juga dituntut untuk tidak membebani masyarakat daerah dalam peningkatan PADnya. Untuk itu upaya optimalisasi lebih cenderung pada kebijakan dan usaha intensifikasi adalah berupa peningkatan penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah dari sumber-sumber yang telah berjalan selama ini.

Peningkatan penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah harus didukung dengan manajemen keuangan yang baik, menurut pendapat Mardiasmo

(2002:145) “ Manajemen Keuangan ini bisa dilakukan dengan penyederhanaan prosedur administrasi, namun ditingkatkan prosedur pengendalian. Penyederhanaan prosedur ini dimaksudkan untuk kemudahan pelayanan misalnya untuk meningkatkan sumber pajak daerah dan retribusi daerah maka di beri kemudahan dalam pembayarannya.”





BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan disini merupakan gambaran pengaruh hasil pajak daerah dan hasil retribusi daerah yang merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah terhadap kemandirian fiskal daerah. Dalam kaitannya dengan pengaruh tersebut sehingga akan dapat diketahui upaya apa yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten Jember.

Dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari hasil analisa koefisien regresi variabel hasil pajak daerah terhadap kemandirian fiskal daerah selama tahun 1995/1996- tahun 2002 atau delapan tahun terakhir adalah adalah 0,319. Taraf signifikansi adalah sebesar 0,779 yang berarti hasil pajak selama delapan tahun terakhir tidak mempunyai pengaruh yang signifikan/ bermakna terhadap kemandirian fiskal daerah.
2. Dari hasil analisa diketahui koefisien regresi variabel hasil retribusi daerah terhadap kemandirian fiskal daerah selama tahun 1995/1996- tahun 2002 atau delapan tahun terakhir adalah adalah 1,506. Taraf signifikansi adalah sebesar 0,201 yang berarti hasil retribusi daerah selama delapan tahun terakhir tidak mempunyai pengaruh yang signifikan/ bermakna terhadap kemandirian fiskal daerah
3. Dari hasil pengaruh simultan dengan analisa secara simultan diketahui koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,735. Ini berarti bahwa 73,5 % kemandirian fiskal daerah selama delapan tahun terakhir (1995/1996- tahun 2002) dapat dijelaskan oleh hasil pajak daerah dan hasil retribusi daerah dan sisanya 26,5 % dijelaskan oleh faktor yang tidak dimasukkan dalam model ini. Uji hipotesis simultan melalui uji ANOVA terdapat hubungan yang signifikan antara hasil pajak daerah dan hasil retribusi daerah terhadap kemandirian fiskal daerah, dengan taraf signifikansi 0,36. Artinya hasil regresi dapat digunakan untuk meramalkan variabel kemandirian fiskal daerah.

4. Dari koefisien regresi parsial (r^2) diketahui bahwa diantara faktor hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang mempunyai nilai tertinggi adalah retribusi daerah dengan nilai 1,506. artinya bahwa faktor hasil retribusi daerah lebih dominan dari pada faktor pajak daerah.
5. Dari hasil analisa diketahui koefisien regresi variabel hasil pajak daerah sebesar 0,319, yang artinya ada pengaruh yang positif tetapi tidak signifikan dan dari persamaan regresi dapat diramalkan bila hasil pajak daerah dinaikkan sebesar 100 % maka akan terjadi kenaikan pada kemandirian fiskal daerah sebesar 31,9 %.
6. Dari hasil analisa diketahui koefisien regresi variabel hasil Retribusi daerah sebesar 1,506, yang artinya ada pengaruh yang positif tetapi tidak signifikan dan dari persamaan regresi dapat diramalkan bila hasil retribusi daerah dinaikkan sebesar 100 % maka akan terjadi kenaikan pada kemandirian fiskal daerah sebesar 150,6 %.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diberikan saran kepada Pemerintah Kabupaten Jember melalui Dinas Pendapatan Daerah sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Jember untuk menaikkan kemandirian fiskal daerah agar daerah lebih mandiri dalam finansial maka pemerintah kabupaten harus menaikkan sumber Pendapatan Asli Daerah dari pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Pemerintah Kabupaten untuk menaikkan kemandirian fiskal daerah maka pemerintah daerah harus melakukan pengkajian / penelitian kembali mengenai upaya-upaya optimalisasi dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama hasil pajak daerah dan retribusi daerah

DAFTAR PUSTAKA

- Basri, Faisal H , 1995, *Perekonomian Indonesia menjelang Abad XXI : Distorsi, Peluang dan Kendala*, Erlangga, Jakarta
- Booth, Anne, 1993, *Upaya-upaya untuk mendesentralisasikan kebutuhan perpajakan : Masalah kemampuan perpajakan, usaha perpajaka, dan perimbangan keuangan*, , dalam Collin Mac andrews dan Ichlasul Amal (editor) , Rajawali Press, Jakarta.
- Bird, Richard M.dan Vaillancourt F, 2000 , *Desentralisasi Fiskal di Negara-negara Berkembang*, Gramedia, Jakarta
- Citra Umbara , Undang-undang Otonomi Daerah 1999, Bandung
- Davey, Kenneth, 1988, *Pembangunan Pemerintah Daerah*, terjemahan Amanullah, UI Press, Jakarta.
- Devas, Nick dan Davey,1989, *Keuangan Pemerintah Daerah*, terjemahan Amanullah, UI Press, Jakarta
- Djarwanto, 1982, *Statistik Induktif*, BPFE-UGM , Yogyakarta.
- Esmara, Hendra , 1986 , *Perencanaan dan pembangunan di Indonesia*, Gramedia, Jakarta .
- Elmi, Bachrul, 2002, *Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia*, UI Press, Jakarta.
- Gujarati, Damodar, Sumarno Zain(ED), 1999, *Ekonometrika Dasar*, Erlangga, Jakarta.
- Kaho, J. R., 1997, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Pt Rajawali Pers, Jakarta.
- Kamaluddin, Rustian, 1984, *Keuangan Daerah Kotamadya Padang Panjang, profil potensi, dan Pengembangan*, dalam Ekonomi dan Keuangan Indonesia vol XXXII No I, Maret 1984, LPEM- FEUI, Jakarta, Hal 73-88.
- Kansil, C. S. T, 1979, *Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah*, Aksara Baru, Jakarta.
- Kartasmita, Ginanjar,1996, *Pembangunan Untuk Rakyat : Mendukung Pertumbuhan dan Pemerataan*, CIDES, Jakarta
- Mac. Andres, collin, 1995, *Pemerintahan Pusat dan Pembangunan: suatu Tujuan Umum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mardiasmo, 2002, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, ANDI, Yogyakarta

- Nurpratiwi, Ratih, 1989, *Pokok-pokok Administrasi Keuangan Daerah*, Malang, FIA Unibraw.
- Prawiraamidjaja, R.A. Rahman, 1974, *Keuangan Negara dan Kebijakan Fiskal*, Alumni, Bandung
- Sumitro, Rachmat, 1987, *Pajak Bumi dan Bangunan*, PT Erey. Co., Bandung
- Suparmoko, M, 1990, *Keuangan Negara dalam Teori dan praktek*, BPFE-UGM, Yogyakarta.
- Supranto, J, 2001, *Ekonometrik*, Lembaga Penerbit UI, Jakarta
- Sugiyono, 2000, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung
- Sugiyono, 1999, *Metode Penelitian Bisnis*, Alfabeta, Bandung
- Surachmad, Winarno, 1990, *Dasar-dasar dan tehnik Research*, Transito, Bandung
- Tambunan, B.S, 1996, *Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah*, Bina Rena Prawira, Jakarta.
- Tunggal, Hadi Setia, 1999, *Perimbangan Keuangan antara Pembangunan Pusat dan Daerah*, Havarindo, Jakarta.
- Talaolu, Rahman, 1998, *Ferimabangan Keuangan Negara Pusat –Daerah*, Dlm Jurnal Bisnis Dan Ekonomi Politik , Keadilan Pusat dan daerah , INDEF, Jakrta.
- Wijaya, A. W , 1992, *Titik Berat Otonomi Pada Daerah Tingkat II*, Rajawali Press, Jakarta.

Laporan Penelitian, Laporan Tahunan, Jurnal, Majalah, Surat Kabar

- Admosudirdjo, 1970, *Masalah Pembangunan Pemerintahan di Idonesia*, LAN, Jakarta.
- Bawazier, Fuad, 1996, *Pungutan Pada Dunia Usaha, Dalam Seri Kajian Fiskal Moneter*, No 19 / VIII/ 1996, Pusat Pengkajian Fiskal dan Moneter (CFMS), Jakarta, Hal- 5-24.
- Harits, 1995, *Peran administrator Pemerintah daerah*, Prisma No. 4, April 1995, LP3Es, Jakarta, Hal 81-95.

- IbnuRedjo, Samugnyo, 1995, *Pentingnya Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah untuk Otonomi Daerah*, Makalah pada seminar Nasional AIPI XIII, 1-3 November 1995 di Bengkinang, Riau.
- Kuncoro, Mudrajat, 1995, *Desentralisasi Fiskal di Indonesia*, Prisma No 4, April 1995, Jakarta, Hal 3-17.
- Koswara, E, 2000, *Makna Otonomi Daerah Bagian Negara Kepulauan seperti Indonesia dan prospeknya dalam abad 21*, Jurnal Ip, Edisi 10 th 2000, MIPI, Jakarta, Hal 12-27.
- Lains, Alfian, 1985, *Pendapatan daerah dalam ekonomi ORBA*, Prisma, April, 1985, LP3Es, Jakarta, Hal 40-57
- Mahi, Raksasa, 2000, *Prospek desentralisasi di Indonesia Di tinjau dari segi pemerataan antar daerah dan Peningkatan Efisiensi*, Analisis, th XXIX No 1, CSIS, Jakarta. Hal 50-66
- Pontjowinoto, Didiet, 1991, *Alternatif Reformasi kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah*, dalam prisma, no 8, Agustus 1991, LP3ES, Jakarta, Hal 40-60
- Radianto, Elia 1997, *Otonomi Keuangan Daerah Tingkat II : Suatu studi di Maluku*, Prisma, maret 1997, LP3ES, Jakarta. Hal 39 -50
- Syaichu, A, 1996, *Format Idealisme dalam realisasi pungutan Pajak*, LFMS, no 9, Bineka Pariwisata, Jakarta, Hal 43-42.
- Santoso, Bagus, 1995, *Restribusi Pasar sebagai Pendapatan Asli Daerah*, Prisma No 4, April 1995, LP3ES, Jakarta, Hal 19-35
- Sumodiningrat, Gunawan, 1996, *Alternatif strategi Untuk Penerahan Otonomi pada Daerah Tingkat II*, Makalah pada seminar nasional MIPI di Mataram.
- Suwandi, I Made, M. Iksan, 1988, *Otonomi dan Pembangunan daerah di Indonesia*, dalam Jurnal Bisnis dan Ekonomi Politik, INDEF, Jakarta.
- Thoha, Miftah, 1985, *Manajemen Pembangunan Daerah Tingkat II*, dalam Prisma no 12 Th XIV, Hal 25-34.

Wulandari, Anita, 2001, Kemampuan Keuangan Daerah :Studi kasus Kota Jambi
dallam Pelaksanaan Otonomi Daerah, Jurnal Kebijakan Administrasi
Publik, Volume 5 No. 22, UGM, Yogyakarta.

Kompas, Juni 2002

WWW. Pemdajember.go.id



DAFTAR TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN DATA II JEMBER
 TAHUN ANGGARAN 1997/ 1998 DAN TARGET TAHUN ANGGARAN 1998/ 1999.

Halaman : 01.

KODING DAERAH	DAERAH	TAHUN ANGGARAN 1997/ 1998			TARGET
		TARGET	REALISASI	%	TAHUN ANGGARAN 1998/ 1999
1.2+1.3	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	22.007.644.330,00	23.407.096.713,80	106,36	24.491.326.977,00
1.2.	PENDAPATAN ASLI DAERAH SENDIRI	14.201.026.381,00	14.017.304.758,90	98,71	16.060.090.942,00
1.2.1.	PAJAK DAERAH.	3.594.300.000,00	3.600.343.506,00	100,18	3.591.300.000,00
003	Pj. Potong Hewan	35.000.000,00	63.213.500,00	80,25	65.000.000,00
004	Pj. Pembangunan 1	330.000.000,00	302.829.529,00	91,79	300.000.000,00
005	Pj. Radio	30.000.000,00	13.579.000,00	45,26	15.000.000,00
006	Pj. Bangun Aang.	0,00	145.000,00	0,00	0,00
008	Pj. Atas Pertunjukan dan Kerami- an Umum	246.000.000,00	299.311.225,00	75,58	250.000.000,00
009	Pj. Reklame	340.000.000,00	255.070.925,00	104,43	340.000.000,00
010	Pj. Anjing	800.000,00	880.500,00	110,06	800.000,00
012	Pj. Penjualan minuman yang Meng- andung Alkohol	500.000,00	348.000,00	108,00	500.000,00
013	Pj. Kendaraan Tidak Bermotor	75.000.000,00	58.390.500,00	78,12	65.000.000,00
016	Pj. Penerangan Jalan	2.350.000.000,00	2.417.718.777,00	107,45	2.500.000.000,00
019	Pj. Pendaftaran Perumahan	50.000.000,00	50.594.520,00	100,74	50.000.000,00
029	Pj. Pengambilan Sarang Burung	7.000.000,00	3.000.000,00	42,86	5.000.000,00
070	Denda Pajak	0,00	300.000,00	0,00	0,00
1.2.2.	RETRIBUSI DAERAH.	7.611.423.350,00	6.867.387.104,46	91,54	8.914.750.000,00
076	Uang Leger.	92.400.000,00	110.962.674,50	120,09	85.000.000,00
077	Uang Disposisasi Jalan/ Jembatan	365.000.000,00	384.999.296,00	100,00	423.500.000,00
030	Uang Pemeliharaan/ Pembantuan	106.000.000,00	112.314.250,00	105,96	106.000.000,00
051	Uang Sewa Tanah/ Bangunan	31.000.000,00	28.707.840,00	66,80	31.000.000,00
052	Uang Sampadan/ Iklan	310.000.000,00	229.894.387,88	74,16	305.000.000,00
084	Uang Penguburan	400.000,00	351.500,00	87,88	400.000,00
088	Pengujian Kend. Tidak Bermotor	54.000.000,00	26.677.500,00	49,40	30.000.000,00
090	Stasiun Bus dan Taxi	600.000.000,00	591.551.050,00	98,59	600.000.000,00
091	Rumah Sakit dan Balai Pengobatan	2.247.623.350,00	1.741.073.770,00	77,46	3.410.000.000,00
092	Tempat Rekreasi	110.000.000,00	112.469.780,00	102,25	110.000.000,00
094	Pasar	1.240.000.000,00	1.320.798.605,00	106,52	1.364.000.000,00
095	Pesanggrahan	130.000.000,00	130.900.000,00	100,00	140.000.000,00
104	Parkir Kendaraan	600.000.000,00	532.381.100,00	88,73	600.000.000,00
105	Surat Ijin Perumahan Angkutan	27.500.000,00	29.550.500,00	107,46	27.500.000,00
108	Kartu Ternak	61.000.000,00	53.233.800,00	87,27	61.000.000,00
109	Kebersihan	1.100.000.000,00	1.163.447.267,00	105,68	1.100.000.000,00
110	Pendaftaran Kartu Penduduk	0,00	642.400,00	0,00	75.000.000,00
111	Pemberian Honor Kwartir/ Bangunan	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00
112	Penerimaan motor pengangkut orang, sakit dan kereta jenazah.	34.000.000,00	36.344.750,00	106,90	50.000.000,00
114	Sewa Alat-alat Berat	30.000.000,00	10.028.500,00	33,43	30.000.000,00
115	Pengisian Alat Pemadam Api	3.500.000,00	3.076.500,00	87,90	3.500.000,00
116	Peron Terminal Bus	290.000.000,00	270.230.100,00	93,18	290.000.000,00
117	Iuran Pelayanan Irigasi (IPAIR)	142.000.000,00	66.321.914,08	46,71	0,00
119	Ijin Trayak Angkutan	17.000.000,00	21.335.000,00	125,30	17.850.000,00
120	Retribusi Hutan	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00

BAGIAN / POS / AYAT	U R A I A N	TAHUN ANGGARAN 1997/ 1998			TARGET
		TARGET	REALISASI	%	TAHUN ANGGARAN 1998/ 1999
1.2.3.	BAGIAN LADA BADAN USARA MILIK DAERAH.	1.669.413.231,00	1.669.413.231,39	100,00	2.227.787.042,00
128	Pers. Daerah Apotik	11.900.000,00	11.900.000,00	100,00	11.900.000,00
129	Pers. Daerah Patrubumi Argojuro	6.150.000,00	6.150.000,00	100,00	6.765.000,00
132	Pers. Daerah Perkebunan	1.651.363.231,00	1.651.363.231,89	100,00	2.209.122.042,00
1.2.4.	PENERIMAAN DINAS- DINAS.	1.022.960.000,00	1.030.162.393,00	100,70	1.023.253.900,00
145	Dinas Kesehatan Daerah	695.055.000,00	719.634.445,00	103,53	774.878.900,00
146	Dinas Peternakan Daerah	73.375.000,00	65.458.000,00	89,21	73.375.000,00
147	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah	48.000.000,00	48.010.250,00	100,02	48.000.000,00
148	Dinas Perikanan Daerah	5.500.000,00	6.168.910,00	112,16	6.000.000,00
152	Dinas Perkebunan Daerah	121.000.000,00	108.390.788,00	89,58	121.000.000,00
154	Dinas Pasar Daerah	20.000.000,00	82.500.000,00	103,13	0,00
1.2.5.	PENERIMAAN LAIN-LAIN.	303.000.000,00	749.498.523,55	247,36	303.000.000,00
187	Penerimaan sebagian keuntungan dari penyertaan modal (deviden)	60.000.000,00	58.943.250,88	98,24	60.000.000,00
188	Penerimaan sebagian hasil keuntungan Pendayagunaan EPD	200.000.000,00	216.814.014,67	108,41	200.000.000,00
189	Penerimaan Lain-lain	43.000.000,00	473.741.258,00	1101,72	43.000.000,00
3.	BAGIAN BAGI HASIL PAJAK/ DUKAN PAJAK.	7.506.547.760,00	9.389.791.956,90	120,28	8.431.236.035,00
3.1.	BAGIAN HASIL PAJAK :	7.416.472.769,00	9.048.176.785,64	122,00	8.086.219.677,00
191	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	6.294.736.769,00	7.802.333.573,00	123,95	6.340.877.958,00
192	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	1.121.336.000,00	1.244.841.722,14	111,01	1.744.841.719,00
193	Pajak Alat Angkutan di Air	400.000,00	1.001.490,50	250,37	500.000,00
3.2.	BAGIAN HASIL DUKAN PAJAK :	390.075.000,00	341.615.171,26	87,58	345.016.358,00
201	Iuran Hasil Hutan (IHH)	90.000.000,00	49.273.624,06	54,75	90.000.000,00
205	Pemb. Hak atas Tanah Pemerintah	20.000.000,00	45.551.094,00	227,76	20.000.000,00
203	Penerimaan Pertambangan Bahan Golongan C	50.193.000,00	66.982.228,58	133,45	67.715.891,00
209	Iuran tetap Pengambilan Air Tanah (ADT)	228.882.000,00	179.718.224,62	78,52	167.225.467,00
210	Penerimaan Ijin Usaha Kepariwisata Daerah	1.000.000,00	90.000,00	9,00	75.000,00

Jember, April 1998.

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEMBER

Drs. SUDARMAN.

P e m b i n a.
NIP : 010 036 017.

DAFTAR : TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN DATI II JEMBER
TAHUN ANGGARAN 1998/1999 DAN TARGET TAHUN ANGGARAN 1999/2000

URAIAN	TAHUN ANGGARAN 1998/1999			TARGET
	TARGET	REALISASI	%	TAHUN ANGGARAN 1999/2000
3 : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	31.045.171.094,81	37.449.856.177,26	134,95	30.322.078.900,00
: PENDAPATAN ASLI DAERAH SUNGAI	15.583.918.159,81	20.141.358.584,57	128,01	21.158.928.900,00
1 : PAJAK DAERAH	7.522.161.210,00	3.699.583.274,00	114,62	4.250.000.000,00
: Pajak Hotel dan Restoran	225.000.000,00	246.614.931,00	109,61	225.000.000,00
: Pajak Hiburan	150.000.000,00	294.301.210,00	154,90	200.000.000,00
: Pajak Reklame	300.000.000,00	307.408.575,00	102,47	300.000.000,00
: Pajak Penerangan Jalan	2.459.746.760,00	2.802.844.103,00	113,99	3.000.000.000,00
: Pajak Pengambilan dan Pengeluaran bukan Galian golongan C	0,00	0,00	0,00	125.000.000,00
: Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan	0,00	0,00	0,00	400.000.000,00
: Ayat yang menampung Penerimaan Tahun yang lalu	48.414.450,00	48.414.450,00	100,00	0,00
: RETRIBUSI DAERAH	9.330.952.950,00	9.747.888.613,81	104,38	9.554.128.900,00
: Retribusi Pelayanan Kesehatan	5.587.278.900,00	5.939.763.879,00	106,31	6.022.878.900,00
: Retribusi Pelay.Perecepatan	300.000.000,00	283.561.090,00	94,52	300.000.000,00
: Retrib. Pengantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Catatan Sipil	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
: Retrib.Pelay.Pemakaman dan Penguburan Mayat	400.000,00	543.500,00	135,88	500.000,00
: Retrib.Parkir ditepi Jalan Umum	450.000.000,00	455.573.750,00	101,24	450.000.000,00
: Retribusi Pasar	1.431.250.000,00	1.476.426.270,00	103,16	1.500.000.000,00
: Retrib.Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	2.500.000,00	2.904.000,00	82,97	2.500.000,00
: Retrib.Pemakaian Kekayaan Daerah	51.000.000,00	38.941.850,00	76,36	37.000.000,00
: Retrib.Pasar Grosir dan Perkelahan	20.500.000,00	28.546.300,00	139,25	4.000.000,00
: Retribusi Terminal	510.000.000,00	573.265.050,00	112,40	510.000.000,00
: Retrib.Tempat Penginapan (Pengolahan) Villa	140.000.000,00	140.000.000,00	100,00	142.000.000,00
: Retribusi Rumah Potong Hewan	106.000.000,00	109.169.500,00	102,99	106.000.000,00
: Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	120.000.000,00	118.677.550,00	98,90	125.000.000,00
: Retrib.Penjualan Produk Usaha Daerah	115.733.592,00	116.238.092,00	100,44	111.250.000,00
: Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan	205.000.000,00	161.567.275,00	78,81	200.000.000,00
: Retribusi Ijin Gangguan	0,00	0,00		5.000.000,00
: Retribusi Ijin Trayek	17.850.000,00	22.237.000,00	124,58	18.000.000,00
: Ayat yang menampung penerimaan Tahun yang lalu	280.440.507,81	280.440.507,81	100,00	0,00

BAGIAN POS/ AYAT	URAIAN	MILIK SWASTA (1998/1999)			TARGE TAHUN ANG 1999/20
		TARGET	REALISASI	%	
1.2.3.	POS BAGIAN LADA DAERAH USAWA MILIK DAERAH	2.326.422.042,00	2.319.427.650,25	99,70	7.122.300
001	Bank Pembanguna Daerah				
002	Perusahaan Daerah Apotik	85.000.000,00	76.545.607,65	90,05	85.000.
003	Perusahaan Daerah Patra Dumi Argopuro	9.500.000,00	9.500.000,00	100,00	10.300.
004	Perusahaan Daerah Perkebunan	11.000.000,00	11.000.000,00	100,00	12.000.
005	Perusahaan Daerah Pemerahan Susu	2.209.122.042,00	2.209.122.042,60	100,00	7.000.000.
		11.800.000,00	13.260.000,00	112,37	15.000.
2.4.	POS LAIN-LAIN PENDAPATAN	1.036.361.900,00	4.374.492.046,31	390,99	232.500.
009	Jasa Giro				
010	Penerimaan Pengendalian Penelantaran Pohon diluar Kawasaan Hutan	200.000.000,00	263.525.628,93	131,76	200.000.
011	Penerimaan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	2.500.00
013	Ayat yang menampung Penerimaan Tahun yang Lalu	834.966.400,00	4.109.550.917,38	459,18	30.000.00
		1.415.500,00	1.415.500,00	100,00	
3.	BAGIAN BAGI HASIL PAJAK/REKON PAJAK	8.061.253.735,00	12.308.507.592,89	152,69	9.163.150.0
3.1.	POS BAGI HASIL PAJAK	7.741.377.958,00	11.987.564.073,26	154,85	9.163.150.0
01	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)				
02	Bea Pengelolaan Hak atas Tanah dan Bangunan (BBHTB)	6.090.077.958,00	10.772.036.503,00	156,32	6.200.150.00
03	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	0,00	0,00	0,00	463.000.00
04	Ayat yang menampung penerimaan Tahun yang lalu	0,00	0,00	0,00	2.500.000.00
		0,00	0,00	0,00	
		500.000,00	0,00	0,00	
		850.000.000,00	1.215.527.570,26	143,00	
3.2.	POS BAGI HASIL BUKAN PAJAK	319.875.777,00	320.943.519,63	100,33	
	Iuran Hasil Hutan (IHH)				
	Iuran Hasil Pengusaha Hutan (IHPH)	45.000.000,00	40.523.159,74	90,05	0
	Pemberian Hak Tanah Negara	0,00	0,00	0,00	0
	Landrent	0,00	0,00	0,00	0
	Penerimaan dari iuran Eksplorasi / Iuran Eksploitasi / Royalti	0,00	0,00	0,00	0
	Pemberian Hak Atas Tanah	0,00	0,00	0,00	0
	Pemerintah	0,00	0,00	0,00	0
	Tambang C	9.800.777,00	17.094.122,00	174,42	0,
	Iuran Air Bawah Tanah	65.000.000,00	26.011.234,00	40,02	0,
	Pariwisata	200.000.000,00	237.315.003,89	118,66	0,
		75.000,00	0,00	0,00	0,

Jember, April 1999

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEMBER

Rusdiyanto
RUSDIYANTO, SH.

PENATA TINGKAT I
N I P : 510 091 467

DAFTAR : TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN JEMBER
 TAHUN ANGGARAN 2000

BAGIAN POS/ AYAT	URAIAN	TAHUN ANGGARAN 1999/2000			TARGET
		TARGET	REALISASI	%	TAHUN ANGGARAN 2000
1.2+1.3	:PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	:34,392,234,824.98	: 39,524,528,283.61	: 114.92	:24,160,132,967.84
1.2	:PENDAPATAN ASLI DAERAH SENDIRI	:24,378,547,204.72	: 25,611,912,063.76	: 105.06	:15,116,132,967.84
1.2.1	:PAJAK DAERAH	: 4,430,000,000.00	: 5,408,901,874.92	: 122.10	: 3,914,300,000.00
004	:Pajak Hotel dan Restoran	: 240,000,000.00	: 263,195,627.00	: 109.66	: 196,800,000.00
005	:Pajak Hiburan	: 215,000,000.00	: 254,312,537.85	: 118.28	: 177,500,000.00
006	:Pajak Reklame	: 300,000,000.00	: 306,513,480.00	: 102.17	: 200,000,000.00
007	:Pajak Penerangan Jalan	: 3,000,000,000.00	: 3,899,005,028.00	: 129.97	: 2,700,000,000.00
008	:Pajak Pengambilan dan pengelo- :laan bukan Galian Gol. C	: 125,000,000.00	: 129,879,351.07	: 103.90	: 90,000,000.00
009	:Pajak Pemanfaatan Air Tanah :Tanah dan Air Permukaan	: 550,000,000.00	: 555,995,851.00	: 101.09	: 550,000,000.00
1.2.2	:RETRIBUSI DAERAH	:11,371,032,309.89	: 11,239,034,076.01	: 98.84	: 8,674,169,800.00
001	:Retribusi Pelayanan Kesehatan	: 7,819,082,309.89	: 7,600,707,750.01	: 97.21	: 6,081,733,800.00
002	:Retribusi Pelay. Persampahan	: 300,000,000.00	: 106,811,250.00	: 35.60	: 72,000,000.00
003	:Retrib. Pengantian Biaya Cetak :Kartu Tanda Penduduk Catatan :Sipil	: 26,000,000.00	: 35,236,000.00	: 135.52	: 18,000,000.00
004	:Retrib. Pelay. Pemukiman dan :Pengabuan Mayat	: 500,000.00	: 500,500.00	: 100.10	: 400,000.00
005	:Retrib. Parkir dilepi Jalan Umum	: 450,000,000.00	: 510,596,080.00	: 113.47	: 373,500,000.00
006	:Retribusi Pasar	: 1,514,000,000.00	: 1,634,146,980.00	: 107.94	: 1,249,050,000.00
009	:Retrib. Pemeriksaan Alat Pemadam :Kebakaran	: 2,500,000.00	: 2,506,000.00	: 100.24	: 1,875,000.00
012	:Retrib. Pemakaian Kekayaan Daerah	: 47,000,000.00	: 64,446,520.00	: 137.12	: 35,500,000.00
013	:Retrib. Pasar Grosir dan Perlokoon	: 4,000,000.00	: 1,452,800.00	: 36.32	: 3,000,000.00
014	:Retribusi Terminal	: 510,000,000.00	: 555,998,200.00	: 109.02	: 386,361,000.00
017	:Retrib. Tempat Penampungan (pesang- :grahan) Villa	: 142,000,000.00	: 142,000,000.00	: 100.00	: 97,500,000.00
019	:Retribusi Rumah Polong Nekan	: 106,000,000.00	: 108,792,000.00	: 102.63	: 84,750,000.00
021	:Retrib. tempat Rekreasi dan :Olaraga	: 115,000,000.00	: 127,633,260.00	: 110.99	: 48,000,000.00
024	:Retrib. Penjualan Produksi Usaha :Daerah	: 111,950,000.00	: 114,586,597.00	: 102.36	: 61,750,000.00
026	:Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan	: 200,000,000.00	: 205,564,839.00	: 102.78	: 142,500,000.00
028	:Retribusi Ijin Gangguan	: 5,000,000.00	: 6,615,300.00	: 132.31	: 4,000,000.00
029	:Retribusi Ijin Traysk	: 18,000,000.00	: 21,440,000.00	: 119.11	: 14,250,000.00

13, 68 3


Rp 66 / 2000

PHR :
PH :


1.2.3	: POS BAGIAN LABA BUKAN USAHA MILIK				
	: DAERAH	8,177,514,894.83	8,177,514,894.83	100.00	2,267,130,167.84
1	: 001 : Bank Pembangunan Daerah	0.00			
2	: 002 : Perusahaan Daerah Apotik	10,300,000.00	10,300,000.00	100.00	11,100,000.00
3	: 003 : Perusahaan Daerah Patra Bumi	12,000,000.00	12,000,000.00	100.00	13,000,000.00
	: Argopuro				
4	: 004 : Perusahaan Daerah Perkebunan	8,140,214,894.83	8,140,214,894.83	100.00	2,231,538,167.84
5	: 005 : Perusahaan Daerah Peverahan Susu	15,000,000.00	15,000,000.00	100.00	11,500,000.00
1.2.4	: POS LAIN-LAIN PENDAPATAN	400,000,000.00	786,461,218.00	196.62	260,525,000.00
1	: 009 : Jasa Giro	200,000,000.00	486,696,421.00	243.35	200,000,000.00
2	: 010 : Penerimaan Peneudalian Penebanaan	5,000,000.00	9,914,585.00	198.29	5,525,000.00
	: Pohon diluar kawasan Hutan				
3	: 011 : Penerimaan Lain-lain	120,000,000.00	246,265,798.00	205.22	25,000,000.00
	: 013 : Iuran Pelayanan Irigrasi	75,000,000.00	43,584,414.00	58.11	30,000,000.00
1.3	: BAGIAK BAGI HASIL PAJAK/BUKAN PAJAK	10,013,607,620.26	13,912,616,219.85	138.94	9,044,000,000.00
1.3.1	: POS BAGI HASIL PAJAK	9,993,046,000.00	13,849,591,666.48	138.59	9,024,000,000.00
001	: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	7,215,246,000.00	10,841,278,001.00	150.26	6,699,000,000.00
002	: Bea Pengelolaan Hak Atas Tanah dan	277,000,000.00	439,537,277.00	158.22	325,000,000.00
	: Bangunan (BBHTD)				
003	: Pajak Bahan Bakar Kendaraan	2,500,000,000.00	2,568,776,388.48	102.75	2,000,000,000.00
	: Bermotor (PBBKB)				
005	: Pajak Angkutan Dalam Air				
	: Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor				
	: [P K B]				
1.3.2	: POS BAGI HASIL BUKAN PAJAK	20,641,620.26	63,024,553.37	305.33	20,000,000.00
001	: Iuran Hasil Hutan (IHH)				
002	: Iuran Hasil Pengusaha Hutan (IHPH)	20,641,620.26	63,024,553.37	305.33	20,000,000.00
003	: Penberiaan Hak Tanah Negara	0.00			
004	: Landrent	0.00			
005	: Penerimaan dari Iuran Eksplorasi /	0.00			
	: Iuran Eksploitasi / Royalt	0.00			
	: Pemberian Hak Atas Tanah				
	: Pemerintah				
	: Tambang C				
	: Iuran Air Bawah Tanah				
	: Pariwisata				

Jember, April 2000

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN JEMBER.


RUSDIYANTO, SH.

PENATA TINGKAT I
NIP : 510 091 467



 PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

 DINAS PENDAPATAN DAERAH

JL. A. YANI NO. 4 TELP. 484935 JEMBER

DAFTAR TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH

 KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2000

BAGIAN POS/ AYAT	URAIAN	TAHUN ANGGARAN 2000			TARGET TAHUN ANGGARAN 200
		TARGET	REALISASI	%	
1.2 + 1.3	PENDAPATAN ASLI DAERAH	26.338.311.284,84	32.456.805.236,91	123,23	45.697.646.000,0
1.2	PENDAPATAN ASLI DAERAH SENDIRI	16.984.311.284,84	18.478.604.507,61	92,02	23.127.646.000,0
1.2.1	PAJAK DAERAH	4.358.300.000,00	4.015.313.691,77	92,13	6.670.000.000,0
004	Pj. Hotel dan Restoran	205.800.000,00	213.502.675,00	103,74	260.000.000,0
005	Pj. Hiburan	179.500.000,00	180.794.493,30	101,86	215.000.000,0
006	Pj. Reklame	210.000.000,00	225.767.525,00	107,51	300.000.000,0
007	Pj. Pencerangan Jalan	3.100.000.000,00	2.610.801.928,00	84,22	5.200.000.000,0
008	Pj. Pengambilan & Pengelolaan Bahan Galian Golongan C	90.000.000,00	107.045.629,47	118,94	95.000.000,00
009	Pj. Pemanf. Air Bawah Tanah dari Permukaan	575.000.000,00	677.401.441,00	117,81	600.000.000,00
1.2.2	RETRIBUSI DAERAH	9.537.952.001,00	9.195.041.100,00	96,40	13.546.596.000,00
001	Ret. Pelayanan Kesehatan	6.681.766.001,00	6.110.240.446,00	91,45	9.415.000.000,00
002	Ret. Pelayanan Persampahan	72.000.000,00	56.694.400,00	78,74	72.000.000,00
003	Ret. Peng. Biaya Cetak KTP & Akte Catatan Sipil	18.000.000,00	26.242.000,00	145,79	20.000.000,00
004	Ret. Pelayanan Pemakaman & Pengabuan Mayat	400.000,00	396.000,00	99,00	500.000,00
005	Ret. Parkir di Tepi Jalan Umum	388.000.000,00	403.490.180,00	103,99	510.596.000,00
006	Ret. Pasar	1.249.050.000,00	1.317.383.945,00	105,47	1.800.000.000,00
008	Ret. Pemeriksaan Alat Kebakaran	1.875.000,00	1.900.000,00	101,33	1.500.000,00
012	Ret. Pemakaian Kelayaan Daerah	47.500.000,00	51.269.313,00	107,94	67.000.000,00
013	Ret. Pasar Grosir dan Petokoan	3.000.000,00	4.010.000,00	133,67	10.000.000,00
014	Ret. Terminal	396.361.000,00	399.171.300,00	100,71	525.000.000,00
017	Retribusi Tempat Penginapan Pesanggrahan/Villa	97.500.000,00	98.000.000,00	100,51	172.500.000,00
019	Ret. Rumah Potong Hewan	84.750.000,00	85.098.000,00	100,41	113.000.000,00
021	Ret. Temp. Rekreasi & Olah Raga	48.000.000,00	54.757.450,00	114,08	128.000.000,00
024	Ret. Penjualan Prod. Ush. Daerah	0,00	0,00	0,00	47.500.000,00
026	Ret. Ijin Mendirikan Bangunan	155.000.000,00	250.630.566,00	161,70	205.000.000,00
028	Retribusi Ijin Gangguan	5.000.000,00	3.868.200,00	77,36	6.000.000,00
029	Ret. Ijin Trayek	14.750.000,00	18.232.500,00	123,61	18.000.000,00
031	Ret. Jasa Tunggu	275.000.000,00	313.656.800,00	114,06	435.000.000,00

Pd/PAD = 30,49 %

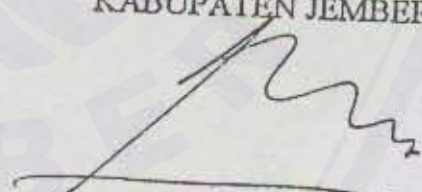
Pj/PO = 16,45 %

Kontribusi Pj Pd :

1.2.3	POS BAGI LABA BADAN USAHA MILIK DAERAH	2.267.138.167,84	2.262.638.167,84	99,80	2.318.050,0
002	Perusahaan Daerah Apotik	11.100.000,00	11.100.000,00	100	11.900,0
003	PD. Patra Bumi Argo Puro	13.000.000,00	13.000.000,00	100	13.000,0
004	PD. Perkebunan	2.231.538.167,84	2.231.538.167,84	100	2.250.000,0
005	PD. Pemerahan Susu	11.500.000,00	7.000.000,00	60,87	18.150,0
007	PD. Air Minum (PDAM)	0,00	0,00	0,00	25.000,0
1.2.4	POS LAIN - LAIN PENDAPATAN	820.921.116,00	1.005.611.548,00	122,50	593.000,00
002	Jasa Giro	200.000.000,00	389.560.089,00	194,78	500.000,00
010	Pener. Pengendalian Penebangan Pohon Di luar Kawasan Hutan	6.500.000,00	6.802.070,00	104,65	8.000,00
011	Penerimaan Lain-lain	584.421.116,00	568.239.826,00	97,23	25.000,00
012	Ijin Pelayanan Higasi (JPATR)	30.000.000,00	41.009.563,00	136,70	60.000,00
1.3	BAG. DANA PERIMBANGAN	9.354.000.000,00	15.979.200.729,30	170,82	22.570.000,00
1.3.1	POS BAGI HASIL PAJAK	9.334.000.000,00	15.837.475.928,73	169,68	22.470.000,00
001	Pjk. Bumi dan Bangunan	7.009.000.000,00	12.694.005.203,00	181,11	20.000.000,00
002	Bea Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan (BPHTB)	325.000.000,00	473.771.363,00	145,78	470.000,00
003	Pjk. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	2.000.000.000,00	2.669.699.362,73	133,48	2.000.000,00
1.3.2	BAGI HASIL BUKAN PIK SUMBER DAYA ALAM	20.000.000,00	140.724.800,57	703,62	100.000.000
001	Iuran Hasil Hutan (IHH)	20.000.000,00	73.972.810,82	369,86	50.000.000
003	Pemberian Hak Atas Tanah Negara	0,00	66.751.989,75	--	50.000.000

Jember, April 2001

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN JEMBER


RUSDIYANTO, SII

Penata Tingkat I
NIP. 510 091 467

30 DESEMBER SESUDAH P.A.K

Habman : 01

KATEGORI	JENIS PAJAK / RETRIBUSI	ANGGARAN	REALISASI - PENERIMAAN				KETERANGAN	
			%	1/2 BULAN LALU	BULAN INI	S/D EULAI INI	%	KURANG
BAGIAN 1.2. PENC. ASLI DAERAH								
POS 1.2.1. PAJAK DAERAH								
	Pajak Hotel dan Restoran	300.000.000,00	308.411.400,00	26.678.950,00	335.090.350,00	112,03	0,00	36.090.350,00
	Pajak Hiburan	150.000.000,00	1.133.693,00	3.502.800,00	114.539.293,00	74,36	35.460.707,00	0,00
	Pajak Reklame	305.000.000,00	300.299.500,00	13.534.500,00	373.631.000,00	102,36	0,00	8.631.000,00
	Pajak Penerangan	1.400.000.000,00	630.656.200,00	504.343.472,00	8.863.905.672,00	164,09	0,00	3.400.905.672,00
	Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Cokong C.	110.500.000,00	78.346.848,00	32.200.000,00	113.546.848,00	100,04	0,00	46.848,00
	JUMLAH POS 1.2.1	3.315.500.000,00	5.275.453.641,00	560.756.522,00	9.793.713.163,00	154,86	35.460.707,00	3.505.673.670,00
POS 1.2.2. RETRIBUSI DAERAH								
Retribusi Pelayanan Kesehatan								
	a. RSUD	1.672.000.000,00	11.710.514.346,00	852.272.854,00	12.562.688.200,00	129,89	0,00	2.890.888.200,00
	b. PHB	203.942.700,00	702.337.500,00	0,00	762.037.500,00	193,44	0,00	368.094.800,00
	c. Ambulans	102.000.000,00	122.320.650,00	10.146.300,00	133.066.950,00	130,48	0,00	31.066.950,00
	d. Dkes	1.910.743.000,00	17.900.235.830,00	862.420.154,00	13.457.992.650,00	132,36	0,00	3.290.049.950,00
	e. PHB	194.500.000,00	105.337.203,00	3.758.280,00	83.295.483,00	54,60	5.104.517,00	0,00
	f. LABHE3DA	105.000.000,00	106.329.000,00	4.600.000,00	73.029.000,00	107,74	0,00	5.029.000,00
		2.070.245.000,00	19.420.302.133,00	129.506.030,00	2.072.111.163,00	101,09	5.104.517,00	8.969.680,00
		12.238.183.700,00	14.518.174.029,00	991.925.184,00	15.533.103.813,00	126,90	5.104.517,00	3.207.019.630,00

Habman : 03

KATEGORI	JENIS PAJAK / RETRIBUSI	ANGGARAN	REALISASI - PENERIMAAN				KETERANGAN	
			%	1/2 BULAN LALU	BULAN INI	S/D EULAI INI	%	KURANG
Retribusi Pasar Grogol / Ferokohan								
	Tempat Pelebaran Ikan	10.500.000,00	4.953.250,00	5.097.000,00	10.550.250,00	100,48	0,00	50.250,00
	Pemukiman Kinc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.500.000,00	4.953.250,00	5.097.000,00	10.550.250,00	100,48	0,00	50.250,00
Retribusi Tempat								
	Retribusi Tempat Khusus Pakar	525.000.000,00	490.183.150,00	49.474.300,00	531.157.450,00	100,98	0,00	5.157.450,00
	Retribusi Tempat Perdagangan Asah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Retribusi Tempat Penanganan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rembangan								
	Kabarengung	110.000.000,00	79.300.000,00	31.000.000,00	110.000.000,00	100,00	0,00	0,00
		73.700.000,00	40.300.000,00	15.600.000,00	55.000.000,00	74,63	18.700.000,00	0,00
		183.700.000,00	119.600.000,00	46.600.000,00	165.000.000,00	89,82	18.700.000,00	5.157.450,00
Retribusi Penyediaan Kalkas								
	Retribusi Rumah Potong Hewan	114.000.000,00	56.280.000,00	20.797.000,00	116.083.000,00	101,83	0,00	2.083.000,00
	Retribusi Tempat Pelebaran Kapal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Retribusi Tempat Relisasi dan Olah Raga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kategori Lain								
	Pemukiman	12.500.000,00	12.558.000,00	50.000.000,00	82.558.000,00	101,07	0,00	58.000,00
	Pemukiman	19.500.000,00	34.801.000,00	18.600.500,00	53.267.500,00	102,16	0,00	1.067.500,00
	Pemukiman	8.000.000,00	4.300.000,00	4.500.000,00	3.500.000,00	103,25	0,00	500.000,00
	Pajak	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
		130.000.000,00	73.459.000,00	70.166.500,00	144.125.500,00	102,95	0,00	4.125.500,00

KRYAT	JENIS PAJAK / RETRIBUSI	RAGISARAN	PELAKSANAAN - PENERIMAAN				KETERANGAN	
			PER BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI	%	KURANG	LEBIH
022	Retribusi Penyediaan di atas air	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Retribusi Pengalihan Limbah Air	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Retribusi Perijinan Usaha Daerah							
	a. Pungutan Bibit Padi	57.500.000,00	57.500.000,00	0,00	57.500.000,00	100,00	0,00	0,00
	b. Daurasi TR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c. Pungutan Tanah Cinas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d. Budi Daya Ikan	49.875.000,00	44.340.375,00	5.134.625,00	53.075.000,00	100,40	0,00	200.000,00
		107.375.000,00	101.840.375,00	5.134.625,00	107.575.000,00	100,19	0,00	200.000,00
025	Retribusi Izin Pungutan Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025	Retribusi Izin Memerikan Anggaran D P U D	2.750.000,00	2.739.294,00	10.367.899,00	263.135.063,00	97,50	6.864.917,00	0,00
		2.750.000,00	2.739.294,00	10.367.899,00	263.135.063,00	97,50	6.864.917,00	0,00
027	Retribusi Izin Tempat Pengisian Murni Bersih	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028	Retribusi Izin Ganggus	10.000.000,00	9.368.250,00	1.691.500,00	19.759.750,00	107,60	0,00	759.750,00
029	Retribusi Izin Trayak	18.000.000,00	22.311.500,00	2.100.000,00	24.427.500,00	135,71	0,00	6.427.500,00
030	Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Iktidan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	Retribusi Jasa Turgo	435.000.000,00	375.371.400,00	60.185.400,00	435.677.800,00	100,39	0,00	1.377.800,00
032	Retribusi Penggunaan Jalan Kabupaten	450.000.000,00	449.291.500,00	25.974.750,00	475.974.250,00	105,77	0,00	25.974.250,00
	JUMLAH POS : 1.2.3	17.219.781.700,00	15.620.391.055,00	1.563.036.930,00	21.184.232.993,00	122,67	81.376.084,00	3.834.592.327,00

KRYAT	JENIS PAJAK / RETRIBUSI	RAGISARAN	PELAKSANAAN - PENERIMAAN				KETERANGAN	
			PER BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI	%	KURANG	LEBIH
POS : 1.2.3	BAGIAN PERUSAHAAN MILIK DAERAH							
1	Bank Pembangunan Daerah	0,00	874.561.188,52	0,00	874.663.188,52	0,00	0,00	874.563.188,52
2	Perusahaan Daerah							
	a. Bidang I	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	5.700.000,00	100,00	0,00	0,00
	b. Bidang I	2.500.000,00	2.300.000,00	0,00	2.800.000,00	100,00	0,00	0,00
	c. Bidang III	4.200.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	4.200.000,00	100,00	0,00	0,00
		12.400.000,00	10.100.000,00	2.100.000,00	12.700.000,00	100,00	0,00	874.563.188,52
3	Perusahaan Daerah Persepsi Anggur	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	100,00	0,00	0,00
	Perusahaan Daerah Perkebunan	1.200.000,00	710.000,00	550.000,00	1.250.000,00	100,00	0,00	0,00
	Perusahaan Daerah Perikanan Sani	22.000.000,00	1.300.000,00	11.000,00	22.000.000,00	100,00	0,00	0,00
	Perusahaan Daerah Perikanan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Perusahaan Daerah Perikanan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	100,00	0,00	0,00
	JUMLAH POS : 1.2.3	1.312.700.000,00	1.614.261.188,52	563.000.000,00	2.227.363.188,52	164,66	0,00	874.563.188,52
POS : 1.2.4	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH							
	Haci Pungutan Ekang M&B Negar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jasa Gns	1.000.000.000,00	2.014.239.543,57	562.000.809,28	2.576.239.232,85	257,63	0,00	1.576.330.232,85
	Sumbangan Pihak ke III Daerah (TP/IGR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pun Gant Rug Atas Kukuasan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Skt. ke bhin Pem. Kepada (Pihak ke III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Denda Keterlambatan Pelaksanaan Cacran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Angsuran Cicil Peredaran Bermetre	0,00	1.925.000,00	11.000,00	123.750.000,00	0,00	0,00	0,00
	Angsuran Cicil Perumahan Cinas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.750.000,00
	Pungutan Sapi	18.000.000,00	47.381.500,00	40.185.000,00	87.667.500,00	101,94	0,00	1.567.500,00
	Pung. Per. Pohon dua Kawasan Hutan	10.000.000,00	2.354.000,00	65.850,00	12.623.850,00	126,24	0,00	2.623.850,00
	Pencapaian Lain-lain	50.000.000,00	1.348.383.884,00	645.791.298,00	2.011.675.182,00	4.021,75	0,00	1.901.875.182,00
	IPAIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Iuran Pengusaha Tembaku	175.000.000,00	105.391.525,10	2.000.000,00	167.591.525,10	95,77	7.408.474,90	0,00
	Rovelfig Saki Kekeran Bankes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH POS : 1.2.4	1.321.000.000,00	3.724.301.452,67	1.252.000.817,28	4.973.638.209,95	376,75	7.408.474,90	3.663.246.764,65

NO	AYAT	JENIS PAJAK / RETRIBUSI	ANGGARAN	REALISASI - PENERIMAAN			%	KETERANGAN	
				1/2 BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI		KURANG	LEBIH
		BAGIAN 1.3. DANA PERIMBANGAN POS : 1.2.1 BAGI HASIL PAJAK							
1	001	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	11.571.413.139,00	16.377.389.859,00	3.314.925.906,30	19.692.021.765,00	170,18	0,00	6.120.602.626,00
2	002	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	750.000.000,00	1.391.227.935,00	368.415.185,30	1.759.643.120,00	231,62	0,00	1.009.643.120,00
3	003	Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 71	2.500.000.000,00	3.709.290.184,00	1.236.432.726,00	4.945.730.912,00	197,83	0,00	2.445.730.912,00
		Jumlah POS : 1.3.1	14.821.413.139,00	21.477.921.978,00	4.919.773.819,30	26.397.395.797,00	178,10	0,00	11.575.976.658,00
		POS : 1.3.2 BAGI HASIL BUKAN PAJAK SUMBER DAYA ALAM							
001		Iuran Hasil Hutan (IHH) / PSDH	2.26.632.744,00	527.254.528,42	316.443.315,30	844.387.843,42	258,52	0,00	517.765.099,42
002		Iuran Hasil Pengusahaan Hutan (IHPH)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003		Iuran Tolak (Lindrek)	3.853.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004		Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi (Foyati)	3.433.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.858.090,00	0,00
005		Iuran Kuasa Usaha Perambangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.438.700,00	0,00
007		Pungutan hasil Perikanan	659.435.030,00	105.217.884,00	0,00	105.217.884,00	0,00	0,00	105.217.884,00
003		Minyak Bumi	400.000.000,00	110.205.610,00	36.270.004,00	195.475.914,00	40,10	293.524.086,00	0,00
003		Gas Alam	908.000.000,00	606.285.056,00	229.740.163,30	916.031.219,00	100,88	0,00	8.031.219,00
013		Pemberian Hak Tanah Negara	18.263.000,00	39.110.572,00	0,00	33.410.572,00	40,10	58.858.420,00	0,00
011		Bagi Hasil Non-Kayu (Gelut Pinus)	0,00	58.769.850,00	0,00	58.769.850,00	0,00	0,00	58.769.850,00
		Jumlah POS : 1.3.2	7.419.633.564,00	1.577.343.800,42	582.456.402,30	2.163.303.262,42	86,77	359.679.304,00	631.014.202,42
		BAGIAN 1.5 EWS LAIN PENERIMAAN YANG SAH							
		POS : 1.5.2 POS PENERIMAAN DIARI PROVINSI							
001		Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	2.500.000.000,00	3.257.219.110,04	1.330.666.442,29	4.587.882.552,33	183,52	0,00	2.067.882.552,33
002		Pajak Kendaran Bermotor (PKB)	1.501.973.000,00	3.806.382.534,00	0,00	3.806.682.534,00	243,71	0,00	2.244.703.534,00
003		Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBKN)	1.300.000.000,00	5.564.377.946,00	0,00	5.564.677.946,00	428,05	0,00	4.264.577.946,00
004		Pajak Peningkatan ABT	400.000.000,00	321.301.748,00	0,00	321.601.748,00	65,67	158.198.252,00	0,00
		Jumlah POS : 1.5.2	6.501.973.000,00	12.950.379.338,04	1.330.666.442,29	14.281.044.760,33	241,04	158.198.252,00	8.597.264.032,33

AYAT	JENIS PAJAK / RETRIBUSI	ANGGARAN	REALISASI - PENERIMAAN			%	KETERANGAN	
			1/2 BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI		KURANG	LEBIH
	REKAPITULASI							
	Jumlah POS : 1.2.1	1.325.503.000,00	9.215.451.641,00	580.258.522,30	9.795.713.163,00	154,85	0,00	3.470.213.163,00
	Jumlah POS : 1.2.2	17.208.763.100,00	15.610.324.055,00	1.563.336.936,00	21.184.232.963,00	122,67	0,00	3.914.469.293,00
	Jumlah POS : 1.2.3	1.302.700.000,00	1.604.263.188,52	563.000.000,00	2.227.263.188,52	164,66	0,00	874.563.188,52
	Jumlah POS : 1.2.4	1.331.000.000,00	3.724.301.452,67	1.252.036.837,28	4.976.338.289,95	376,75	0,00	3.655.338.289,95
	Jumlah Bagian 1.3	21.268.963.700,00	34.225.112.337,15	3.958.735.297,26	38.184.147.634,47	145,36	0,00	11.915.163.934,47
	Jumlah POS : 1.3.1	14.821.413.139,00	21.477.921.978,00	4.919.773.819,30	26.397.395.797,00	178,10	0,00	11.575.976.658,00
	Jumlah POS : 1.3.2	7.419.633.564,00	1.577.343.800,42	582.456.482,30	2.163.303.262,42	86,77	329.330.261,58	0,00
	Jumlah Bagian 1.5	17.311.272.703,00	22.058.465.778,42	5.502.233.301,00	28.557.699.079,42	164,97	329.330.261,58	11.575.976.658,00
	Jumlah POS : 1.5.2	6.501.973.000,00	12.950.379.338,04	1.330.666.442,29	14.281.044.760,33	241,04	0,00	8.429.065.780,33
	Jumlah Bagian 1.1	6.851.973.000,00	12.950.379.338,04	1.330.666.442,29	14.281.044.760,33	241,04	0,00	8.429.065.780,33
	Jumlah Seluruhan	48.411.963.403,00	70.211.264.453,65	10.791.635.040,57	81.022.891.494,22	163,91	329.330.261,58	31.920.226.372,80

Jember, 24 Februari 2023.

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN JEMBER

Drs. RUFALI
Pembina Tingkat I
NIP. 510 052 613

	JENIS PAJAK / RETRIBUSI	ANGGARAN	REALISASI - PENERIMAAN			%	KETERANGAN	
			S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI		KURANG	LEBIH
02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	100.000.000,00	149.596.530,00	11.874.105,00	161.470.635,00	161,47	0,00	61.470.635,00
03	Retribusi Pengantian E-tajir-Gesak : Kartu Tansi Penduduk/Alta Catatan Sipil	75.000.000,00	130.026.000,00	15.267.500,00	145.293.500,00	194,52	0,00	70.293.500,00
		75.000.000,00	130.320.000,00	15.267.500,00	145.587.500,00	194,52	0,00	70.587.500,00
4	Retribusi Pelayanan Penanaman dan Pengalihan Hak	500.000,00	525.000,00	0,00	525.000,00	105,00	0,00	25.000,00
5	Retribusi Pajak Diprodi Jalan Umum	500.000.000,00	57.334.550,00	32.837.450,00	90.172.000,00	106,92	0,00	30.772.000,00
	Retribusi Pasar							
	a. Pasar Umum	1.815.000.000,00	1.978.576.537,00	161.131.175,00	2.039.707.712,00	114,62	0,00	265.407.712,00
	b. Pasar Hewan	100.000.000,00	93.307.100,00	8.734.000,00	102.041.100,00	102,24	0,00	2.241.100,00
		1.915.000.000,00	2.071.883.637,00	170.865.175,00	2.242.748.812,00	113,98	0,00	267.648.812,00
	Retribusi Air Bersih	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Retribusi Pengujian Peredaran Bermotor	0,00	169.169.750,00	28.037.750,00	197.207.500,00	0,00	0,00	169.207.500,00
	Retribusi Pelayanan Peternakan	2.500.000,00	2.457.000,00	43.000,00	2.500.000,00	100,00	0,00	0,00
	Retribusi Pengantian Barang Cetak Peta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Retribusi Penjualan Kekayaan Daerah							
	a. Sewa Tanah Banjuran	9.000.000,00	7.731.200,00	326.150,00	8.057.350,00	89,53	942.650,00	0,00
	b. Sewa Aki Bersih	116.000.000,00	54.381.000,00	11.152.000,00	65.533.000,00	57,10	49.764.000,00	0,00
	c. Sewa Lapangan Olah Raga	5.000.000,00	5.300.000,00	0,00	5.300.000,00	100,00	0,00	0,00
	d. Rumah Dinas	20.000.000,00	43.434.040,00	918.700,00	44.352.740,00	221,76	0,00	24.352.740,00
		150.000.000,00	170.548.240,00	13.095.910,00	183.644.150,00	82,43	50.706.050,00	24.352.800,00



asil Regression : Regessi Linier Berganda (dg SPSS 10.0 for Windows)

BEBERAPA FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAMPUAN OTONOMI FISKAL DAERAH KABUPATEN JEMBER

(Studi Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 1995/1996-tahun 2002)

Regression

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
DF	-,8875796	,2738938	8
PD	6,6626871	,1819325	8
RD	6,9879387	,1920467	8

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
	RD, PD ^a		Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: DF

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
	,857 ^a	,735	,629	,1667701	,735	6,941	2	5	,036

a. Predictors: (Constant), RD, PD

ANOVA^b

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	,386	2	,193	6,941	,036 ^a
Residual	,139	5	2,781E-02		
Total	,525	7			

a. Predictors: (Constant), RD, PD

b. Dependent Variable: DF

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	7,505	2,333		3,217	,024		
PD	,319	1,080	,212	,296	,779	,103	9,721
RD	1,506	1,023	1,056	1,471	,201	,103	9,721

a. Dependent Variable: DF

Keterangan :

- ⊗ PD = Pajak Daerah
- ⊗ RD = Retribusi Daerah
- ⊗ DOFD = Derajat Otonomi Fiskal Daerah
- ⊗ Data Input dengan data log

DATA SUMBER-SUMBER PENERIMAAN PAD DAN DERAJAT DESENTRALISASI FISKAL DAERAH TAHUN 1995/1996-TAHUN 2002 (dalam ribuan rupiah)

TII	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Derajat Desentralisasi Fiskal
95/96	2858947	5784301	,23437
96/97	3450200	6124765	,26645
97/98	3600844	6965318	,23902
98/99	3699583	10523147	,12832
99/00	5408902	11239034	,12595
2000	4015314	9195041	,07788
2001	7161839	14086001	,05509
2002	9795713	21184232	,06875

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember tahun 1995/1996-tahun2002.

DATA INPUT ANALISIS REGRESSI LINEAR BERGANDA (DATA LOG)

TII	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	DOFD
95/96	6,45621	6,76225	-,63011
96/97	6,53784	6,78709	-,57438
97/98	6,55640	6,84294	-,57438
98/99	6,56815	7,02215	-,89172
99/00	6,73311	7,05073	-,89979
2000	6,60372	6,96355	-1,10856
2001	6,85502	7,14879	-1,25896
2002	6,99104	7,32601	-1,16275

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember tahun 1995/1996-tahun2002.

Tabel t.

df.	t ₁₀₀	t ₀₅₀	t ₀₂₅	t ₀₁₀	t ₀₀₅	df.
1	3.078	6.314	12.706	31.821	63.657	1
2	1.886	2.920	4.303	6.965	9.925	2
3	1.638	2.353	3.182	4.541	5.841	3
4	1.533	2.132	2.776	3.747	4.604	4
5	1.476	2.015	2.571	3.365	4.032	5
6	1.440	1.943	2.447	3.143	3.707	6
7	1.415	1.895	2.365	2.998	3.499	7
8	1.397	1.860	2.306	2.896	3.355	8
9	1.383	1.833	2.262	2.821	3.250	9
10	1.372	1.812	2.228	2.764	3.169	10
11	1.363	1.796	2.201	2.718	3.106	11
12	1.356	1.782	2.179	2.681	3.055	12
13	1.350	1.771	2.160	2.650	3.012	13
14	1.345	1.761	2.145	2.624	2.977	14
15	1.341	1.753	2.131	2.602	2.947	15
16	1.337	1.746	2.120	2.583	2.921	16
17	1.333	1.740	2.110	2.567	2.898	17
18	1.330	1.734	2.101	2.552	2.878	18
19	1.328	1.729	2.093	2.539	2.861	19
20	1.325	1.725	2.086	2.528	2.845	20
21	1.323	1.721	2.080	2.518	2.831	21
22	1.321	1.717	2.074	2.508	2.819	22
23	1.319	1.714	2.069	2.500	2.807	23
24	1.318	1.711	2.064	2.492	2.797	24
25	1.316	1.708	2.060	2.485	2.787	25
26	1.315	1.706	2.056	2.479	2.779	26
27	1.314	1.703	2.052	2.473	2.771	27
28	1.313	1.701	2.048	2.467	2.763	28
29	1.311	1.699	2.045	2.462	2.756	29
inf	1.282	1.645	1.960	2.326	2.576	inf.

Sumber : John E. Freund & Frank J. Williams, *Modern Business Statistics*, edisi kedua, Prentice Hall, Inc., 1965.

DERAJAT - KEBEBASAN UNTUK PEMBILANG

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	20	24	30	40	60	120	∞
1	161	200	216	225	230	234	237	239	241	242	244	246	248	249	250	251	252	253	254
2	18.5	19.0	19.2	19.2	19.3	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.5	19.5	19.5	19.5	19.5	19.5
3	10.1	5.5	9.70	9.17	9.01	8.94	8.89	8.85	8.81	8.79	8.78	8.70	8.66	8.64	8.62	8.59	8.57	8.55	8.53
4	7.71	6.94	6.59	6.39	6.26	6.16	6.09	6.04	6.00	5.96	5.91	5.86	5.80	5.77	5.75	5.72	5.69	5.66	5.63
5	6.61	5.79	5.41	5.19	5.05	4.95	4.88	4.82	4.77	4.74	4.68	4.62	4.56	4.53	4.50	4.46	4.43	4.40	4.37
6	5.99	5.14	4.76	4.53	4.39	4.28	4.21	4.15	4.10	4.06	4.00	3.94	3.87	3.84	3.81	3.77	3.74	3.70	3.67
7	5.59	4.74	4.35	4.12	3.97	3.87	3.79	3.73	3.68	3.64	3.57	3.51	3.44	3.41	3.38	3.34	3.30	3.27	3.23
8	5.32	4.46	4.07	3.84	3.69	3.58	3.50	3.44	3.39	3.35	3.28	3.22	3.15	3.12	3.08	3.04	3.01	2.97	2.93
9	5.12	4.26	3.86	3.63	3.48	3.37	3.29	3.23	3.18	3.14	3.07	3.01	2.94	2.90	2.86	2.83	2.79	2.75	2.71
10	4.96	4.10	3.71	3.48	3.33	3.22	3.14	3.07	3.02	2.98	2.91	2.85	2.77	2.74	2.70	2.66	2.62	2.58	2.54
11	4.84	3.98	3.59	3.36	3.20	3.09	3.01	2.95	2.90	2.85	2.79	2.73	2.65	2.61	2.57	2.53	2.49	2.45	2.41
12	4.75	3.89	3.49	3.26	3.11	3.00	2.91	2.85	2.80	2.75	2.69	2.67	2.54	2.51	2.47	2.43	2.38	2.34	2.30
13	4.67	3.81	3.41	3.18	3.03	2.92	2.83	2.77	2.71	2.67	2.60	2.53	2.44	2.42	2.38	2.34	2.30	2.25	2.21
14	4.60	3.74	3.34	3.11	2.96	2.85	2.76	2.70	2.65	2.60	2.53	2.46	2.39	2.35	2.31	2.27	2.22	2.18	2.13
15	4.54	3.68	3.29	3.06	2.90	2.79	2.71	2.64	2.59	2.54	2.48	2.40	2.33	2.29	2.25	2.20	2.16	2.11	2.06
16	4.49	3.63	3.24	3.01	2.85	2.74	2.66	2.59	2.54	2.49	2.42	2.35	2.28	2.24	2.19	2.15	2.11	2.06	2.01
17	4.45	3.59	3.20	2.96	2.81	2.70	2.61	2.53	2.49	2.45	2.38	2.31	2.23	2.19	2.15	2.10	2.06	2.01	1.94
18	4.41	3.55	3.16	2.93	2.77	2.66	2.58	2.51	2.46	2.41	2.34	2.27	2.19	2.15	2.11	2.06	2.02	1.97	1.92
19	4.38	3.52	3.13	2.90	2.74	2.63	2.54	2.48	2.42	2.38	2.31	2.23	2.16	2.11	2.07	2.03	1.98	1.93	1.88
20	4.35	3.49	3.10	2.87	2.71	2.60	2.51	2.45	2.39	2.35	2.28	2.20	2.12	2.08	2.04	1.99	1.95	1.90	1.84
21	4.32	3.47	3.07	2.84	2.68	2.57	2.49	2.42	2.37	2.32	2.25	2.18	2.10	2.05	2.01	1.96	1.92	1.87	1.81
22	4.30	3.44	3.05	2.82	2.66	2.55	2.46	2.40	2.34	2.30	2.23	2.15	2.07	2.03	1.98	1.94	1.89	1.84	1.78
23	4.28	3.42	3.03	2.80	2.64	2.53	2.44	2.37	2.32	2.27	2.20	2.13	2.05	2.01	1.96	1.91	1.86	1.81	1.76
24	4.26	3.40	3.01	2.78	2.62	2.51	2.42	2.36	2.30	2.25	2.18	2.11	2.03	1.98	1.94	1.89	1.84	1.79	1.73
25	4.24	3.39	2.99	2.76	2.60	2.49	2.40	2.34	2.28	2.24	2.16	2.04	2.01	1.96	1.92	1.87	1.82	1.77	1.71
30	4.17	3.32	2.92	2.69	2.53	2.42	2.33	2.27	2.21	2.16	2.09	2.01	1.93	1.89	1.84	1.79	1.74	1.68	1.62
40	4.88	3.23	2.84	2.61	2.45	2.34	2.25	2.18	2.12	2.08	2.00	1.92	1.84	1.79	1.74	1.69	1.64	1.58	1.51
60	4.00	3.15	2.76	2.53	2.37	2.25	2.17	2.10	2.04	1.99	1.92	1.84	1.75	1.70	1.65	1.59	1.53	1.47	1.39
120	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.83	1.75	1.66	1.60	1.55	1.50	1.44	1.38	1.30
∞	3.84	3.00	2.60	2.37	2.21	2.10	2.01	1.94	1.88	1.83	1.75	1.67	1.57	1.52	1.46	1.39	1.32	1.22	1.20

Source : John E. Freund & Williams. *Modern Business Statistics*, edisi kedua. Prentice Hall, Inc., 1965.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
LEMBAGA PENELITIAN

Alamat : Jl. Kalimantan No. 37 Telp. (0331) 337818, 339385 Fax. (0331) 337818 Jember 68121
E-mail : lomlit_unej@jember.telkom.net.id

Tanggal
Pengiriman
Surat

619/J25.3.1/PL.5/2003

19 Juni 2003

Permohonan Ijin melaksanakan
Penelitian.

Kepada

Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa
Dan Perlindungan Masyarakat
Pemerintah Kabupaten Jember
di -

JEMBER.

Memperhatikan surat pengantar dari Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Jember No. 3322/J25.1.2/PL.5/2003 tanggal 17 Juni 2003, perihal
ijin penelitian mahasiswa.

- Nama / NIM : HERMANTO ROHMAN / 97-1060
- Fakultas/Jurusan : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik / Ilmu Administrasi Negara
- Alamat : Jl. Bangka III / 22 Jember
- Judul Penelitian : Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Kemampuan Otonomi Fiskal Daerah Kabupaten Jember (Studi Kontribusi Pajak Daerah, Restribusi Daerah, Perusahaan Daerah Dan Penerimaan Dinas Daerah Tahun Anggaran 1998/2002)
- Lokasi : 1. Dinas Pendapatan Daerah Kab. Jember
2. BAPPEDA Kabupaten Jember.
3. Sekretaris Wil. Daerah Bag. Keuangan Kab. Jember
4. BPS Kabupaten Jember
- Lama Penelitian : 2 (dua) minggu

maka kami mohon dengan hormat bantuan Saudara memberikan ijin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan judul di atas.

Demikian atas kerjasama dan bantuan Saudara disampaikan terima kasih.



a.n. Ketua
Sekretaris.

Ir. Didik Sulistyanto
NIP. 131 792 232

Tembusan Kepada Yth. :

- 1. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember
- 2. Mahasiswa ybs.
- 3. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
BADAN KESATUAN BANGSA DAN LINMAS

Jalan Letjen S Parman No 89 337853 Jember

Jember, 18 Juni 2003

Kepada

- Yth.1. SDR. KA. DISPENDA.
- 2. SDR. KA. BAPEDA
- 3. SDR. KABAG KEUANGAN
- 4. SDR. KA. BPS

di -

JEMBER

Nomor : 072/214/436.46/2003.
 Sifat : Penting
 Lampiran : -
 Perihal : Ijin Penelitian

Memperhatikan surat Lembaga Penelitian Univ. Jember, Tanggal 18 Juni 2003, Nomor : 3322 / J75.1.2 / PL.5 / 2003 Perihal Permohonan Ijin Melaksanakan Penelitian.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, apabila tidak mengganggu kewenangan dan ketentuan yang berlaku di Lingkungan Instansi saudara, maka demi kelancaran serta kemudahan dalam pelaksanaan Penelitian dimaksud diminta kepada saudara untuk memberikan bantuan berupa data / keterangan seperlunya kepada :

Nama : HERMANTO ROHMAN / 97-1060
 Alamat : JL. BANGKA II/22 JEMBER
 Pekerjaan : MAHASISWA FAK. ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS JEMBER
 Keperluan : IJIN PENELITIAN DALAM RANGKA PENYUSUNAN SKRIPSI
 Judul : BEBERAPA FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAMPUAN OTONOMI FISKAL DAERAH KABUPATEN JEMBER (STUDI KONTRIBUSI PAJAK DAERAH, RESTRIBUSI DAERAH, PERUSAHAAN DAERAH DAN PENERIMAAN DINAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 1998-2002)
 Waktu : 18 JUNI 2003 S/D 18 AGUSTUS 2003

Demikian atas perhatian dan bantuannya disampaikan terima kasih.

KEPALA BAKOSBANG DAN LINMAS
 KABUPATEN JEMBER



Drs. SUBYAK HIDAYAT, MSI
 Pembina Tk. I
 NIP. 510 063 004

Tembusan : Kepada Yth,
 1. Sdr. Rektor Universitas Jember.
 2. Sdr. MHS. yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENDAPATAN DAERAH
JL. JAWA 72 TELP. 337112 FAX. (0331) 334894 JEMBER

SURAT - KETERANGAN

Nomor : 072/525/436.330/2003

Yang bertanda tangan dibawah ini atas nama Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember menerangkan dengan sesungguhnya bahwa

M a m a : HERMANTO ROHMAN
N i m a : 97 - 1060
A l a m a t : Jl. Bangka II/22 Jember
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial
Ilmu Politik Universitas Jember
Judul Skripsi: Beberapa faktor yang mempengaru-
hi kemampuan otonomi fiskal Da-
erah Kabupaten Jember (Studi-
Kontribusi Pajak Daerah, Retribu-
si Daerah, Perusahaan Daerah, -
dan penerimaan Dinas Daerah Ta-
hun anggaran 1998 - 2003)

yang bersangkutan benar-benar telah melaksa-
nakan penelitian di Kantor Dinas Pendapatan
Daerah Kabupaten Jember terhitung mulai tang-
gal 18 Juni sampai dengan 18 Juli 2003.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 24 Juli 2003

A.n. KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN JEMBER
Kepala Bagian Tata Usaha



Drs. IMAM WARYUDI, MSi

P e m b i n a
Nip. 510.062.103

